

KH. TB. ACHMAD CHATIB (1890-1966)

Jalan Hidup Dan Jejak Langkah
Perjuangan Sang Residen Banten



YAYASAN BHAKTI BANTEN



PEMERINTAH KOTA SERANG

© Yayasan Bhakti Banten 2020

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 4g ayat (1) dan ayat (2) dipidana masing masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000 000.000 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu aptaan atau barang hasii pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat l1), dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

KH. TB. ACHMAD CHATIB (1890-1966)

Jalan Hidup Dan Jejak Langkah
Perjuangan Sang Residen Banten

Mufti Ali, Ph.D



PEMERINTAH KOTA SERANG

KH. TB. Achmad Chatib (1890-1966)
Jalan Hidup Dan Jejak Langkah
Perjuangan Sang Residen Banten

Penulis:
Mufti Ali, Ph.D

Editor :
Jemmy Ibnu Suardi, M.Pd.I

Penata Letak & Desain Cover:
Jemmy Ibnu Suardi, M.Pd.I
Adi Nugraha, S.E

Cetakan Pertama, April 2020
Cetakan Kedua, November 2020

Diterbitkan oleh Pemerintah Kota Serang
Bekerja sama dengan Yayasan Bhakti Banten
Komplek Cigadung Mandiri. Blok J No.10
Rt/Rw. 01/10. Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung,
Pandeglang.42251

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mufti Ali

KH. TB. Achmad Chatib (1890-1966), Jalan Hidup Dan
Jejak Langkah Perjuangan Sang Residen Banten/Mufti Ali.
- Banten: Yayasan Bhakti Banten, 2020.
xiv +199 hlm.; 14,85 x 21 cm

ISBN 978-602-53710-8-0

1 KH. TB. Achmad Chatib (1890-1966) Jalan Hidup Dan Jejak
Langkah
Perjuangan Sang Residen Banten. i. Judul



WALIKOTA SERANG

SAMBUTAN WALIKOTA SERANG

K.H Tb. Achmad Chatib adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai pejuang Kemerdekaan jasanya sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari gencarnya Agresi Militer Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Sebagai Residen Banten pertama pada masa kemerdekaan, KH.Tb. Achmad Chatib berhasil menjaga kedaulatan dan menjadi penguasa Banten yang dicintai rakyat Banten.

Dibawah komando KH. Tb Achmad Chatib sebagai Residen Banten, masyarakat Banten bahu membahu menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Republik yang baru berdiri. Sehingga bagi Pemerintahan Kota Serang sosok penting ini layak untuk diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Dalam proses pengajuan KH. Achmad Chatib sebagai Pahlawan Nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak proses yang mesti dilalui, banyak prosedural yang mesti ditempuh, dan Pemkot Serang dengan sabar dan seksama mau menempuh proses yang berat tersebut.

Sebagai upaya perjuangan ini, terbitnya naskah akademik

usulan Pahlawan Nasional KH.Tb. Achmad Chatib karya Sejarawan Banten, Mufti Ali, Ph.D ini patut untuk didukung dan diapresiasi. Kinerja akademis yang tentunya menghabiskan tenaga, pikiran dan biaya yang tentunya tidak sedikit. Inspirasi yang diberikan oleh Tokoh Nasional KH. Tb. Achmad Chatib seperti digambarkan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan pelajaran penting yang berharga, misalnya bagaimana menjadi seorang kepala pemerintahan yang adil, jujur dan di cintai oleh rakyatnya.

Buku *KH.Tb. Achmad Chatib (1890-1966), Jalan Hidup dan Jejak Langkah Perjuangan Sang Residen Banten* semoga menjadi inspirasi dalam pembangunan Kota Serang kedepannya. Sebagai Kepala Daerah kami mendukung untuk menjadikan bacaan wajib bagi anak bangsa, para pelajar dan mahasiswa Indonesia, khususnya Banten. Sebagai penambah khazanah keilmuan dalam memahami sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

Serang, November 2020

Walikota Serang



H. SYAERUDIN, S.Sos, M.Si

SAMBUTAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SERANG

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahuwataála, atas berkat karunia dan inayah-Nya, buku yang layak dibaca dengan narasi dan ilustrasi yang lebih menarik dan diberi judul *KH. Tb. Achmad Chatib (1890-1966), Jalan Hidup dan Jejak Langkah Perjuangan Sang Residen Banten.*

Karya tulis ini sengaja kami terbitkan agar dapat dijadikan bahan bacaan dan dapat memperkaya khazanah sejarah kebudayaan masyarakat Kota Serang khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Disamping itu, penerbitan buku ini merupakan refleksi dari tingginya penghargaan kami kepada tokoh dan pejuang dari Serang, yang diusulkan menjadi calon Pahlawan Nasional kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Mufti Ali, Ph.D., dan tim yang telah melakukan kajian dan riset dengan penuh keseriusan sehingga kami yakin karya ilmiah ini akan menjadi rujukan penting dalam pembangunan masyarakat kini dan yang akan datang.

Kami menghimbau kiranya buku ini dapat dijadikan bacaan

wajib bagi siswa dan mahasiswa di seluruh Provinsi Banten, sebagai bagian dari mengenang jasa-jasa perjuangan para pahlawan dan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Serang, November 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Serang

Drs. Mohamad Poppy Nopriadi. MSi

KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, buku yang berjudul *KH. Tb. Achmad Chatib Jalan Hidup dan Jejak Langkah Perjuangan Sang Residen Banten* ini akhirnya mendapatkan kesempatan untuk diterbitkan dan disosialisasikan ke masyarakat umum. Karya ini sebenarnya adalah versi adaptasi dari naskah akademik usulan calon pahlawan nasional asal Banten, Tb. KH. Achmad Chatib, oleh dinas sosial kota Serang tahun 2019 yang lalu. Buku ini merupakan hasil riset penulis di Arsip Nasional Jakarta pada Maret 2017 dan studi pustaka di Perpustakaan Universitas Leiden maret 2016 dan Pusat Sejarah TNI AD di Bandung mei 2018. Banyak pihak telah *men-support* penulis untuk menyelesaikan buku ini. Dinas Sosial Provinsi Banten telah memberikan dukungan finansial dalam riset penulis ke Papua Barat.

Sejak awal rancangan draft sampai akhir penulisan buku ini, penulis mendapatkan pencerahan dan bimbingan melalui diskusi-diskusi mendalam dan intensif dengan sahabat dan guru penulis, Nely Wahyudin (1970-2019), yang kepadanya buku ini penulis dedikasikan. Almarhum sangat mendukung dan memberikan support moral dalam penulisan sejarah perjuangan para pahlawan dari Banten. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ampunan-Nya kepadanya dan beliau berada dalam samudera *maghfirah* dan kasih sayang-Nya (*amiin ya rabbal aalamiin*).

Penulis banyak dibantu dalam penelitian-penelitiannya, baik untuk karya ini dan karya-karya lainnya oleh para asisten peneliti: Farhan al-Fuadi, S.Thi, Dr. Rahayu Permana, Mehrunnisa, dan Mardiah, S.S. Penulis juga berhutang budi kepada *supporting team* dari Sultan Abul Mafakhir Institute (SAMI): Jemi ibn Suardi (editor), Adi Nugraha (lay outer), Usman, Romi, Rohman, Yusuf, Astri Lidya dan

Miftahul Ulum dari Bhakti Banten Press. Tidak lupa, penulis sangat terbantu banyak dalam riset-risetnya oleh dukungan moril dan materil dari kedua kakak penulis, Hj. Siti Hasanah, S.Pdi dan Siti Asiah, S.Pd, yang selalu semangat membaca karya-karya penulis. Istri, Intan D.S. dan tiga puteri penulis: Mehr, Mahira, dan Amira senantiasa menjadi motivator dalam penyelesaian riset dan publikasi penulis.

Karang Tanjung, Pandeglang, November 2020
Penulis

in memoriam

mengenang wafatnya sahabat dan guru kami,

Nely Wahyudin bin H. Abdul Wahid

(18 Juli 1970 - 18 Oktober 2019)



DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA SERANG	v
SAMBUTAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SERANG	vii
KATA PENGANTAR PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAGIAN PERTAMA

Pendahuluan	1
-------------------	---

BAGIAN KEDUA

Kelahiran dan Masa Kanak-kanak Sampai Remaja.....	13
Pendidikan K.H. TB. Achmad Chatib	17

BAGIAN KETIG

Banten Masa Kolonialisme Belanda	23
Berjuang Membebaskan Masyarakat dari Beban Pajak 1926	42
Dibuang ke Boven Digul	49
Doa Perang Sabil Syekh Asnawi Caringin di Peci Tb Kh. Achmad Chatib.....	53
Turut Mengenyahkan Kolonialisme Belanda di Banten	61
Berjuang Memupuk Rasa Nasionalisme Indonesia	65

BAGIAN KEEMPAT

Masa Pendudukan Jepang	67
Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Rakyat.....	77
Komandan Tentara Peta.....	78

BAGIAN KELIMA

Masa Revolusi Kemerdekaan Terpilih sebagai Residen Banten.....	89
Berjuang Mengusir Jepang dari Banten	99
Menumpas Gerakan Dewan Rakyat	103
Konsolidasi Kekuatan Masyarakat Banten Pasca Proklamasi.....	116
Mendirikan Majelis Ulama di Banten tahun 1946.....	123
Mendukung Berdirinya Radio Perjuangan Banten tahun 1947	123
Siap Mati Demi Mempertahankan Republik.....	124
Mendukung Penuh Pembentukan Brigade I/Tirtayasa.....	128
Mengatasi Kebutuhan Hidup Masyarakat Banten	135
Mencetak Orang Republik Indonesia Daerah Banten.....	140
Bergerilya Menghadapi Agresi Militer Belanda II.....	142
Menjalankan Roda Pemerintahan RI di Pedalaman	152
BAGIAN KEENAM.....	159
Masa Orde Lama sebagai Ulama di Banten	159
Mendirikan Universitas Maulana Yusuf, Cikal Bakal UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	159
Ikut Merintis Pembentukan Provinsi Banten	165
Peninggalan K.H. TB. Achmad Chatib	170
Wafatnya K.H. TB. Achmad Chatib	171
BAGIAN KETUJUH.....	175
Wasiat KH.Tb. Achmad Chatib	175
DAFTAR PUSTAKA.....	178
DAFTAR INDEKS	194

BAGIAN PERTAMA

Pendahuluan

Jatuhnya Banten dalam kekuasaan Belanda merupakan pukulan terberat dalam sejarah Kesultanan Banten. Sejak kekuasaan Banten berada di tangan Sultan Haji, keadaan Banten mulai memburuk. Sultan Haji bertambah akrab hubungannya dengan Kompeni Belanda. Sultan Haji mengadakan perjanjian dengan Belanda yang ditandatangani pada tahun 1684. Isi perjanjian antara lain Belandalah yang memegang hak monopoli perdagangan dalam hubungan ekspor-impor dan sebagai bukti penguasaan politik di Banten, Belanda diijinkan membangun benteng Speelwijk pada tahun 1685. Sejak saat itu Banten berada di bawah penguasaan Belanda (Eri Fitriana, dkk, 2016: 18: Online).

Kebangkitan Islam di Indonesia ditandai dengan bermunculannya organisasi-organisasi Islam pada awal abad ke-20, seperti antara lain: Syarekat Dagang Islam (SDI) yang berdiri tahun 1905, Muhammadiyah tahun 1912, Al-Irsyad tahun 1914, Persatuan Islam (PERSIS) tahun 1917, Nahdlotul Ulama (NU) tahun 1926 dan lainnya. Organisasi-organisasi tersebut telah berupaya secara aktif menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan umat Islam Indonesia dalam rangka mengusir penjajah. Dengan demikian kebangkitan tersebut telah membawa dampak positif bagi perjuangan kaum muslimin di Indonesia, sebaliknya berakibat negatif bagi kepentingan-kepentingan Kolonial Belanda. (Mufti Ali, 1972: 5)

Tidak hanya itu, terhadap umat Islam, penjajah Belanda

menerapkan politik “belah bambu” atau yang dikenal juga dengan *divide et impera* dengan menciptakan faksi-faksi ataupun klasifikasi-klasifikasi tertentu. Akibatnya, umat Islam terkotak-kotak menjadi sekian banyak kelompok yang terpisahkan oleh pemikiran, pendapat, sikap, dan wacana keagamaan. Situasi tersebut pastilah merugikan umat Islam di Indonesia dan mendorong mereka untuk melakukan perlawanan. Di samping perlawanan militer, terjadi juga semacam perlawanan keagamaan dan pemikiran yang diwarnai nuansa keagamaan. Disadari atau tidak, semangat perlawanan umat Islam terhadap penjajah Belanda maupun Jepang secara khusus diwarnai oleh semangat keislaman yang kuat. Lebih jauh lagi, banyak sekali ulama yang bahkan terlibat langsung dalam kancah perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang.

Menurut Ricklefs (2008: 427), pada masa pendudukan Jepang rakyat Indonesia tidak lebih baik dari masa pendudukan kolonial Belanda. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang dalam menggapai tujuan mereka, salah satunya melakukan propaganda-propaganda yang meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka dan bangsa Jepang adalah saudara seperjuangan. Untuk melancarkan propagandanya, pihak Jepang mempekerjakan orang-orang Indonesia seperti guru sekolah, seniman dan tokoh-tokoh sastra. Film, drama, wayang dan terutama radio digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan Jepang. Karena sedikitnya radio, maka banyak propaganda radio disiarkan lewat pengeras-pengeras suara yang dipasang di tempat-tempat umum.

Pendudukan Jepang di Indonesia dilakukan karena mereka

mebutuhkan sumber-sumber alam yang ada untuk keperluan perang, selain mengeruk sumber daya alam yang ada, bangsa Jepang juga memanfaatkan pemuda-pemuda Indonesia untuk dijadikan serdadu-serdadu Jepang seperti *Seinendan*, *Keibodan* dan *Heiho*. Pada bulan Oktober 1943, pihak Jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia yang paling berarti, yaitu PETA (Pembela Tanah Air). Organisasi ini merupakan suatu tentara sukarela bangsa Indonesia (Ricklefs, 2008: 427). Meskipun begitu, organisasi-organisasi buatan Jepang inilah yang menjadi cikal bakal adanya BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang nantinya menjadi prajurit dalam tubuh angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Masyarakat di Indonesia memiliki sistem sosial budaya yang mengintegrasikan keseluruhan individu dengan keanekaragaman peran dan sistem sosialnya ke dalam proses-proses sosial berdasarkan nilai dan norma. Sebagai bagian masyarakat Banten yang terkenal religius, tentu saja secara individu *Urang Banten* terintegrasi dalam kesadaran kolektif masyarakatnya. Integrasi terjadi melalui proses belajar nilai kebudayaan. Banten sudah terkenal dengan masyarakatnya yang Islami, ini membuktikan bahwa Islam telah mempengaruhi kebudayaan masyarakat Banten. Adat kebiasaan masyarakat Banten tentunya berlainan dengan adat kebiasaan daerah lain. Banten tiga tahun yang lalu merupakan bagian dari propinsi Jawa Barat, namun kini telah menjadi provinsi sendiri. Banten terkenal dengan nuansa Islaminya, maka tidaklah mengherankan banyak sekali terdapat pondok pesantren yang tersebar di wilayah Banten. Para muridnya tidak hanya berasal dari daerah Banten sendiri, tetapi

banyak pula yang berasal dari daerah lain. Dengan terkenalnya Banten dengan religiusitas masyarakatnya, aspek religiusitasnya ini masih dapat dilihat dalam praktek-praktek peribadatan dan juga ritual keagamaannya. Masyarakat Banten dalam kehidupannya masih meneladani kaum ulama yang dianggap berpengaruh besar dalam kehidupan dan ritual keagamaan.

Tokoh ulama¹ yang terkenal di Banten adalah KH. TB Achmad Chatib, beliau merupakan ulama yang kharismatik² di Banten. Perjuangannya untuk Indonesia dimulai masa kolonialisme Belanda sampai masa akhir hayatnya. Pada masa kolonialisme Belanda KH. TB. Achmad Chatib berusaha untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada kepada para pemuda Indonesia. Di masa Jepang beliau masuk sebagai Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Dimasa kemerdekaan beliau pun banyak sekali pengorbanannya untuk Indonesia.

Dapat dijelaskan bahwa pada masa kemerdekaan ketika melihat roda pemerintahan yang mandeg, kursi residen kosong, para pemuda pada akhir Agustus kemudian mengambil inisiatif

¹ Istilah “ulama” secara sederhana berarti orang yang mengetahui atau orang yang memiliki ilmu. Tidak ada pembatasan ilmu spesifik dalam pengertian ini. Tetapi, seiring perkembangan dan terbentuknya ilmu-ilmu Islam khususnya syari’ah atau fikih, pengertian ulama menyempit menjadi orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang fikih. Meskipun di Timur Tengah ini, pengertian ulama cenderung kembali meluas mencakup orang-orang yang ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum (Burhanudin, 2002: xxvii).

² Teori tentang kepemimpinan kharismatik bahwa pemimpin kharismatik ketika para pengikut-pengikutnya mengakui dia sebagai kharismatik, karena mereka melihat akibat besar yang timbul ketika tidak ada kekuasaan. Supaya kharisma pemimpin bisa wujud, ia harus diakui oleh pengikut-pengikutnya. (Wrong, 1970: 257)

untuk menyelenggarakan pertemuan yang dilaporkan berlangsung di rumah Zulkarnaen Suria Karta Legawa, seorang ketua Dewan Penasehat Residen Banten pada masa kolonial Jepang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para tokoh pemuda dari berbagai elemen, jawara, tokoh ulama, dan tokoh wanita. Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk memilih secara aklamasi KH. TB Achmad Chatib, menantu Kyai paling kharismatik saat itu, Syech Asnawi Caringin, sebagai residen Banten. Hasil keputusan rapat ini kemudian disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang kemudian melalui radiogramnya pada tanggal 2 September mengangkat tokoh dan aktivis 1926 yang pernah dibuang ke Digul ini menjadi residen Banten.

KH. TB Achmad Chatib kemudian menyusun personalia yang akan duduk di berbagai jabatan dalam lingkungan pemerintahan daerah residensi Banten. Ia juga kemudian mengeluarkan keputusan bahwa para pegawai di pemerintahan sebelumnya tetap pada jabatan yang lama. Setelah itu ia membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah, yang anggotanya para bekas anggota *Shu sangikai* (Dewan Penasehat Keresidenan) ditambah dari golongan ulama, pemuda, wanita, pegawai, petani, nelayan, dan intelektual. Dewan ini diketuai oleh Zulkarnaen Suria Karta Legawa.



Achmad Chatib Residen Pertama Banten dari kalangan pribumi (sumber: Banten in time revolution, Archipel vol 50)

Selanjutnya sesuai instruksi dari pusat, setelah KNID residen Banten dan KNID kabupaten terbentuk, KH. TB Achmad Chatib segera menginstruksikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat dari tingkat residensi sampai tingkat kecamatan. Komando tertinggi BKR ini selanjutnya dipercayakan kepada KH. Sjam'un, seorang pendiri dan pemimpin Perguruan Al-khairiah. (Mufti Ali dkk, 2015: 140-160).

Pada saat menjadi residen Banten, tentunya banyak sekali tugas yang harus ditangani K.H. TB Achmad Chatib: menyusun personalia pemerintahan daerah di Keresidenan Banten 1945,

mengusir tentara Jepang dari Banten pada 2-11 Oktober 1945, penumpasan gerakan Dewan Rakyat yang dipimpin oleh Cemat pada 8 Januari 1946. Beberapa program sosial kemasyarakatan juga ia canangkan, seperti mendirikan Majelis Ulama Banten pada 18 Januari 1946. Kemudian pada tahun 1947 di masa agresi militer Belanda pertama, K.H. TB Achmad Chatib yang dibantu oleh para pejabat di keresidenan Banten berupaya mengatasi krisis bahan pangan akibat blokade Belanda terhadap Banten. Ia juga mencetak Oeang Repoebliek Daerah Banten (ORIDAB). Pada tahun 1947, ia juga menyetujui berdirinya siaran Radio Perjuangan untuk daerah Banten yang sangat membantu dalam memberikan informasi bagi masyarakat Banten. Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua yang membuktikan bahwa hal tersebut merupakan sebuah malapetaka militer dan politik walaupun nampaknya agresi tersebut akan menghasilkan kemenangan yang mudah. Pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemerintah republik membiarkan diri mereka jatuh ke tangan Belanda dengan harapan agar opini dunia memihak kepada Indonesia. Sukarno, Hatta, Agus Salim (Menteri Luar Negeri) dan seluruh anggota kabinet kecuali yang sedang tidak berada di tempat ditangkap, begitu juga Sjahrir. Tentara republik tidak dapat memahami alasan menyerahnya politisi-politisi ini padahal mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk republik (Ricklefs 2001 : 282).

Kekuatan republik mundur ke pedalaman dan mulai melakukan perang gerilya. Pasukan bersenjata mundur dari Yogyakarta pada malam 19/20 Desember. Di akhir Desember

seluruh kota-kota utama di Jawa dan Sumatera jatuh ke tangan Belanda. Satu-satunya wilayah yang tetap berada di tangan republik adalah Aceh di mana Daud Beureueh berkuasa (Ricklefs, 2001: 282).



Oeang Repoeblik Daerah Banten (ORIDAB)
(sumber: Banten in time revolution, Archipel vol 50)

Belanda menyadari bahwa kampanye militer mereka menciptakan masalah di belakang. Masyarakat sipil Indonesia sama sekali tidak menyukai jika diajak bekerjasama. Belanda berusaha membujuk Sultan Hamengkubuwana IX untuk menjadi pemimpin negara Jawa. Namun, ia menolaknya. Kabinet pemerintahan di Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan memprotes tindakan agresi militer dengan cara mengundurkan diri (Ricklefs, 2001: 283).

Belanda menerima seruan PBB untuk melaksanakan gencatan senjata pada tanggal 31 Desember 1948 di Jawa dan 5 Januari 1949 di Sumatera, tetapi perang gerilya tetap berlanjut. Soedirman sedang sekarat karena menderita penyakit TBC. Ia

tidak dapat memimpin pasukan walaupun tetap menjadi simbol angkatan bersenjata. Nasution lah yang secara efektif memimpin di lapangan. Pada tanggal 22 Desember ia mengumumkan berdirinya pemerintahan militer di Jawa. Pada tanggal 1 Maret, Letnan Kolonel Suharto menyerang Yogyakarta dan menguasainya selama enam jam, hal yang kemudian dilebih-lebihkan ketika ia menjadi presiden kedua Indonesia (Ricklefs, 2001: 283).

Setelah Belanda melakukan pembersihan terhadap TNI dan kekuatan-kekuatan lain, tindak lanjutnya adalah melakukan pembentukan pemerintah sipil yang diberi nama *territoriaal bestuurs Adviseur* (TBA) Banten. Pemerintahan sipil ini berpusat di Serang di bawah pimpinan N. Makkers. Usaha khusus dalam menyusun kembali jajaran pamong praja, tidak mudah. Setidak-tidaknya dua alasan kesulitan itu, *pertama*, karena sebageaian besar pamong praja dan pegawainya, dari residen hingga asisten wedana (camat) meninggalkan kota menuju daerah pedalaman bersama TNI; *kedua*, karena kaum intelektual Banten tampak lebih suka berada di luar daerah itu.

Untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan baru itu, berbagai usaha dilakukan di antaranya menghimbau agar kaum intelektual putra Banten yang ada di Jakarta, Cirebon, dan Lampung segera kembali. Beberapa putra Banten yang tengah menjabat di jajaran kepamongprajaan di tempat lain yang diharapkan kembali untuk menjadi printis pemerintah TBA Banten adalah Mas Asikin Nitiatmadja, R. Moeniran (Walikota Cirebon), dan R. Noesrat Djajadiningrat (Patih Tangerang). Dalam usaha pengisian aparat pamong praja, terdapat beberapa

tempat yang sulit mendapatkan tenaga, seperti Ciomas di Kabupaten Serang, Menes dan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang, serta Malingping dan Bayah di Kabupaten Lebak.

Agresi militer Belanda II ke wilayah Banten diantisipasi oleh Residen KH. TB. Achmad Chatib dan Joesoep Adiwinata, Wakil Gubernur Jawa Barat, dengan memindahkan roda pemerintahan ke daerah pedalaman. Sebagian besar aparat pemerintah (republik), Kepala Polisi Keresidenan Banten, Joesoep Martadilaga beserta anak buahnya kemudian mengungsi bersama TNI ke pedalaman dan meninggalkan Serang sebagai ibukota pemerintahan yang diduduki oleh Belanda.



Jusuf Martadilaga dan Ali Amangku

(sumber: Banten in time revolution, Archipel vol 50)

Tempat yang paling strategis yang dipilih oleh para pejabat pemerintahan RI tersebut adalah Banten selatan. Tempat ini

dipandang paling tepat sebagai lokasi alternatif untuk menjalankan roda pemerintahan di pedalaman. Selain tempatnya jauh dari Serang, sekitar 170 km, Banten selatan dianggap tempat yang paling cocok untuk konsolidasi pemerintah sipil dan sekaligus sebagai markas komando perang gerilya (Mufti Ali dkk, 2015: 170–171).

Ingatan tentang roda pemerintahan sipil dan komando markas gerilya yang dijalankan KH. Achmad Chatib, Joesoep Martadilaga dan para petinggi sipil dan militer pemerintah RI tersebut diduga masih dipelihara dalam ingatan kolektif masyarakat di Cikeusik, Cibaliung, Sumur, Cigeulis, Cimanggu, dan wilayah sekitarnya. Namun sayangnya belum ada upaya serius dilakukan untuk mendokumentasikan ingatan kolektif masyarakat tersebut sehingga dimungkinkan karena perjalanan waktu dimana sebagian besar para saksi sejarah sudah meninggal dunia ingatan kolektif tersebut menghilang. Oleh karena itu dianggap perlu untuk segera mendokumentasikan ingatan kolektif masyarakat Banten Selatan tentang perjuangan para patriot Banten dalam menjalankan roda pemerintahan RI di tengah-tengah Agresi Militer Belanda II.

BAGIAN KEDUA

Kelahiran dan Masa Kanak-kanak Sampai Remaja

Tubagus Achmad Chatib ibn Waseh al Bantani, lahir di Kampung Gayam, Desa dan Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, pada hari Ahad, bulan Mei 1890. Ayahnya bernama K.H. TB. Muhammad Waseh, seorang ulama terkenal di Pandeglang. Di tengah-tengah cengkraman kekejaman kolonialisme Belanda, beliau menghabiskan masa kecilnya dengan pendidikan yang tidak mudah, sehingga hal itu membentuk pribadinya menjadi tangguh dan kuat dalam menghadapi deru cobaan kehidupan.

Beliau adalah keturunan ulama Banten, jika ditelusuri silsilahnya adalah sebagai berikut : KH. TB. Achmad Chatib - bin TB. H. Muhammad Wasi bin TB. H. Muhammad Thahir bin TB. Hafidz bin TB. Qadhi Santika bin TB. Tong bin TB. Pangeran Madura Raja Elyas bin Sultan Abil Ma'ali Ahmad bin Sultan Abil Mafakhir Muhammad Abdul Kodir bin Maulana Muhammad bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin Sultan Banten Pertama bin Syarif Hidayatullah bin Ainul Yakin Sunan Giri bin Maulana Ishaq di Tuban bin Mulana Malik Ibrahim bin Muhyil-Islam Barkat bin Jamaluddin Al-Akbar bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Syah Hansyah bin Al-Amir Abdul Maliq bin Alwi bin Muhammad Sohib Marbat bin Ali Khalang Qosim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Bisri bin Muhammad Al-Tumani bin Ali Al-ridhi M. Madani bin Ja'far Al-

Sodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zaenal Abidin bin Al-Husein bin Fatimatu Al-Zahra al-Battul binti Rasulullah Muhammad SAW (Wawancara, Hj. Tinti Chatib, 21/02/2019).

KH. Achmad Chatib tumbuh besar di lingkungan santri tradisional dan oleh karenanya mewarisi tradisi spiritualisme masyarakat Banten yang khas dianut kalangan santri, ia pun menganut Tarekat Qadhariah wa Naqsubandiyah.³ K.H. TB. Achmad Chatib, pada usia 20 tahun atau pada tahun 1910, dipinang oleh Ki Agung Caringin (K.H. Asnawi)⁴ untuk dijadikan menantu dan menikah dengan Hj. Ratu Chasanah (Iyot). Pada tahun 1912-1914 Ki Agung Caringin bersama keluarganya, termasuk A. Chatib, berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, yang ikut serta ke dalam rombongan ini adalah: KH.TB. Asnawi (Bapak), Nyai Halimah (Istri), Ratu Chasanah (anak), R. Husni (menantu), Ratu Zainab (anak). TB. Fadil (menantu), KH. TB. A. Chatib (menantu), KH. TB. M. Hadi (anak), KH. TB. M. Mahdi (anak), Ratu Afiah (anak), H. Dawel (pembantu), H.

³ Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah adalah tarekat yang berpengaruh dan banyak pengikutnya di Banten. Tarekat ini di bawa ke Banten oleh Syaikh Akhmad Khatib seorang ulama yang berasal dari Sambas Kalimantan Barat. Namun ia menjadi guru tarekat yang sangat terkenal di Makkah pada abad ke-19. Pengajaran tarekat ini memperlihatkan sikap yang keras terhadap soal-soal keagamaan. Tuntutannya adalah agar ketentuan-ketentuan dalam al-qur'an ditaati dengan seksama, berzikir merupakan hal yang esensial. (Muhamad Hudaeri, et.al., 2002, hlm. 9)

⁴ KH.Asnawi, lahir di kampung Caringin, Labuan Banten.pada tahun 1862 K.H Asnawi berangkat ke Mekkah untuk menimba ilmu. Di Mekkah beliau mempelajari agama Islam dengan ulama kelahiran Banten yang telah termahsyur yang bernama Syeikh Nawawi Al-Bantani (Erie Fitriana, dkk, 2016, hlm. 21: Online).

Arip (pembantu), H. Jaka (pembantu), H. Malik (Cucu), H. Makmun (cucu). (Wawancara, Hj. Tinti Chatib, 21/02/2019).

Pulanginya keluarga Ki Agung Caringin dari Makkah lantaran pecahnya Perang dunia yang berakibat perebutan kekuasaan antara Syarif Husain sebagai Raja Makkah di bawah kekuasaan Turki dan Saudi sebagai pemenangnya. Dengan adanya perang tersebut kondisi masyarakat Arab mengalami kelaparan termasuk keluarga Ki Agung Caringin, sehingga mereka memutuskan untuk pulang ke tanah air.

Hj. Rt. Chasanah bukanlah satu-satunya istri K.H. TB. Achmad Chatib. Ia mempunyai tiga orang isteri, yang pertama bernama Ratu Chasanah atau ibu Iyot, menikah di umur 20/21 tahun dan memiliki dua orang anak, yaitu Sochari Chatib dan Ratu Ifat. Istri Kedua bernama Nyai Kamsah, yang dinikahi pada usia 50 tahun. Pernikahan K.H. TB Achmad Chatib dengan Nyai Kamsah terjadi saat K.H. TB. Achmad Chatib sedang bergerilya di gunung. Saat itu karena merasa kelelahan, K.H. TB. Achmad Chatib meminta kepada seseorang untuk memijatnya. Karena hanya Nyai Kamsah yang bisa memijat di kampung tempat K.H. TB. Achmad Chatib beristirahat, untuk menghindari fitnah dan menepati etika, ia menikahinya terlebih dahulu. Dengan Nyai Kamsah, K.H. TB. Achmad Chatib tidak diberi keturunan. Isteri ketiga bernama Latifah. Saat menikahi Latifah KH.TB. Achmad Chatib sudah pensiun dan Latifah baru berusia 13 tahun. Ia adalah seorang anak yang biasa membantu K.H. TB. Achmad Chatib dan oleh ayahnya kemudian dinikahkan dengan KH.TB. Achmad Chatib. Dari pernikahannya dengan Latifah, KH. TB. Achmad Chatib memiliki delapan orang anak, bernama HJ.

Ratu Tinty Fathinah Chotib, Hj. Ratu Fatiti Chatib, Hj. Ratu Faizah Chatib, Hj. Ratu Faiqoh Chatib, Tb. Fadlullah Chatib (Alm), H. Tb. Fathul 'Adzim Chatib, Ratu Faichah Chatib (Almh), Hj. Ratu Fashohah Chatib. (Wawancara)



Lukisan KH. Achmad Chatib dengan istri pertama, Ratu Chasanah atai Ibu Iyot.

(Sumber: dokumentasi pribadi)



Foto KH. Achmad Chatib dengan dengan istri ketiga, Nyai. Latifah

(Sumber: dokumentasi pribadi)



Foto putra dan putri KH. TB Achmad Chatib dari istrinya Nyai. Latifah (sumber: dokumentasi pribadi)

Pendidikan K.H. TB. Achmad Chatib

Berdasarkan cerita yang sampai kepada anak keturunannya, K.H. TB. Ahmad Chatib telah menerima pendidikan pesantren dari usia belia sampai dewasa. Hampir dipastikan ia tidak pernah menerima pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Sebagai anak yang lahir di tengah keluarga santri, ia menerima pendidikan paling dasarnya dari ayahnya, K.H. TB. Wasi'. Ayahnya telah memberikan dasar-dasar pengetahuan agama dari mulai membaca al-Quran sampai praktik dasar ibadah. Untuk mematangkan pengetahuannya agamanya, K.H. TB. Wasi' mengirimnya mesantren di Pesantren Cibeber-Cilegon. K.H. Abdul Latif adalah guru pertamanya di dunia pesantren yang telah memberikan wawasan agama tingkat dasar (Wawancara, Hj. Tinti Chatib, 21/02/2019). Di bawah bimbingannya, K.H. TB.

Ahmad Chatib, mempelajari kitab-kitab klasik sebagaimana umumnya kita temukan di pesantren-pesantren di Banten sekarang.

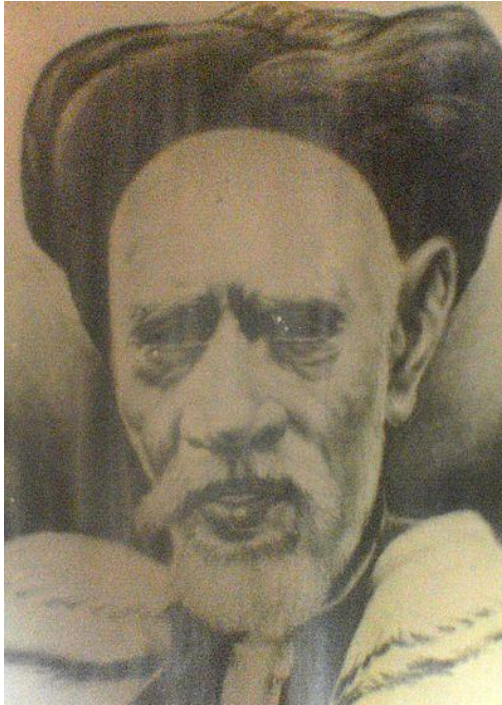
K.H. Abdul Latif sendiri adalah seorang khalifah tarekat Qadiriyyah-Naqshabandiyah yang mendapat ijazah dari Syekh Asnawi Caringin (M.V. Bruinessen, 1992, hlm. 93). Sebagai seorang mursyid, K.H. Abdul Latif memiliki banyak murid tarekat. Banyak murid-muridnya tumbuh menjadi simpul tarekat Qadiriyyah-Naqshabandiyah di wilayahnya masing-masing. Dua di antaranya adalah K.H. Muhaimi seorang penerusnya di Pesantren Cibeber dan K.H. Muslikh, pengasuh Pesantren Futuhiyyah di Meragen. K.H. Muslikh berdasarkan reportase Martin v. Bruinessen, selalu merujuk silsilah tarekatnya pada setiap upacara-upacaya zikir kepada para gurunya di Banten, yaitu K.H. Abdul Latif bin Ali al-Bantani, Syekh Asnawi Caringin dan Syekh Abdul Karim Tanara (M. V. Bruinessen, 1992, hlm. 95).

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di pesantren Cibeber, K.H. TB. Ahmad Chatib melanjutkan pendidikannya ke Caringin. Di sana ia belajar kepada Syekh Asnawi Caringin. Sampai tahun 1920-an Syekh Asnawi adalah tokoh ulama Banten kharismatik. Ia menerima ijazah tarekat dari dua orang guru Syekh

Abdul Karim Tanara dan Syekh Ahmad Khatib Sambas (M. A. Thihami dan Mufti Ali, 2014, hlm. 137). Menurut riset Martin V. Bruinessen, Syekh Asnawi Caringin telah berhasil memainkan perannya sebagai khalifah tarekat dari Syekh Abdul Karim Tanara yang utama di Banten (M. V. Bruinessen, 1992: 93). Dan dalam analisisnya mengenai jatuh bangun tarekat, setelah tahun

1924, setelah berdirinya kekuasaan Wahhabi di bawah Ibnu Sa'ud, tarekat telah kehilangan link internasional di Hijaz sebagai pusat tarekat yang sesungguhnya. Banyak guru tarekat di daerah-daerah di Indonesia pada akhirnya mengambil kiprah untuk mengisi kekosongan tersebut (M.V. Bruinessen, 1992, hlm. 116), di Banten, kita harus menyebut Syekh Asnawi telah berhasil mengambil peran ini.

Syekh Asnawi telah memiliki murid yang berperan sebagai para guru tarekat terpenting. Di Banten kita temui beberapa tokoh seperti K.H. Abdul Latif Cibeber, Ahmad bin Asnawi di Menes, Ki Armin Cibuntu seorang kemenakannya (M. A. Thihami dan Mufti Ali, 2014, hlm.138) dan K.H. Muslikh Meragen harus disebut, seorang khalifah tarekat Qadiriyyah Naqsabandiyah yang menerima silsilah tarekatnya dari Syekh Asnawi dan K.H. Abdul Latif Cibeber.



Sketsa Syekh Asnawi Caringin (sumber: republika.co.id)

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Caringin K.H. TB Achmad Chatib mematangkan pendidikannya di Makkah. Keberangkatannya ke Makkah memiliki hubungan dengan kepulangan ayahnya K.H. Wasi' yang sudah mukim di Makkah. Ia memiliki rumah dan sebidang tanah di Makkah. Kepulangannya ke tanah air membawa maksud membawa anak-istrinya ke Makkah untuk kemudian bisa tinggal di sana. Namun, usianya tidak panjang, setelah kepulangannya itu, ia pun meninggal dunia. K.H. TB Achmad Chatib sendiri berangkat ke Makkah untuk maksud memenuhi harapan ayahnya sekaligus belajar agama kepada para guru di Makkah. Tidak ada rekam data

yang valid bisa menjelaskan kepada kita, siapa saja ulama yang menjadi gurunya di Makkah. Selain Makkah yang disebut-sebut telah dikunjunginya untuk menuntut ilmu, ia juga mendarangi Baghdad. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di Timur Tengah, K.H. TB. Achmad Chatib kembali ke Banten, kembali nyantri kepada Syekh Asnawi Caringin. Karena talenta dan kharismatika yang tinggi dibanding para santri lainnya, Syekh Asnawi pun tertarik memintangnya menjadi menantu. K.H. TB. Achmad Chatib pun dinikahkan dengan putri Syekh Asnawi Caringin, Rt. Hasanah (Wawancara, Hj. Tinti Chatib, 21/02/2019).

Berbekal pendidikan dari dua tokoh ulama yang kharismatik ini, K.H. TB. Achmad Chatib tumbuh sebagai tokoh Banten yang kuat dan memiliki daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Oleh karenanya, di masa-masa revolusi ia berhasil memainkan peran sebagai tokoh sentral pergerakan dan memiliki kesempatan besar sebagai pemimpin Banten yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah pusat.

BAGIAN KETIGA

Banten Masa Kolonialisme Belanda

Setelah memasuki tahun 1900 kerajaan Belanda mengeluarkan perubahan kebijakan politik untuk Hindia Belanda. Pemerintah Belanda mulai memberlakukan teori politik etis untuk Hindia Belanda sejak tahun 1901 (Muljana, 2008: 11). Dengan teori ini, pemerintah kolonial harus ikut serta membangun negara jajahannya. Pemerintah harus mulai memikirkan masa depan rakyat Hindia Belanda, kesejahteraannya dan pendidikannya. Mr. Conrad Th. Van Deventer adalah seorang anggota parlemen di Kerajaan Belanda yang mendorong keluarnya kebijakan politik etis. Gagasannya dituangkan di dalam artikel berjudul "*Een Eereschuld*" (Hutang Kehormatan) yang terbit di majalah *De Gids* tahun 1899. Di dalam artikel ini, van Deventer menegaskan bahwa kerajaan Belanda harus mengembalikan uang rakyat Indonesia sebesar 187 juta Gulden dari hasil tanam paksa yang pernah diberlakukan di Hindia Belanda (Vlekke, 2003: 327). Usulan dana bantuan sebesar 187 juta gulden tersebut diambil dari keuntungan kerajaan Belanda yang didapat dari tanah Hindia Belanda.

Setelah keluarnya usulan van Deventer dan diolah secara matang oleh parlemen kerajaan Belanda, Ratu Wilhelmina (1890-1948) mengeluarkan putusan melakukan penelitian terhadap kesejahteraan di Jawa (Ricklefs, 2011: 228). Untuk merealisasikan kebijakan politik etis, Ratu Wilhelmina mengangkat Alexander W.F. Idenburg menjadi menteri urusan negara-negara jajahan yang menjabat dari tahun 1902 sampai 1919. Kebijakan politik etis direalisasikan oleh Idenburg melalui tiga program kesejahteraan:

edicate, emigratie, dan irrigatie (pendidikan, perpindahan penduduk dan pengairan) (Ricklefs, 2011: 228). Sejak bergulirnya kebijakan politik ekonomi kerajaan Belanda untuk Hindia Belanda, bangsa Indonesia mulai mendapat angin segar dan menemukan harapan baru secara berangsur.

J. Stroomberg di dalam *Handbook Hindia Belanda* yang diterbitkan Divisi Perdagangan tahun 1930 memberi gambaran singkat tentang situasi politik hubungan antara pemerintah pusat di Kerajaan Belanda dengan negeri jajahan Hindia Belanda. Politik etis menurutnya berpangkal pada kebijakan pengelolaan keuangan di bawah kontrol *volksraad*⁵. Pemerintah Belanda harus menarik garis tegas antara keuangan dan negara, dan keseimbangan tepat tidak perlu lagi ditambahkan ke budget Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kini memiliki bendahara sendiri. Oleh karenanya pemerintah bisa memberi perhatian penuh pada problem-problem kemakmuran wilayahnya. Dana besar sudah dihabiskan untuk kepentingan pemulihan sarana perekonomian (pelabuhan, jalan kereta api dan sebagainya) dan untuk mendorong perkembangan material dan spiritual penduduk pribumi seperti pendidikan, kesehatan umum, advis kredit pribumi dan sebagainya (J. Stroomberg, 2018: 51-52).

Satu-satunya dasar pemerintahan yang mengatur seluruh perubahan ini merujuk kepada undang-undang pemerintahan Hindia Belanda tahun 1925. Menurut Stroomberg undang-

⁵ *Volksraad* yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte.

undang 1925 bersama-sama undang-undang 1922 memberi langkah sangat penting di jalur penciptaan pemerintah swapraja di Hindia Belanda. Di antara angin segar bagi kaum pribumi yang bisa didapat dari kedua undang-undang tersebut, utamanya undang-undang 1925 adalah perubahan status *volkstraad*, semua hanya menjadi badan penasihat bagi Gubernur Jenderal, khususnya untuk keperluan *budgeting*, kini ia menjadi badan legislatif yang menerima kuasa sebagai perumus undang-undang dan memberi persetujuan atas seluruh peraturan Gubernur Jenderal. Di dalam undang-undang 1925 keanggotaan badan legislatif memberi ruang kepada pribumi untuk duduk di dalam lembaga ini dengan porsi yang cukup adil 25 kursi untuk pribumi dan mengalami peningkatan di tahun 1931, menjadi 30 kursi (J. Stroomberg, 2018: 100-101).

Bahkan melalui amandemen Undang-undang Hindia Belanda tahun 1928, pribumi diberikan kursi untuk duduk di Dewan Gubernur Jenderal, suatu lembaga yang berwenang memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal yang di dalam lembaga Dewan Gubernur Jenderal menduduki jabatan presiden, menyangkut perundangan (J. Stroomberg, 2018: 103). Dalam kasus tertentu, Gubernur Jenderal harus mendapat persetujuan Dewan ini, khususnya untuk perkara membuang dan mengasingkan, dan pengabulan dispensasi dari regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan (J. Stroomberg, 2018: 105).

Di tahun-tahun ini juga Belanda melakukan reorganisasi terhadap administrasi daerah. Banyak batas-batas wilayah lama mengalami perubahan. Beberapa daerah di Hindia Belanda ada yang masih tetap diberikan hak kuasa dengan pendekatan swapraja.

Yang dimaksud kebijakan swapraja ini adalah pemerintah menjamin keberlangsungan pemerintahan lokal yang telah tumbuh secara alami dan melestarikannya dalam bentuk yang baru, menerapkan sistem administrasi Belanda. Contoh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kerajaan di Jawa diubah menjadi provinsi-provinsi baru tanpa dewan provinsi dari tahun 1929-1930 (J. Stroomberg, 2018, hlm. 114). Sementara di Jawa Barat dilakukan fusi besar-besaran. Keresidenan-keresidenan lama meliputi Banten, Batavia, Priangan dan Cirebon digabungkan menjadi satu provinsi di bawah seorang gubernur dengan Batavia sebagai ibu kotanya (J. Stroomberg, 2018: 111).

Berasarkan undang-undang 1922 Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat dan dipecah dua *afdeling*, dua *controle-afdeling*, tiga kabupaten, lima belas distrik dan 1297 desa. Serang dijadikan ibu kota untuk keresidenan Banten (Nina Lubis, dkk., 2014: 230). Ketika undang-undang ini diberlakukan, yang menjadi Residen Banten adalah J.C. Bedding. Kemudian Banten mengalami pergantian residen secara berturut-turut dari J.C. Bedding, lalu digantikan oleh De Vries, F.G. Putman Cranner, J.C. De Kanter, A.M. Fander Flast, J.R. De Buesekom, Mr. W.H. Court yang menjabat antara tahun 1941-1942. Banten termasuk daerah yang tidak diberikan hak menjalankan pemerintahan tradisional. Berbeda dengan Jawa Tengah yang mendapat kebijakan swapraja. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat sudah menjadikan Banten sebagai daerah yang tidak begitu penting. Pemerintah pusat tidak lagi menimbang siapa yang harus menjadi residen di Banten, yang penting bisa memimpin (A. Djajadiningrat, 1996: 338).

Para kepala daerah pribumi memiliki kedudukan yang tidak

beruntung. Biar pun undang-undang mengatur kesetaraan hak politik dengan dihapuskannya sistem perwalian, sehingga para kepala daerah mendapatkan wewenang penuh atas wilayahnya. Pada praktiknya tetap saja kekuasaan masih ada di tangan para *ambtenaar* Eropa sepenuhnya. Mereka hanya dijadikan alat kekuasaan agar mereka tetap dapat menguasai dan memerintah pribumi dengan resiko perlawanan yang sedikit tipis. Apalagi setelah kebijakan politik pemerintah pusat menetapkan kedudukan bupati tidak harus dari keturunan para raja, siapa saja bisa memimpin asal memiliki pendidikan layak dan kecakapan memimpin dengan pengalaman kerja di *bestuur*, yang paling penting dapat bekerjasama yang menguntungkan pemerintah Belanda (A. Djajadiningrat, 1996: 353-354).

Untuk pertama kalinya Dewan Daerah didirikan di Banten pada tahun 1907. Setelah berdirinya Dewan Daerah dan karenanya Banten menjadi sebuah keresidenan yang otonom dengan sifat demokratis. Kini para orang-orang pribumi di dalam pemerintahan dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pejabat-pejabat Eropa. Sayangnya sistem ini menghadapi batu sandungan yang berat, karena secara mentalitas, kaum pribumi masih belum siap untuk berhadapan langsung secara *head to head* dengan orang-orang Eropa. Seperti digambarkan Ahmad Djajadiningrat di atas, Banten dipandang oleh pemerintah pusat sudah menjadi daerah yang tidak bergitu penting. Oleh karena itu, hampir tidak ada usaha perbaikan kepada *ambtenaar* pribumi, seakan-akan kondisi ini sengaja dibiarkan.



Pangeran A. Achamad Djajadiningrat
(sumber: Memoar of Achmad Djajadiningrat)

Situasi ini misalnya dilukiskan oleh Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat di dalam *memoarnya* (1996), orang-orang Banten justru menghadapi masalah taraf wawasan oleh sebab tingkat pendidikan yang tidak sepadan dengan bangsa Eropa. Tak jarang, misalnya ia gambarkan, para *ambtenaar* pribumi tidak serius mengikuti rapat-rapat di Dewan Daerah. Bahkan pada tahun-tahun

itu, di Banten anggota pribumi yang bisa berbahasa Belanda hanya P.A. Ahmad Djajadiningrat (A. Djajadiningrat, 1996: 314-315).

Belanda sekali lagi menghadapi masalah teknis dalam usaha menerapkan undang-undang otonomi. Kebijakan etis kerajaan Belanda atas Hindia Belanda yang dibangun di atas prinsip Indonesia harus diperintah bukan untuk Belanda, tapi untuk Indonesia sendiri, memberikan keharusan kepada pemerintah Hindia Belanda meningkatkan taraf pendidikan pribumi sebaik mungkin. Usulan ini sudah diajukan sejak tahun 1845 oleh Baud. Baru pada tahun 1879 pendidikan untuk para calon kepala *Hoofdenschool* didirikan untuk pertama kalinya. Setelah masa itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan para *ambtenaar* S. De Geraf mengusulkan perbaikan pendidikan agar hasilnya lebih baik. Untuk merealisasikan usulan ini diterbitkanlah *Besluit* 28 Juli 1914 No. 42 yang membentuk komisi penasihat untuk pemerintah dalam usaha meningkatkan pendidikan para *ambtenaar*. Dalam suatu rapat komisi ini, Ahmad Djajadiningrat, ketika menjabat Bupati Serang, pernah mengusulkan agar para *ambtenaar* pribumi seharusnya mendapatkan pendidikan setingkat akademi atau setidaknya setaraf dengan *ambtenaar* Eropa. Usulan ini baru terealisasi 16 tahun kemudian melalui rapat Ikatan Bupati yang secara khusus membicarakan masalah ini (A. Djajadiningrat, 1996: 355). Pada saat yang sama pemerintah Belanda harus meningkatkan kualitas perekonomian pribumi.

Tentunya di samping membangun berbagai sarana pendukung untuk peningkatan sumber daya ekonomi, khususnya, pertanian dan transportasi. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menurunkan berbagai usaha pembangunan di berbagai bidang,

kereta api sampai transportasi udara untuk publik. Pemerintah juga mendorong perbaikan di bidang pertanian dan berbagai usaha di bidang ekonomi-industri.

Menurut laporan F.G. Putman Craemer, 24 Februari 1931 Distrik Cilegon termasuk daerah yang cukup kering. Penduduk memanfaatkan tanah yang kering untuk ragam kegiatan pertanian dan perkebunan, sebagian difungsikan sebagai pekarangan, sawah gogo, kebun kelapa, kebun buah-buahan, dan kebun bawang merah. Kebiasaan ini berlaku tidak saja di Cilegon tapi juga di Keramatwatu dan Balagendong Kabupaten Serang (ANRI, 1980: XVIII).

Sistem sawah yang banyak digunakan penduduk Cilegon adalah sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan di distrik ini digarap secara teratur dan berbeda dengan daerah lain, karena daerah ini masa curah hujan pendek dan musim kemaraunya sangat awal. Mengikuti keadaan cuaca yang tidak stabil, penduduk distrik Cilegon mengembangkan tiga macam penggarapan sawah tadah hujan, yaitu: a) *Cara sawah kletek*, menurut cara ini pembibitan dilakukan dipesemaian kering pada bulan Oktober. Setelah hujan turun dan tanah berubah menjadi Lumpur, bibit yang sudah besar segera dipindahkan ke sawah pada bulan Desember-Januari. b) *Cara sebar sawah*, menurut cara ini sawah dibagi menjadi 2-3 petak. Pada bulan Oktober salah satu petak itu disebari benih seperti pada sawah gogo. Setelah tiba musim hujan dan tanah sudah mulai basah bibit yang sudah tumbuh di petak yang pertama itu sebagian dipindahkan ke petak-petak yang lain. c) *Cara sawah pancar*, sawah mula-mula digarap dan ditanami seperti sawah gogo. Setelah hujan turun dan tanah menjadi Lumpur tanaman padi yang sudah

tumbuh diperihara seperti sawah basah. Kalau perlu tanaman yang sudah tumbuh itu dikurangi atau disebar. Pada permulaan musim kemarau, ketika tanah pesawahan sebenarnya masih basah, petani biasanya tidak menanam padi. Setelah panen padi mereka lebih suka menanam palawija, seperti ubi, jagung, ketimun dan waluh (ANRI, 1980: XLIII).

Di beberapa desa tanah tegalan digunakan untuk menanam padi gogo. Demikian juga di daerah yang baru dibuka di gunung Salak dan gunung Gede. Karena lereng-lereng itu masih terlalu terjal, maka usaha bertani padi gogo belum menjadi mata pencaharian yang tetap. Selain ditanami padi gogo biasanya penduduk juga menanam pisang. Di Pulau Merak dan Bojonegara tanaman pisang menjadi kebun tersendiri. Sayangnya padi gogo di Distrik Cilegon tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan secara signifikan, setiap *bau* rata-rata menghasilkan 25, 4 pikul padi kering, karena itu Distrik Cilegon kekurangan pangan. Untuk memenuhi kekurangan pangan pemerintah mendatangkan bahan pangan dari Ciruas, Ciomas dan Pontang (ANRI, 1980: XLVI).

Penduduk Distrik Cilegon tidak menanam palawija di tanah tegalan, mereka lebih suka menjadikan tanah tegalan untuk kebun kelapa. Perkebunan kelapa banyak tersebar di Distrik Cilegon, Anyer dan Caringin baru berkembang setelah peristiwa meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883. Sementara pemerintah baru memberikan perhatian dan membantu memperluas perkebunan kelapa sesudah pemberontakan Cilegon 1888, ketika perdagangan kopra dan minyak kelapa sedang naik. Sebenarnya iklim di Cilegon terlalu kering untuk ditanami pohon kelapa. Hasil perkebunan kelapa di Cilegon baik

secara kualitas dan kuantitas sangat bergantung pada keadaan iklim. Lereng gunung Gede dan pesisir pantai adalah lahan yang lebih baik untuk menanam kelapa di Cilegon (ANRI, 1980: XLVII). Menurut laporan *De Kanter* sampai tahun 1930-an di Cilegon hanya ada 2 perusahaan perkebunan dengan hak guna usaha penuh. Sementara di wilayah Lebak jumlahnya lebih besar dari pada yang bisa ditemukan di wilayah Banten Utara yang tidak lebih dari 3 perusahaan perkebunan (ANRI, 1980: XCII).

Perkebunan kelapa bagi penduduk Cilegon menjadi ukuran kelas ekonomi, bagi penduduk yang menanam kelapa di pekarangan rumah dengan jumlah tidak lebih dari 30 batang masih belum disebut keluarga berkecukupan kecuali warga yang telah memiliki 300 batang pohon kelapa yang dianggap keluarga berkecukupan. Pohon-pohon kelapa tidak pernah dijual lepas kecuali di jual-gadaikan dengan harga yang variatif, harga pohon kelapa yang ditanam di pekarangan rumah dengan produktifitas yang cukup tinggi relatif lebih mahal dari kelapa tegalan, dengan kisaran harga f 5,- dan f 7,50,- pohon kelapa tegalan antara f 3,50 dan f 5. Untuk keperluan jual gadai Bank Kredit Rakyat Serang menyediakan kredit bagi pemilik kebun kelapa untuk keperluan menebus gadaian pohon kelapa, membeli kerbau untuk membajak tanah kebun, memperdagangkan hasil kebun kelapa dan membeli bibit kelapa dan membuka kebun baru (ANRI, 1980: XLVII).

Meski pemerintah setelah tahun 1888 memberi perhatian dan bantuan untuk perluasan perkebunan kelapa di Distrik Cilegon, setiap petani yang ingin membuka lahan perkebunan baru yang memanfaatkan lahan hutan dikenakan biaya sebesar f 15,- setiap

*bau*⁶ untuk tanah hutan yang akan dibuka. Sedangkan untuk mengolah lahan dari mulai pembersihan sampai membuat pagar mencapai f 60,- ditambah biaya membuat lobang, untuk satu lobang mencapai 5 sen. Belum lagi ditambah biaya perawatan dengan upah membuat lobang per pohon kelapa 5 sen, upah angkut pupuk antara 2 ½ sen sampai 5 sen untuk setiap pohon. Sedangkan pupuk yang dibutuhkan untuk satu pohon seharga 10 sen sampai 15 sen (ANRI, 1980: XLIX).

Perkebunan kelapa yang ada di Pulo Merak atau Kotabumi sejumlah 248 batang tidak terurus. Setelah diurus kembali, hasil kebunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan. Pada tahun 1926 hasilnya 120 buah dipanen 4 kali. Tahun 1927 menghasilkan 761 buah dipanen 6 kali. Tahun 1928 hasilnya 3.485 buah dipetik 10 kali. Di tahun 1929 4.245 buah dipanen 10-15 kali (ANRI, 1980, b: XLIX).

Harga jual buah kelapa bergantung pada tingkat kematangannya. Kelapa *kiring* (Kelapa yang sudah benar-benar matang, warna kulit sabutnya coklat tua) harganya f 32,- per 1.000 buah (f 0,032, per buah), kelapa *gumading* (atau koclak gerancang, warna kulit sabut hijau atau kuning dan kering) f 30,- per 1.000 buah (0,03 per buah), kelapa *enom* (koclak keplok, warna kulit sabutnya hijau atau kuning dan masih basah) dihargai f 25,- per 1.000 buah (0,025 per buah). Jika dibuat kopra masing-masing jenis kelapa itu menghasilkan kopra yang beragam juga. 1.000 kelapa *kiring* menghasilkan ± 3,2 pikul, kelapa *gumading* 1.000

⁶ 1 bau = 1.5 hektare

buahnya menghasilkan ± 3 pikul dan kelapa *enom* 1.000 buahnya menghasilkan $\pm 2 \frac{1}{2}$ pikulan saja (ANRI, 1980: L). Tentu harga jual untuk 1.000 buah kelapa tidak sebanding dengan biaya memuka lahan yang menghabiskan biaya sampai f 60.

Perusahaan kopra dikuasai oleh etnis Cina. Mereka biasanya membeli seluruh hasil kopra di Distrik Cilegon lewat tengkulak, yang digarap oleh tengkulak tidak saja usaha menjual kopra kepada perusahaan, tetapi juga menangani urusan pemetikan buah kelapa, mengupas sabut dan mengangkut ke perusahaan kopra. Kecuali pemilik-pemilik kebun kelapa yang rumahnya tidak jauh dari perusahaan kopra, biasanya mereka ini langsung menjual ke perusahaan tanpa perantara tengkulak. Kalau diupahkan, memetik dan mengangkutnya ke desa untuk 100 buah seharga f 0,50,-. Upah mengangkut ke perusahaan sebesar f 0,25 per 100 buah. Satu gerobak mampu mengangkut kelapa kurang lebih 600 buah. Jika dihitung harga kelapa yang sudah dikupas sabutnya dan sampai ke perusahaan mencapai \pm f 3,85 per 100 buah. Tengkulak menjualnya kepada perusahaan f4,- per 100 buah, jadi keuntungannya f 0,15 per 100 buah. Tiap 1.000 buah kelapa yang dibeli perusahaan, tengkulak biasanya menerima f 1,- sebagai premi. Biaya produksi kopra yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tiap pikulnya tidak kurang dari f 11,19 dengan biaya upah melepas daging kelapa dari batoknya mencapai f 0,06 per 100 buah (ANRI, 1980: L).

Rakyat Banten memiliki problem transportasi yang menunjang laju perekonomian. Pemerintah Belanda sejak masa Daendles sudah membangun jalan darat dari Anyer ke Panarukan, tetapi biaya transportasi masih terlalu berat bagi kelas ekonomi rendah.

Proyek berikutnya untuk memudahkan akses transportasi pemerintah membangun jalur kereta api. Pembangunan rel kereta api oleh *Staatsspoorwegen* di Indonesia pada umumnya memiliki fungsi yang kompleks, di samping untuk kepentingan ekonomi, juga berfungsi sosial-politik. Tujuan sosial dari pembangunan rel kereta api diantaranya untuk membuka akses wilayah-wilayah yang terisolasi di samping itu juga untuk kepentingan *pasifikasi* daerah yang banyak mengalami pergolakan seperti di Banten. Dengan dibangunnya rel kereta api dan penggunaannya semakin luas maka dihapuslah penggunaan kereta pos dengan tenaga kuda (Dinas Budpar Banten, 2011: 213-216; Juliadi, dkk, 2015: 165). Memasuki tahun 1896 pemerintah memperluas pembangunan jalur kereta api lintas Banten sepanjang 175 Km yang menghubungkan Batavia-Duri-Rangkasbitung-Cilegon-Anyer. Pada tanggal 13 Maret 1887 Stasiun Cilegon kelas III C mulai dibuka dengan peta jalan Serang-Anyer Kidul sepanjang 27 Km dengan stasiun transitnya di Cigading (Dinas Budpar Banten, 2011: 214). Pembangunan jalan kereta api terus dikembangkan di Banten dari tahun 1896 sampai 1920 yang berhasil menembus Batavia-Rangkasbitung-Labuan; Batavia-Serang-Cilegon-Anyer; Batavia-Serang-Cilegon-Merak (PA. Djajadiningrat, 1996: 300).

Pembangunan jalur kereta api ini telah mendorong geliat kegiatan ekonomi dan pendidikan di Banten. Penjualan ikan segar dari Anyer ke Batavia telah menjadi pemandangan setiap hari di gerbong-gerbong kereta api. Sebelum ada jalur kereta api, perjalanan Anyer-Batavia bisa menghabiskan waktu kurang dari 24 jam, kini para nelayan cukup membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam saja (Mufti Ali, dkk, 2016: 108).

Masyarakat Banten mengalami perubahan yang cepat. Kereta api telah benar-benar berfungsi sebagai media transmisi kebudayaan baru ke Banten. Masyarakat Banten mulai menyaksikan perubahan sosial dan budaya yang cepat. Melalui jalur kereta api masyarakat Banten mengalami interaksi budaya dengan 'dunia luar' lebih intens. Banyak pegawai kereta api yang berasal dari Jawa Barat dan Priangan, dari mereka orang-orang Banten banyak meniru gaya hidup yang baru. Banyak anak-anak Banten yang menyelesaikan pendidikan tinggi di Batavia bahkan ada yang berhasil studi di Eropa baik lelaki atau perempuan, juga akses kepada lapangan kerja yang semakin luas (Banten Bode, 27 November 1926). Keadaan seperti inilah yang dicita-citakan Residen Banten periode 1913-1915 C.W.A. van Rinsum '*van gunstigen invloed op den geest deer bevolking was voorzeker de spoorwegaanleg an uitbreiding van het onder weys.*' Singkatnya, pengaruh yang paling mendalam terhadap penduduk adalah jalan kereta dan pendidikan (Mufti Ali, dkk, 2016: 105-106).

Di antara pengaruh dari pembangunan jalur rel kereta api yang mampu mencapai bagian pelosok negeri adalah tumbuhnya pergerakan rakyat Indonesia yang begitu cepat. Para aktivis pergerakan dapat dengan mudah keluar masuk daerah Banten dan mempropagandakan gagasan-gagasan yang menyegarkan sekaligus membangkitkan kesadaran nasionalisme, dibantu dengan pemutakhiran teknologi percetakan. Surat-surat kabar, buku-buku, pamflet, menyebar dengan luas ke berbagai wilayah. Bagi para *bestuur ambtenaar*, kehadiran organisasi-organisasi pergerakan yang begitu cepat menyedot keikutsertaan masyarakat yang melampaui lapisan menengah-atas, telah membuat repot kerja mereka, begitu

Ahmad Djajadiningrat mengisahkan (A. Djajadiningrat, 1996: 329). Mereka harus melayani kepentingan yang berlawanan, di satu pihak mereka adalah pekerja pemerintahan di pihak lain, mereka juga bagian dari bangsa yang terjajah. Bahkan tidak jarang para *ambtenaar* mendapat ancaman keamanan dan keselamatan dari para aktivis. Ahmad Djajadiningrat mengalami kondisi ini saat menjabat bupati Serang dan saat menjadi anggota *Volksraad*. Bagi para aktivis revolusi, mereka harus dilenyapkan, baik saat perjuangan revolusi menang atau kalah (A. Djajadiningrat, 1996: 329).

Memasuki tahun 1910-an perkumpulan-perkumpulan yang bersifat sosial, budaya dan politik mulai tumbuh di Banten. Ahmad Djajadiningrat menyebut ada dua perkumpulan yang mula-mula berhasil masuk ke Banten dan memiliki pengikut yang cukup signifikan. Yang pertama adalah *De Indische Partij* sebuah perkumpulan yang didirikan oleh Douwes Deker. Ahmad Djajadiningrat mengaku memiliki hubungan baik dengannya. Bahkan ia salah satu tokoh pribumi yang mula-mula diajak diskusi oleh jurnalis kenamaan berdarah Eropa ini. Memang popularitasnya tidak begitu besar di dibandingkan Serikat Islam di Banten. Organisasinya memiliki masa di Rangkas Bitung. Kemudian menyusul di Serang, di kota kedua ini IP berhasil merekrut ratusan anggota dari kalangan pribumi dan orang-orang indo, orang Cina juga menaruh minat yang cukup kepada organisasi ini, yang menarik dari organisasi ini adalah mereka berhasil menyama-ratakan orang Eropa dan pribumi dengan tanpa kecanggungan (A. Djajadiningrat, 1996: 343-344).

Serikat Islam masuk ke Banten dibawa dan dikenalkan oleh

Raden Gunawan salah seorang pengurus pusat. Ahmad Djajadiningrat memiliki peran dalam memberikan arahan kepada Raden Gunawan bagaimana mengembangkan SI di Banten. Salah satu arahannya adalah mengangkat Hasan Djajadiningrat sebagai ketua SI Serang. Dalam waktu singkat SI berhasil mengantongi ribuan pengikut di Banten. Dari mulai rakyat kecil sampai orang-orang elit dan guru agama, meski tidak semuanya setuju dengan SI. Awalnya memang Gubernur memberikan persetujuan atas SI, bahkan Idenburg dan Dr. D.A. Rinkers seorang penasihat untuk urusan pribumi menjadi penasihat SI yang paling handal. Tetapi perkembangannya yang cepat dan revolusioner, membuat para pejabat Belanda khawatir. Bagi para *ambtenaar* di Banten sendiri, menghadapi dilema, di satu pihak mereka harus melayani kepentingan bangsa, di pihak lain mereka adalah kepanjangan tangan Belanda, di pelosok-pelosok orang-orang SI membuat pusing para *ambtenaar*. Bahkan survey Ahmad Djajadiningrat membuktikan kepala-kepala distrik tidak senang dan tidak setuju adanya SI di Banten (A. Djajadiningrat, 1996: 349-350).

Belanda sendiri melalui para *ambtenaarnya* sudah berusaha melakukan kontrol dan rekayasa sosial untuk mengurai situasi yang memperlihatkan semakin kuatnya kesadaran nasional dan berbangsa di hati rakyat. Mereka mendirikan banyak perkumpulan yang orientasinya lebih bersifat menyalurkan aspirasi dengan jalan yang lebih positif. Perkumpulan seperti “*Piroekoen*” dan “*Sidamukti*” adalah dua contoh perkumpulan yang dibentuk oleh pemerintah. *Piroekoen* adalah perkumpulan para *ambtenaar* pribumi yang misinya mendirikan perpustakaan. Di dalam perkumpulan ini para anggotanya diberi ruang berekspresi seperti

pembacaan puisi (A. Djajadiningrat, 1996: 330). Tumenggung Aria Kartadiningrat mendirikan Sidamoekti (1924), suatu perkumpulan yang tujuannya untuk memberikan bantuan dan sokongan kepada penduduk pribumi untuk mensejahterakan hidup mereka (Farhan al Fuadi, 2017: 49). Perkumpulan-perkumpulan ini hanya menjadi kepanjangan tangan berbagai keinginan pemerintah Belanda, tidak memiliki daya dorong sekuat perkumpulan-perkumpulan kebangsaan yang untuk pertama kalinya ditampilkan oleh SI dan Indische Partij dan sejenisnya.

Ketika SI berubah menjadi kekuatan revolusioner atas arahan Idenburg, pengurus pusat menunda pembentukan kepengurusan pusat dan membiarkan cabang-cabang lokal bergerak otonom di bawah kontrol pengurus pusat. Di Banten putusan ini justru menjadi kesalahan fatal karena ketika meletusnya pemberontakan 1926 banyak orang-orang SI yang terlibat aktif dalam pemberontakan. Ruth McVey perlu didengar pendapatnya mengenai pemberontakan 1926 ini. Keterlibatan PKI sebenarnya lebih dominan di dalamnya dari pada SI. SI sebenarnya tidak memainkan peran secara keorganisasian, karena kebijakan keanggotaan ganda yang diizinkan sebelumnya, para aktivisnya banyak yang masih aktif di PKI. Yang sebenarnya memiliki peran dan boleh saja yang bertanggung jawab sebenarnya VSTP (Asosiasi Buruh Kereta Api) Rangkas, Labuan dan Serang. Setelah pemberontakan berhasil digagalkan, di bawah tekanan pemerintah didapati ada 4000 orang yang memegang kartu merah dan itu artinya PKI (Ruth McVey, 2010: 527).

Setelah dipadamkannya gerakan revolusioner itu di Banten, pemerintah Belanda benar-benar melakukan pemantauan ketat

dalam rangka usaha pemulihan di seluruh wilayah Banten. Sampai akhir 1927 usaha Belanda melakukan pembersihan terus berlanjut. Bupati Pandeglang R.A. A. Kartadiningrat dipecat dari jabatannya sebagai Bupati karena perbedaan sikapnya dengan Residen Banten Putman Cramer terhadap pergerakan 1926. Tidak hanya itu, dengan bahasa yang lebih halus ia diminta meninggalkan Pandeglang dan pergi ke Bogor, yang sebenarnya diasingkan, sebagaimana dialami oleh Syekh Asnawi Caringin (Mufti Ali, 2017: 98-105).

Tragedi 1926 yang paling dahsyat terjadi di Labuan dan Menes. Di beberapa daerah lainnya seperti Serang, polisi berhasil melumpuhkan gerakan sebelum meletus besar. Peristiwa ini memberi pengaruh yang signifikan kepada kehidupan sosial masyarakat Banten sesudahnya. Belanda melakukan pengawasan ketat kepada beberapa lembaga pendidikan Islam yang tokoh-tokohnya banyak terlibat, Matla'ul Anwar adalah contoh yang jelas (Farhan al Fuadi, 2017: 126; Mufti Ali, dkk, 2018: 111). Bahkan Putman Cranner yang menjabat residen Banten antara 1925-1931 memberi laporan di dalam naskah serah terima jabatannya, bahwa setelah peristiwa itu memperlemah pengaruh kiayi di luar lingkaran pemerintah terhadap masyarakat sampai 1931 (Sartono Kartodirdjo [ed], 1980: XXIII). saat menjabat Residen Pribumi pertama di Banten.



KH. Sjam'un Residen Serang dan salah satu pendiri Perguruan Al Khairiyah di Cilegon (sumber: republika.co.id)

Banyak tokoh pergerakan yang aktif di SI dan PKI sekaligus diasingkan ke Boven Digul. Tokoh terpenting di masa itu yang memainkan peran besar dalam mobilisasi massa yang patut disebut adalah K.H. TB. Achmad Chatib. Ia ditangkap polisi militer Belanda pada tanggal 23 Oktober 1926 dan ikut diasingkan Boven Digul (Mufti Ali, 2017: 70). Banyak aktivis eks. Digulis yang kembali ke daerahnya masing-masing telah ikut andil dalam mengisi ragam catatan sejarah menjelang revolusi hingga pasca kemerdekaan. K.H. TB Achmad Chatib, tentunya dengan banyak

tokoh baru seperti K.H. Sjam'un dan para muridnya, adalah salah satu contoh yang telah ikut serta mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan NKRI di tanah Banten

Berjuang Membebaskan Masyarakat dari Beban Pajak 1926

Pemberontakan yang pecah di tahun 1926 ini sebenarnya kelanjutan dari pemberontakan-pemberontakan sebelumnya, khususnya tahun 1888. Setelah memasuki tahun 1900-an, pemberontakan rakyat semakin sering terjadi, baik dalam kategori perang fisik atau hanya sekedar kerusuhan. Di tahun 1906 tercatat meletus pemberontakan Asnaka dari Djahar. Tahun 1914 terjadi kerusuhan di Menes dan Tjigandeng yang dipelopori oleh Manda dan Salendra. Tahun 1926 terjadi pemberontakan Banten yang meletus di Labuan, Menes dan Petir yang diawali dengan kerusuhan di Talaga Naga. (M. Joesoef Efendi, 2014: 15)

Lagi pula, dalam sejarah peperangan/pemberontakan Muslim di Banten terhadap pemerintah kolonial, para pemimpin pemberontakan selalu beraliansi dengan guru/khalifah/mursyid tarekat. Sultan Ageng Tirtayasa, menurut Van Bruinessen, di-*back up* oleh Syekh Yusuf al-Makassari, khalifah tarekat Khalwatiyah; Ki Wasid mendapat dukungan penuh dari massa tarekat Haji Marzuki, orator yang pidato-pidatonya sangat anti penjajah, wakil tarekat Syaikh Abdul Karim dari Tanara; dan KH.TB. Achmad Chatib mendapat dukungan penuh dari para murid/pengikut tarekat Syaikh Asnawi Caringin, kiai yang paling dikenal dan dihormati di Banten pada tahun 1920-an, dan Syaikh Mukri Karabohong Labuan, dua khalifah tarekat yang mendapatkan ijazah untuk menyebarkan ajaran dan amalan tarekat dari Syaikh

Abdul Karim (Van Bruinessen, 2000: 261)

Gerakan revolusi yang terjadi di Banten, baik yang berlangsung di tahun 1888 atau 1926 tidak terlepas dari dorongan semangat keagamaan, banyak ulama yang merasa terganggu oleh pemerintah kolonial terlibat di dalam gerakan revolusi tersebut. Peristiwa 1926 melibatkan 27 orang haji dan 11 orang guru agama dari 99 orang tahanan Boven Digul. (Maftuh, 2011: 278).

Merekayang terlibat dalam pemberontakan adalah para haji dan petani yang berada di bawah koordinasi para kiyai di Pandeglang yang terjaring dalam komunikasi tarekat.



Para pejuang yang tertangkap oleh Belanda tahun 1888
(sumber: historia.id)

Afschrift.

Yandagiang, 21 April 1907.

No. 1/141. GKHEIN.
Bijlagen: 3.
O n d e r w e r p

Internsuring van den Kial
van Tjeringin, Hadji
Schamad Asnawi.

Landsombrief No. 36x van den 5den Januari j.l.

Naar aanleiding van het mij toegesonden schrijven No
G 5/1/18, dd. 5 Januari j.l., sage ik Uwe Excellentie verbiedig
berichten dat de in vertaling bijgevoegde djilats Koranspreuken
bevatten, die ten deele een opspekking tot den heiligen oorlog
inhouden en verder onder meer verheerlijking van Allah en Zijne
macht en grootheld.

Gelijk uit den brief van den Gouverneur te lezen valt werden
deze djilats aangetroffen in de kopiah van Hadji Ahmad Chatieb,
den schoonsoon van den Kial van Tjeringin. Aangezien deze Hadji
genoeg kennis en begrip van den inhoud van den Koran heeft, en
sich daaruit eenige met zijne inzichten strookende versen op te
schrijven, ontgaat mij het verband van deze zaak met den Kial van
Tjeringin. Ik meen deswege de veronderstelling te mogen wagen dat
bij de omschrijving van het in 's Gouverneurs brief behandelde
onderwerp eene vergissing is begaan en dat deze ten rechte zou
hebben moeten luiden: Internsuring van Hadji Ahmad Chatieb, gods-
dienstonderwijzer afkomstig van Tjeringin.

De 1^{de} Adviseur voor Inlandsche Zaken,

(w.g.) H. Gobbée.

aan

Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal
van N e d e r l a n d s c h - I n d i e.
door tueschenkomst van den Directeur van
Justitie.

Afschrift.

Gouverneur
van
West-Java.

Batavia, 3 Januari 1927.

No. 0 5/1 18.

Zeer geheim.

Bijlage : 1.

Onderwerp:

Interneering van den Kliahi
van Tjeringin Hadji Anawi

Ten vervolge op mijn zeer geheim schrijven van 31 December a^o p^o No. 0 5/4B/3 heb ik de eer Uwer Excellentie hierbij eerbiedig aan te bieden een afschrift van de, na de verzending van dien brief, door mij van den Resident van Bantam ontvangen vertaling van een in Arabisch schrift en in die taal gestelde d'imat, welke door den Hoofddjakas bij den Landraad te Serang en den Cipier van 's Lands gevangenis aldaar zijn gevonden in de koplak van den in bedoelde strafinrichting gedetineerden schoonzoon, Achmad (C) Hatib, van den Kliahi van Tjeringin, naar den inhoud van welk schriftuur ter bekorting moge worden verwezen.

De Gouverneur van West-Java,

Voor dezen:

De Secretaris,

(wg.) J.H.B. Kuneman.

ARR

Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal
van N e d e r l a n d s c h - I n d i e.

Afschrift.

Pandeglang, 21 April 1927.

No. 1/141. OKRIN.
Bijlagen: 3.
O n d e r w e e r p

Internering van den Kisi
van Tjaringin, Hadji
Mohammed Asnawi.

Landesendbrief No. 36x van den 5den Januari j.l.

Naar aanleiding van het mij toezonden schrijven No
0 5/1/18, dd. 5 Januari j.l., sage ik Uwe Excellentie eerbiedig
berichten dat de in vertaling bijgevoegde djinata Koranspreuken
bevatten, die ten deele een opskekking tot den heiligen oorlog
inhouden en verder onder meer verhaerlijking van Allah en Zijne
macht en greetheid.

Blijk uit den brief van den Gouverneur te lezen valt verder
dese djinata aangetroffen in de kopiah van Hadji Ahmad Chatieb,
den schoonsoon van den Kisi van Tjaringin. Aangezien dese Hadji
genoeg kennis en begrip van den inhoud van den Koran heeft, en
zich daaruit eenige met zijne insichten strookende verzen op te
schrijven, ontgaat mij het verband van dese zaak met den Kisi van
Tjaringin. Ik meen desevege de veronderstelling te mogen wagen dat
bij de omschrijving van het in 's Gouverneurs brief behandelde
onderwerp eene vergissing is begaan en dat deze ten rechte sou
hebben moeten luiden: Internering van Hadji Ahmad Chatieb, gods-
dienstonderwijzer afkomstig van Tjaringin.

De Hd Adviseur voor Inlandsche Zaken,

(v.g.) E.Gobée.

Asn

Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal
van N e d e r l a n d s c h - I n d i e,
door tusschenkomst van den Directeur van
Justitie.

Arsip tentang Syekh Asnawi di Universiteit Bibliotheek Leiden yang menjadi dasar pertimbangan Gubernur Jenderal memberikan hukuman *internering* kepada Syekh Asnawi

Menurut Martin Van Bruinessen keterlibatan para tokoh tarekat, seperti Syekh Asnawi Caringin dan sebagainya, sebenarnya merupakan protes (untuk tidak menyebut frustrasi), terhadap kondisi sosial yang tengah mengalami perubahan yang sangat besar sekaligus dramatis. Secara perlahan, para pemimpin spiritual yang tersebar di tengah masyarakat dan berada jauh di luar lingkaran penguasa, kehilangan otoritasnya sebagai pemimpin sosial. Tentu saja organisasi sosial yang modern dengan visi baru telah benar-benar berfungsi sebagai mesin “menyalurkan” aspirasi para tokoh lokal tersebut. Pemberontakan rakyat Banten 1926 yang direncanakan menjadi bukti keberhasilan organisasi modern menggerakkan kekuatan massa yang luas. Selain Syekh Asnawi, Martin juga menyebut K.H. TB. Achmad Chatib dan H. Emed sebagai tokoh penting dalam gerakan pemberontakan 1926 ini. Meski Syekh Asnawi kerap kali disebut-sebut terlibat dalam pemberontakan ini, secara praktis sebenarnya beliau tidak memainkan peran langsung, yang langsung berperan adalah K.H. TB. Achmad Chatib dan H. Emed. (Bruinessen, 2000: 383).

Tahun 1926 menyaksikan gejolak politik Banten yang sangat dinamis. Di samping memang pergerakan nasional di Indonesia tengah mengalami titik kematangan dan telah ikut memberi pengaruh kepada pergerakan rakyat Banten, terbukti dengan berdirinya beragam organisasi sosial, baik politik non politik, yang khas Banten atau sarat akan semangat kebantenan. Sebut saja Budi Banten yang pada sisi tertentu mengikuti semangat Budi Utomo, Perkumpulan Tirtayasa yang didirikan di Bandung, Perhimpunan Pengayuh Utama (Mufti Ali, 2012: 2).

Setelah K.H. TB Achmad Chatib ditangkap tanggal 23

Oktober 1926, dua minggu sebelum meletus pemberontakan, kepemimpinan massa diambil alih oleh seorang murid tarekat Syeikh Asnawi, Kiai Mukri dari Karabohong Labuan. Disebutkan bahwa tokoh ini disamping menguasai bela diri dan sangat antusias dalam organisasi masa ia juga dikenal dengan penguasaan terhadap berbagai amalan dan wirid ilmu kebantenan.

Dibuang ke Boven Digul

Seperti yang dikawatirkan Tan Malaka, pemberontakan November 1926 adalah revolusi yang mentah dan akan berakhir dengan kegagalan. Bulan 5 Desember 1926 pemberontakan di Banten mulai bisa dipadamkan. Huru hara yang meletus sejak tanggal 1 November 1926 dan puncaknya pada Sabtu 13 November 1926 di wilayah Pandeglang disebut-sebut kerusuhan yang serius, bahkan surat kabar *De Banten-Bode* menyamakannya dengan peristiwa Geger Cilegon 1888 dan Sovyet di Rusland. Wedana Menes, anak dan keponakannya, agen polisi dan wakil Wedana Menes, Onderdistic-opzichter S.S. Menes, kepala agen polisi Cening, mantra dan 3 orang agen polisi Labuan menjadi korban Komunis dan tewas (*De Banten-Bode*, 9 Desember 1926).

Hulpschrijver Cening juga ikut jadi korban, dianiaya gerombolan, namun tidak sampai mati. Asisten Wedana Cening yang juga menjadi sasaran pemerontakan berhasil melarikan diri. (*De Banten-Bode*, 9 Desember 1926). Menes-Labuan menjadi kota yang hancur, jalan umum penghubung Menes Labuan ditutup. Pasar-pasar di Kaduroke-Menes seketika bubar. Orang-orang melarikan diri menghindari bahaya komunis. Jalanan menjadi sepi, karena rumah-rumah yang berada di pinggir jalan sudah ditinggal

pergi oleh penghuninya. Termasuk orang-orang Tionghoa. Sampai berita dikeluarkan pada tanggal 14 November 1926, tidak dapat dipastikan berapa orang dari kalangan pemberontak ini yang berhasil ditembak mati (*De Banten-Bode*, 14 November 1926).

Tapi meski terbilang terlambat, usaha penumpasan dari tentara pemerintah kolonial Belanda berhasil mematahkan pemberontakan dan menangkap banyak pelaku pemberontakan. Sabtu siang militer Belanda dikerahkan ke Menes dan Labuan untuk memadamkan pemberontakan. Para pemberontak yang diketemukan militer di jalan-jalan langsung ditembak mati. Untuk mengendalikan keamanan di daratan Selat Sunda pemerintah mengerahkan kapal militer yang berpatroli di pantai Labuan-Carita (*De Banten-Bode*, 9 Desember 1926).

Kekuatan militer terus didatangkan ke Menes dan Labuan. Sebagian diangkut dengan mobil dan sebagian diangkut kereta. Namun perjalanan mereka terhambat, karena gerombolan pemberontak sudah memblokade jalan umum Menes-Labuan. (*De Banten-Bode*, 14 November 1926). Pada hari itu juga gerombolan komunis yang dipimpin oleh Mantri Irigasi Menes berhasil ditaklukan. Mungkin saja, H. Dulhadi, dan H. Barahim (Ibrahim, Bangkujung-onder district Cening), termasuk ke dalam pasukan ini.

Berdasarkan sumber berita *Bintang Timur* Koran *De Banten-Bode* memberitakan di Solo sudah ada 1680 orang yang akan dibuang. Sedangkan di Banten sampai bulan Desember, pemeriksaan dan pengejaran masih terus dilakukan. Sebagian tokoh pemberontakan yang tertangkap dari kalangan alim-ulama yang berhasil penulis dapatkan dari dokumen MUI Pandeglang

antara lain: K.H. TB Achmad Chatib, K.H. Madun, K.H. Dulhadi, K.H. Emed, K.H. Madun, K.H. Abdul Halim dijatuhi hukuman buang ke Boven Digul dan Nusakambangan. Sementara ada beberapa tokoh lain yang dihukum gantung, diantaranya adalah Yas'a, K.H. Doel Hadi Manungtung, K.H. Doel Salam Cisaat, Djamin dari Tegal, H. Asikin dari Bangko (MUI Kab. Pandeglang, 1993: 3). K.H. TB Achmad Chatib sendiri dibuang ke Digul bersama K.H. Dulhadi Bangko dan Ki Madun, baru setelah masa Jepang ia dan rekan-rekannya dibebaskan. Sedangkan Syekh Asnawi ikut serta ditangkap dan dibuang ke Cianjur (MUI Kab. Pandeglang, 1993, hlm. 3).

Setelah beberapa bulan ditangkap pasca Pemberontakan 1926 dan diproses secara hukum, K.H. TB. Achmad Chatib beserta 98 aktivis pemberontakan Labuan Menes 1926 lainnya dibuang ke Boven Digul. Dari 99 aktivis pejuang tersebut dikirim ke Boven Digul. Begitu mendapatkan telegram yang berisi perintah untuk mendaftar para aktivis revolusi 1926 yang akan dikirim ke Boven Digoel, Residen Banten, F.C. Putman-Cramer, mulai mendata para kandidat. Lima orang pertama yang masuk dalam list rekomendasi adalah K.H. TB Achmad Chatib, TB. Hilman, Puradisastra, Achmad Bassaif, dan Agus Soleman. Orang Banten merupakan satu kelompok tahanan terbanyak yang menghuni kamp interniran Baven Digul.

Boven Digoel adalah sebuah *onderafdeeling*, setingkat kewedanaan yang terletak di pedalaman Papua (Barat), dengan ibukota Tanah Merah. Jalan satu-satunya untuk mencapai Tanah Merah adalah melalui Sungai Digoel dengan jarak 455 km dari mulut sungai ini yang ditempuh kurang lebih 3 hari dengan

menggunakan kapal uap dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Tempat ini hanya didatangi kapal uap setiap enam minggu sekali atau hanya 8 kali dalam setahun. Wilayah yang pertama kali dieksplorasi melalui ekspedisi militer Belanda tahun 1905 ini, sebagaimana tempat-tempat lainnya di pedalaman Papua, adalah tempat tinggal suku-suku kanibal. Daerah yang menjadi tempat tinggal burung Cendrawasih dan Kasuari ini ditetapkan menjadi sebuah kewedanaan pada tanggal 10 Desember 1926 dan setelah itu ditetapkan sebagai tempat pembuangan para aktivis pemberontakan komunis November 1926. Dahulu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Kesultanan Tidore. (Schoonheydt, 1940: 35-60)

Dalam Memoir-nya Hatta (1980: 351-9) mengisahkan tentang kampung Boven Digul (Tanah Merah) yang terdiri dari dua bagian:

‘Kedua bagian itu dipisah pula oleh sebuah jalan yang lebarnya kira-kira dua meter. Rumahku terletak di jalan itu. Sebelah kanan jalan itu disebut kampung B, sebelah kirinya kampung A. Orang-orang yang tinggal di kampung A menurut Hatta bersikap tidak kooperatif kepada pemerintah, mereka menolak bekerja untuk pemerintah. Mereka disebut kaum ‘naturalis’ karena menerima jatah per bulan dalam bentuk 18 kg beras, 2 kg ikan asin, 300 gram teh, 300 gram kacang hijau, 2/3 botol limun minyak kelapa. Sementara kampung B dihuni oleh golongan yang memilih bekerja sebagai buruh harian (daggelder) dengan menerima upah 10 sen per hari.



Salah satu camp di Tanahmerah, Boven Digoel
(sumber: <https://collectie.wereldculturen.nl/>)

Doa Perang Sabil Syeikh Asnawi Caringin di Peci Tb Kh. Achmad Chatib

Dalam inventori koleksi spesial perpustakaan Universitas Leiden, penulis menemukan 50 halaman arsip rahasia tentang Syeikh Asnawi Caringin dan Tb. KH. Achmad Chatib, diantara ribuan halaman catatan arsip yang ditulis gubernur jenderal dan pejabat pemerintah kolonial lainnya kepada Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang memainkan dua peran: sebagai akademisi dan sekaligus penasehat politik kementerian kolonial, termasuk Gubernur Jenderal dan pejabat tinggi kolonial lainnya.

50 halaman arsip rahasia pemerintah kolonial tentang dua tokoh besar Banten (awal) abad dua puluh itu adalah arsip catatan asisten wedana Munjul, jaksa Pandeglang, hakim pengadilan di Serang, penghulu kepala PA Serang (Rd. Muhammad Isa), bupati Serang, residen Banten, penasehat urusan pribumi, dan gubernur

jenderal antara nopember 1926- april 1927 terkait dengan catatan rahasia terkait peran penting Syeikh Asnawi dalam peristiwa pemberontakan melawan Pemerintahan Kolonial. arsip catatan tersebut juga berisi keputusan gubernur jenderal untuk memberikan hukuman *interneering* (atau penahanan dan pembuangan) Syeikh Asnawi ke Batavia dan Cianjur dan penahanan Kh. Achmad Chatib di Batavia.

Dalam *dossier* arsip Syeikh Asnawi Caringin tersebut terselip tiga lembar salinan jimat (doa) perang sabil yang ditulis Syeikh Asnawi Caringin.. Jimat tersebut ditemukan oleh marsose Belanda di peci menantunya, Tb. Kh. Achmad Chatib, yang merupakan salah satu pucuk pimpinan peristiwa pemberontakan tersebut. tiga lembar salinan jimat tersebut memuat dua bagian: jimat besar dan jimat kecil. Bahasa asli jimat tersebut adalah bahasa Arab dengan tulisan Arab. Penulis mendapatkan salinan terjemahannya dalam bahasa Melayu dan tulisan latin. Penyalin dan penterjemah jimat Syeikh Asnawi tersebut tidak lain adalah seorang penghulu kepala (hoofdpenghulu) Serang, Rd. M. Isa.

Pemberontakan 1926

Sudah umum diketahui bahwa Kh. Tb. Achmad merupakan salah satu pucuk pimpinan dalam peristiwa yang dikenal dengan pemberontakan 1926. Pemberontakan ini dianggap sebuah mobilisasi masa yang massif di hampir seluruh wilayah Banten dengan Labuan dan Menes sebagai *epicentrum*-nya. Kalau saja Pemerintah Kolonial Belanda tidak berhasil mendeteksi eskalasi pemberontakan lebih awal, mungkin pemberontakan KH Achmad Chatib, Puradisastra, Tb. Alipan, Achmad Basaif, yang mulanya

memilih *epicentrum*-nya di Serang ini akan menjadi peristiwa yang akan mengubah jalannya pemerintahan kolonial di Pulau Jawa.

Seminggu sebelum meletusnya pemberontakan ini pada 12 nopember 1926, KH. Achmad Chatib, Puradisastra, Achmad Basaif, dan Tb. Alipan dicituk di Serang dan langsung ditahan di Batavia. Rencana pusat kendali pemberontakan di Serang gagal, maka kemudian pucuk pimpinan diambil alih oleh Buya Moekri Karabohong Labuan dan Kiai Emed, salah seorang putera Syeikh Asnawi Caringi. Pemberontakan meletus pada malam tanggal 11 nopember 1926 diawali dengan doa perang yang dipimpin oleh Buya Moekri di sebuah lapangan di Bama Labuan di hadapan lebih dari 1300 milisi.

Pemberontakan pun meletus. kantor-kantor gubernemen dibakar, dan pejabat Belanda dan pribumi dihabisi. Eskalasi meluas tidak hanya di Labuan tetapi juga di Menes, Petir, Rangkasbitung, Cadasari, Baros dan Karundang. setelah dua hari meletus pemberontakan, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan aksi penumpasan besar-besaran. Ribuan orang ditahan dan dikumpulkan di alun-alun Pandeglang dan Menes. 5 orang dihukum gantung, lebih dari 100 orang dibuang ke tahanan Boven Digoel Papua (Barat), ribuan orang dipenjara di Pandeglang, Serang dan Jakarta. Syeikh Asnawi, sebagai tokoh spiritual pemberontakan, yang dianggap berperan penting dalam konsolidasi dan militansi massa, juga turut ditahan beberapa bulan di Batavia dan kemudian hampir 24 bulan di tahan di Cianjur. KH Achmad Chatib, bersama dengan 100 lebih pejuang Banten lainnya dibuang ke tahanan neraka Boven Digoel, dan mendekam di sel tahanan di tangan hutan selama lebih dari 17 tahun.

Dibebaskan saat awal pendudukan Jepang pada maret 1942.

SALINAN JIMAT BESAR

Bismillahirrahmanirrahim, adalah engkau Muhamad tidak mengetahui ihwal perkumpulan dari pada orang Bani Israil setelah meninggalkan Nabi Musa, waktu mereka itu berkata pada Nabi Syanwil: datangkanlah pada kami seorang raja supaya kami bisa menjalankan perang Sabil. maka bersabda Nabi Syanwil:

Barangkali kamu tidak mau menjalankan perang sabil jika telah diwajibkan kepada kamu, maka berkata mereka itu, mengapakah kami tidka mau menjalankan perang sabil, padahal kami telah diusir oleh musuh dikeluarkan dari negeri kami dan terpisah dengan anak-anak kami. Oleh karena itu Nabi Syanwil berdoa kepada Tuhan agar didatangkan seorang Raja. Maka didatangkan oleh Tuhan seorang Raja bernama Tholut.

Maka apabila telah diwajibkan perang sabil pada mereka itu, mangkirlah semuanya, hanya sedikit saja yang masih menepati janji, maka diketahui oleh Tuhan yang tidak menepati janji itulah yang menganiaya dirinya akan mendapatkan murka Tuhan, kuasalah Tuhan akan melanjutkan hal apa yang dikehendaknya.

Sesungguhnya Tuhan telah mendengar perkataan orang-orang yang menyebutkan bahwa Tuhan itu miskin dan kami orang yang kaya. Maka Tuhan berfirman: Nanti aku tulis dalam buku, perkataan mereka itu dan aku tulis dosanya mereka karena telah membunuh sekalian nabi yang tidak dengan haq, dan aku berkata pada mereka itu rasakanlah olehmu siksaku yang amat pedih. Tuhan maha kuasa, tidak berkendak atas segala bantuan.

Adalah engkau Muhamad tidak melihat pada mereka yang diucapkan. Laksanakanlah perang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat.

Maka apabila telah diwajibkan perang bagi mereka, maka sebagian

dari mereka takut pada manusia, seperti takut pada Tuhan, malah lebih takut. Maka mereka bersembah dan berkata kepada Tuhan: hai Toehan hamba mengapakah engkau wajibkan perang sabil pada kami apakah tidak lebih baik kalau engkau urungkan sampai waktu dekat. Maka Tuhan berfirman: bahwa perkara dunia itu sedikit, tapi perkara akherat lebih baik bagi orang yang takut pada Tuhan, dan tidak nanti kamu teraniaya sebab dikurangkan pahalamu.

Bacalah dengan sebenar-benarnya oleh engkau Muhamad pada mereka itu wartanya 2 anak dari Nabi Adam “Kabil dan Habil”. Keduanya melakukan kurban pada Tuhan. Maka diterimalah kurbannya Habil dan tidak diterima kurbannya Kabil. Maka berkata Kabil kepada Habil dengan amat murkanya; niscayalah aku bunuh engkau, maka berkata Habil bahwa yang menerima kurban itu Tuhan, bukan kemauanku. Tuhan menerima kepada orang yang takut kepada-Nya, Tuhan itu amat suci menunjukkan jalan baik pada orang yang dikehendaki-Nya.

Sabdakan olehmu hai Muhamad, siapakah yang mempunyai langit dan bumi itu? *qul man rabbussamawati wal ard, qulillah...* ialah Tuhan juga.

Adalah kamu melihat barang yang disembah selainnya Tuhan, maka barang itulah yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, adakah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat dan adakah sama gelap dengan terang? Apakah mereka itu bisa menjadikan Tuhan bersekutu dengan lainnya. Apakah mereka itu bisa menjadikan sesuatu hal sebagai yang dijadikan oleh Tuhan sehingga perbuatan Tuhan itu bisa keliru dengan perbuatan lainnya, Tuhan juga yang menjadikan semua hal, Tuhanlah yang haq dan sangat niscaya bisa memberi kekuatan pada orang yang dikehendakinya.

SALINAN JIMAT KECIL

Bismillahi, Tuhan itu yang menjadikan segala mahluk dan amat besar penjagaan dari pada barang yang aku takuti, tidak berkuasa bagi

mahluk akan melawan pada kekuasaan Tuhan, *kaf ha ya ain sod ha mim sin sin kaf*. Segala badan tunduklah pada Tuhan, dan luputkanlah maksudnya orang yang membuat aniaya dan mencukupi bagi kita pertolongan Tuhan dan sebaik-baiknya Toehan itu yang dipasrahi segala hal.

Hari inilah mereka itu tidak berkata serta tidak diizinkan untuk berkata, maka menjarah mereka itu dan jatuhlah perkataan haq pada mereka itu dan rusak hal yang diperbuat oleh mereka itu serta jatuhlah perkataan siksa pada mereka, sebab mereka telah membuat aniaya, padahal mereka itu tidak bisa berkata *ha mim ain sin kaf*. Kaf ha ya sin sod, telah cukuplah bagiku.

Aku telah menyimpul akan engkau yang membawa tulisan ini dari pada segala lidah mahluk dan manusia, perempuan dan laki-laki dengan berkatanya beribu-ribu "*la haula wala quwwata illa billahil azim*" artinja: tiada seorang berdaya upaya dan kuat hanya dengan pertolongan Tuhan yang Maha Agung.

Mudah-mudahan Tuhan memberi rachmat dan selamat pada junjung kita Nabi Muhamad dan keluarganya serta para sahabatnya.

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة البقرة
٢٤٤

1e. Bismillahirrahmanirrahim, adalah engkau Moechamad tida mendapat taee hal perkoempoelan dari pada orang Bani Israil setelah meninggalkan Nabi Moesa, waktoe mereka itoe berkata pada Nabi Sjanwil: adakanlah ba-gei kami seowatoe Radja seepaja kami bisa mendjalankan perang sabil, maka bersabda Nabi Sjanwil:

Barangkali kamoe tida mace mendjalankan perang sabil djika telah di misti-kan baegi kamoe, maka berkata marika itoe, nengapakah kami tida mace nan-djalankan perang sabil, padahal kami telah di oesir oleh moeseoh dikeloe-arkan dari negri kami dan terpisah dengan anak-anak kami orang; dari ker-na itoe Nabi Sjanwil mendoa pada Toehan akan di adakan satoe Radja, maka di adakanlah oleh Toehan Radja jang bernama Thoelot.

Maka apabila telah di wadjabkan perang sabil pada marika itoe moeng-kirlah semoea hanja sedikit sadja jang masih menetepi djandji, maka di ketahoel oleh Toehan jang tida menetepi djandji itoelah jang menganiaja dirinja akan mendapat moerka Toehan, kawasalah Toehan akan melandjietkan barang apa jang di kehendakinja.

Seescenggoehnja Toehan telah mendengar pada perkataan orang-orang jang menjeboetkan bahwa Toehan itoe miskin dan kami orang jang kaya; ma-ka Toehan bersabda: nanti akoe toelis dalam boekoe perkataan marikaitoe dan akoe toelis dosanja marikaitoe memboeneoh pada sekalian Nabi jang ti-da dengan haq, dan akoe berkata pada marikaitoe rasakenlah olaemoe akka koe jang amat panas "memang Toehan itoe koet, tida berkehendak memake perbantoean"

لقد سمع الله الخ
سورة البقرة

2e. Adalah engkau Moechamad tida meliat pada marika jang di oetjapkan tahankenlah tanganmoe daripada perang, dan berdirikanlah olaemoe semba-hjang dan memberli djakat.

Maka apabila telah dimistikan perang baegi marika itoe, adalah se-bagian dari marikaitoe takoet pada manoesia, esperti takoet pada Toehan malah lebih takoet, dan bereambah marikaitoe hal Toehan hamba nengapakah engkau mistikan perang sabil pada kami apakah tida lebih baik kaloe ang-

المؤمنين الذين قبلوا العلم
سورة النساء

kau peendoerkan sampe tempo jang dekat? Maka Toehan bersabda: bahwa barang-barang Doenia itoe sedikit, tapi perkara seberat lebih baik bagi orang jang takot pada Toehan, dan tida nanti kamoe teranjaja sebab di koerangkan pah-lance.

3e. Batjalah dengan sebenar-benarnja oleh angka Moechamad pada marika-itoe wartinja 2 snak dari pada Nabi Adam "Kabil dan Habil" Diwaktoenja 2 orang itoe membikin Korban pada Toehan maka ditrimalah Korbannja Habil dan tida di trima korbannja Kabil, maka berkata Kabil, maka berkata Kabil kepada Habil dengan amat moerkannya; nistjajalah akoe boeneeh angka, maka berkata Habil bahwa jang menerima Korban itoe Toehan, boekan kemaoerankoe, Toehan menerima kepada orang jang takot kepadanja, Toehan itoe amat Soetji menoen-djoekan djalan baik pada orang jang dikehendakinja.

سورة الاسم

4e. Sebdaikan olehmoe hei Moechamad, siapakah jang mempenjai Langit dan boemi itoe? قُلْ مِنْ رِبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْجَنَّةِ

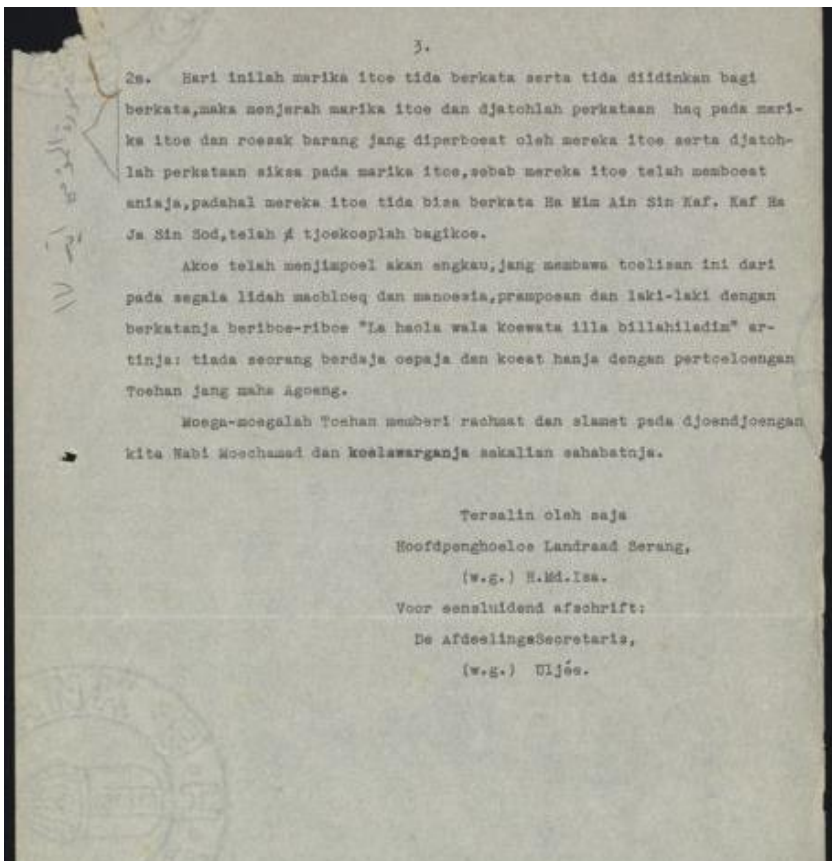
injalah Toehan djoes.

Adalah kamoe meliat barang jang disembah alealnja Toehan, maka barang itoe lah jang tida bisa memberi manfaat dan melarat, adakah baysamaan orang jang boeta dengan orang jang bisa melihat? dan adakah baysamaan gelap dengan te-rang? mangapakah marikaitoe mendjadikan Toehan bersekoetoean dengan laen-nja? apakah merikaitoe bisa mendjadikan sesawatoe barang sebagai jang di djadikan oleh Toehan? selingga perboesan Toehan itoe bisa klirce dengan perboewatan laennja, Toehan djoes jang mendjadikan semoes barang, Toehanlah jang sa den sangat wisesanja bisa memberi kekoewatan pada orang jang di kehendakinja.

سورة الرعد

SALINAN DARI DJIMAT JANG KETJIL.

1e. Bismillahi, Toehan itoe jang mendjadikan segala machloek dan amat be-sar pendjajaan dari pada barang jang akoe takoeti, tida berkewasa bagi mach-loek akan melawan pada kekoewasaan Toehan, Eaf Ha Ja Ain Sod Ha Mim Ain Sin Kaf. Segala badan toendoeklah pada Toehan, dan loepoetlah maksoedja orang jang memboeat aniaja dan menjoekoepti bagi kita pitcolong Toehan dan sebaik-baiknja Toehan itoe jang di pasrahi segala hal.



Arsip salinan Jimat yang diberikan Syeikh Asnawi
Kepda KH. TB. Achmad Chatib, bulan November 1926 yang tersimpan
di Universiteit Bibliotheek Leiden (UBL)

Turut Mengenyahkan Kolonialisme Belanda di Banten

K.H. TB. Achmad Chatib dikenal tokoh ulama Banten yang militan yang heroik, sudah memiliki pendirian yang jelas anti kolonialisme dan seorang yang egaliter. Tidak salah saat terjadi pemberontakan 1926 K.H. TB Achmad Chatib memainkan peran

besar. Ketika pemberontakan 1926 meletus yang bertindak sebagai panglimanya adalah K.H. TB. Achmad Chatib dan Buya Muqri dan K.H. TB. Soleh Kananga, dan KH.TB. Rusydi adalah organisator pemberontakan 1926. Para aktivis pemberontakan 1926, dibekali ilmu hikmah oleh Buya Muqri (Mufti Ali, 2011: 103). Di dalam percaturan politik, seorang K.H. TB. Achmad Chatib dan ulama lainnya berkeinginan dan berusaha untuk melawan pemerintah kolonial Belanda yang telah menyebabkan terjadinya ketidaksejahteraan rakyat Banten dengan membebankan pajak yang tinggi.

Peneliti yang disebut-sebut karyanya paling komprehensif dalam menjelaskan pemberontakan Muslim Banten 1926, Charles Williams, tidak sedikitpun merujuk karya tokoh tarekat yang berperan aktif mengkonsolidasi massa saat itu. Apa yang dilakukannya dapat dimaklumi, karena memang C. Williams menolak dengan tegas peran tarekat dalam pemberontakan tersebut (Williams, 1990:86). Ia menegaskan:

“... it is of interest to note, though, that there is no evidence of tarekat (mystical brotherhoods) being involved in the organization of the insurrection in the way that they were with the Cilegon revolt of 1888...” (menarik untuk dicatat bahwa tidak terdapat bukti bahwa tarekat terlibat dalam organisasi pemberontakan [pada tahun 1926] menyerupai peran dalam pemberontakan tahun 1888).

Berbeda dengan pemberontakan 1888 yang dipimpin Ki Wasid, pemberontakan kaum Muslim Banten pada tahun 1926, menurut C. Williams murni pemberontakan petani yang dimotori oleh beberapa anggota PKI dan sejumlah ulama yang ingin terlepas dari penjajahan dan memiliki sikap anti kolonial. Menurutnya,

pemberontakan Muslim Banten 1926 merupakan pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasan kaum petani terhadap kebijakan kolonial dalam masalah perpajakan, pengaturan harga dan inflasi ekonomi yang tinggi. Pemberontakan tersebut merupakan aliansi kekuatan masa komunis dan pengikut Sarekat Islam (Williams, 1990: 86).

Pendekatan marxian yang digunakan Williams yang menegaskan faktor-faktor ekonomi, seperti inflasi ekonomi, ketidakpuasan kaum petani dengan kebijakan fiskal pemerintahan kolonial dan dengan sikap kaum priyayi yang menindas telah mendorongnya untuk menegaskan satu kesimpulan bahwa pemberontakan Muslim Banten adalah pemberontakan petani yang dipicu oleh faktor-faktor eksternal struktural. Pada saat yang sama ia mengenyampingkan faktor-faktor teologis, non-ekonomis material, seperti keinginan mengganti sistem pemerintahan kafir dengan pemerintahan Muslim, keinginan terlepas dari penjajahan, sikap bermusuhan turun temurun sejumlah pemimpin militan Muslim Banten terhadap pemerintah kolonial, dan sikap-sikap resistensial lain karena faktor teologis keagamaan.

Peran para militan seperti Puradisastra, Tubagus Alipan, Achmad Bassaif dan aktivis Sarekat Islam, K.H. TB Achmad Chatib dalam pemberontakan 1926 untuk menggulingkan pemerintahan kolonial di Banten dipandang oleh Williams sebagai aliansi strategis dan rasional. Komunisme Banten, menurutnya bagian dari komunisme Nasional dan internasional yang ingin mengubah sistem kapitalisme yang menindas dengan sistem sosialisme yang berpihak kepada kaum buruh dan petani. Perasaan tidak puas K.H. TB Achmad Chatib yang progresif

terhadap sistem pemerintahan kolonial dan keinginan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan telah mendorongnya untuk beraliansi dengan gerakan komunisme yang dimotori oleh Semaun, dalam pengertian memanfaatkan kekuatan material untuk mendukung perjuangan melawan Belanda.



Tubagus Alipan, tokoh yang terlibat pada pemberontakan 1926
(sumber: historia.id)

Lebih lagi bila melihat variasi profesi dan keragaman asal daerah para pemberontak tersebut seperti terlihat dalam lampiran (*appendix*) buku Williams, penulis berkeyakinan akan signifikansi peran tarekat lebih menonjol dibanding peran-peran lain, ekonomi, dll. Militansi, keyakinan diri, kekebalan dan loyalitas terhadap pimpinan (mursyid/guru/khalifah) terjalin begitu kuat dalam ajaran tarekat.(Williams, 1990: 317-324.)

Berjuang Memupuk Rasa Nasionalisme Indonesia

Karena ketokohan K.H. TB Achmad Chatib yang kharimatik di dalam pemberontakan 1926 di Banten, Alimin dan Khaerul Saleh, juga Puradisastra, yang aktif menggerakkan massa pemberontakan di Sumatera Barat tahun 1926, juga mempercayakan kemungkinan-kemungkinan koalisi dengan K.H. TB. Achmad Chatib untuk usaha membangkitkan revolusi bawah tanah. Simpati Ahmad Khatib terekam dalam memori para ulama yang ikut majlis pertemuan antara K.H. TB Achmad Chatib dan Khaerul Saleh, cs., saat itu: “Dulur-dulur kalau andai kata Stalin beriman, ia paling pertama yang masuk Surga” (Van Bruinessen, 2000:102) Jelas ini adalah ungkapan hermenetis, pemikiran-pemikiran revolusi ala Stalin dinilai oleh K.H. TB Achmad Chatib senafas dengan pesan-pesan Islam. Dan oleh karenanya organisasi politik tersebut dapat menjadi kendaraan melawan penjajah. Terutama sekali yang banyak dipropagandakan oleh para sufi atau ahli suluk yang pro orang kecil (Seperti, bagi para ahli suluk, kemiskinan adalah mutiara mulia).

Dua cabang SI seksi Banten didirikan di Serang dan di Labuan. Organisasi ini pada awalnya tumbuh dengan lambat. Anggota pertama cenderung dari kalangan guru dan karyawan perusahaan pemerintah yang muncul sejak tahun 1900. Terpilihnya Hasan sebagai ketua SI Banten mempengaruhi terhadap pertumbuhan awal organisasi. Hasan yang berpendidikan barat bersimpati kepada para petani yang dianggap bodoh dan percaya terhadap mantra ulama dan jawara. Oleh karena itu, setiap dilakukan kongres maka topik yang dibicarakan adalah

pendidikan. Pada April 1914, Hasan terpilih sebagai panitia administrasi (*bestuur*) dari CSI dan berada di bawah kendali Tjokroaminoto dan Gunawan (Mardiyah, 2017: 38).

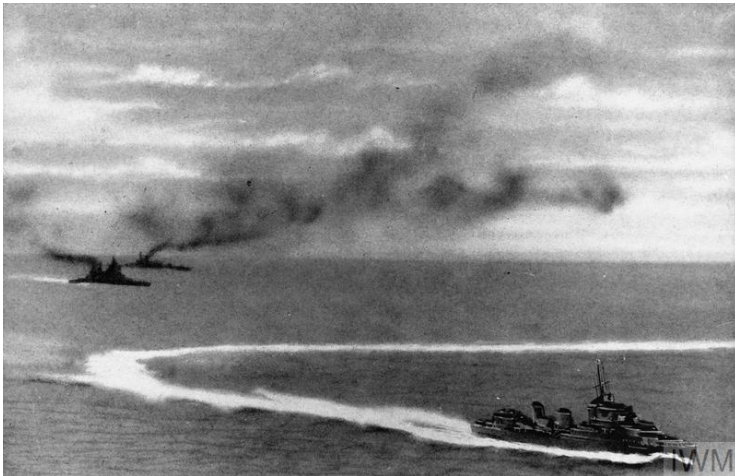
BAGIAN KEEMPAT

Masa Pendudukan Jepang

Kepuasan Jepang akan kemenangan atas Rusia serta dalam Perang Dunia 1 membuat Jepang semakin agresif dan berkeinginan untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia dari bangsa Barat. Adapun ideologi dari nafsu ekspansi ini sendiri sebenarnya berasal dari ajaran kuno Jepang yang disebut *Hakko I Chi-u* (delapan benang di bawah satu atap). Pemerintah Jepang mendaratkan tentaranya ke Indonesia untuk pencapaian wilayah yang terdiri atas laut dan daratan, diperlukan sistem pendaratan yang dilakukan oleh angkatan darat dan laut yang ditunjang oleh potensi udara dan diperhitungkan secara akurat. Setelah membom Pearl Harbor, tindakan Jepang target utamanya terlebih dahulu melumpuhkan pertahanan laut Inggris, *Prince of Wales* dan *Repulse*, 10 Desember 1941 yang berhasil ditenggelamkan oleh serangan 50 pesawat pembom torpedo Jepang (Nugroho Notosusanto, (ed.), 1975: 1). Betapa cepatnya gerakan tentara Jepang, yang kemudian Jepang bergerak ke Selatan dan menyerang Indonesia, pada tanggal 10 Januari 1942, tentaranya telah sampai di Tarakan, Kalimantan Timur (*Soeara Madjilis Islam A'laa Indonesia* 1943: 18).

Penyerahan tanpa syarat Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 dari Jenderal Terpoorten kepada Hitoshi Imamura di Kalijati Jawa Barat menyebabkan berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia, dengan demikian Indonesia memasuki sejarah babak baru. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dianggap sebagai masa yang memperhatikan, yang ditandai dengan adanya

Romusha dan kelaparan, kekurangan pakaian serta pemaksaan dalam berbagai kegiatan perang (Kuntowijoyo, 1995: 26-27).



Prince of Wales dan Repulse yang ditenggelamkan
(-sumber: worldwar2database.com)

Kemenangan Jepang membuat Indonesia memasuki babak sejarah baru di bawah pendudukan Jepang. Tujuan yang dinyatakan oleh Jepang dalam menduduki Jawa ialah “membebaskan” penduduk pribumi dari penjajahan Belanda dan menjelang penyerbuan ke Jawa mereka telah menjalankan propaganda secara intensif melalui radio gelombang pendek, yang menggugah rasa kebangsaan orang Indonesia (Kurasawa, 2015: xlviii). Respons positif yang diberikan rakyat dengan kedatangan tentara militer Jepang di Indonesia bisa terlihat pada saat penerimaan balatentara Jepang di beberapa wilayah di Indonesia.

Kebijakan Jepang di Indonesia memiliki dua prioritas: menghapus pengaruh Barat dan memobilisasi orang-orang

Indonesia untuk kepentingan kemenangan Jepang. Jepang, seperti halnya Belanda, berniat menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menghadapi permasalahan yang sama dengan Belanda dan menerapkan solusi yang sama pula dengan Belanda (bahkan, hukum kolonial Belanda tetap diterapkan kecuali ketika itu bersinggungan dengan hukum militer Jepang). Namun, Jepang di tengah-tengah perang besar yang membutuhkan penggunaan sumber daya, memutuskan menguasai masyarakat melalui mobilisasi (terutama di Jawa dan Sumatera) dibandingkan memaksakan perintah yang halus. Ketika perang berlangsung, usaha-usaha mereka memobilisasi orang-orang Indonesia justru membuat landasan bagi terciptanya revolusi.

Jepang yang kedatangannya mempunyai tujuan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berpotensi dari Indonesia. Untuk itu, Jepang melakukan pendekatan kepada rakyat Indonesia untuk mendapatkan simpatik dalam mencapai tujuannya itu. Untuk keberhasilan pendekatan yang Jepang lakukan, tentara Jepang melakukan propaganda (G Pakpahan. 1979: 51). Untuk menghancurkan pengaruh Barat, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan mendorong penggunaan bahasa Jepang. Pelarangan bahasa Belanda dan bahasa Inggris membuat jenjang pendidikan tinggi hampir mustahil dilakukan selama perang. Kalender Jepang diperkenalkan untuk tujuan resmi, patung-patung Eropa dirubuhkan, jalan-jalan dinamai ulang, dan Batavia disebut Jakarta kembali (nama yang tidak pernah sepenuhnya mati dalam penggunaan bahasa Indonesia). Propaganda yang intensif mulai

meyakinkan orang-orang Indonesia bahwa mereka dan orang-orang Jepang adalah saudara dalam perjuangan tatanan baru di Asia. Jepang membuat orang-orang Indonesia mengimplementasikan tujuan propaganda mereka, terutama guru-guru sekolah, seniman, dan tokoh-tokoh sastra yang anti Belanda. Muhammad Yamin, Sanusi Pane dan Armijn Pane adalah di antara mereka yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Film-film, drama, wayang, dan terutama radio digunakan untuk menyebarkan pesan Jepang. Karena kekurangan perlengkapan radio, kebanyakan propaganda radio disiarkan melalui pengeras suara yang didirikan di tempat-tempat umum. Propaganda tersebut sering bertentangan dengan kenyataan: terjadinya kekacauan ekonomi, teror *Kenpeitai* (Polisi Militer), tenaga kerja paksa, arogansi dan kekejaman Jepang secara umum, pemukulan dan perkosaan, dan kewajiban untuk menghormati semua orang Jepang. Mereka yang menyambut Jepang sebagai pembebas sering dikecewakan. Kampanye anti Barat tersebut memperkuat sentimen anti Belanda di seluruh Indonesia dan berkontribusi terhadap penyebaran gagasan tentang Indonesia di masyarakat. Karena bahasa Jepang tidak dikenal masyarakat, bahasa Indonesia menjadi bahasa utama untuk propaganda dan statusnya kemudian meningkat sebagai bahasa nasional (Ricklefs, 2001: 250).

Pada awal pemerintahan Jepang di Hindia Belanda, mulanya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Perasaan gembira dari rakyat ini muncul karena Jepang dianggap sebagai bangsa yang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda. Kepercayaan kepada Jepang sebagai bangsa pembebas juga semakin meningkat karena Jepang pandai mengumbar janji

dan memberi harapan kepada rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan. Jepang sangat memahami situasi dan kondisi rakyat Indonesia bahwa semangat kebangsaan dan kemerdekaan sedang bergelora.

Hingga Agustus 1942 Jawa tetap berada di bawah pemerintahan sementara, tetapi kemudian pemerintahan yang dikepalai *Gunseikan* (Gubernur Militer - Penguasa Tertinggi Pemerintah Militer Jepang) didirikan. Banyak orang Indonesia yang dipromosikan untuk mengisi posisi pegawai-pegawai Belanda, tetapi sejumlah besar pegawai-pegawai Jepang juga dilibatkan. Banyak dari pegawai-pegawai Indonesia tersebut adalah mantan guru sekolah.

Seiring dengan pemerintahan baru yang menjalankan negara, di Jawa Jepang mencari dukungan kepada pemimpin-pemimpin terkemuka untuk memobilisasi massa. Pada bulan Maret 1942 seluruh aktivitas politik dilarang dan kemudian seluruh perkumpulan-perkumpulan yang ada dibubarkan dan Jepang mulai mendirikan organisasi-organisasi baru. Islam nampaknya sejak semula menawarkan kesempatan utama untuk mobilisasi. Pada akhir Maret 1942 Jepang telah membuat *Shumubu* atau Kantor Urusan Agama. Pada bulan Agustus 1944, Hasyim Asy'ari diangkat sebagai ketua umum *Shumubudan* NU pun mulai masuk ke dalam urusan pemerintah untuk pertama kalinya. Tahun itu juga, Wahid Hasyim berhasil membujuk Jepang untuk memberikan latihan khusus militer bagi para santri dan mengizinkan mereka membentuk barisan pertahanan rakyat sendiri: Hizbullah dan Sabilillah (Feillard, 1999: 29 & Ricklefs 2001: 251).



Poster propaganda Jepang untuk menarik simpati
(Sumber: nationaalarchief.nl)

Kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia berkaitan dengan kemenangan peperangan di Pasifik. Pada dasarnya kebijakan yang diterapkan mempunyai dua prioritas. Pertama, menghapuskan pengaruh Barat. Kedua, memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemajuan perang Jepang. Berbagai mobilisasi dijalankan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Untuk membantu pelaksanaannya diangkat pimpinan-pimpinan rakyat baik pemimpin-pemimpin agama, guru dan pemimpin-pemimpin

nasionalis. Pemerintah Jepang merangkul pemimpin Islam, karena Jepang menyadari bahwa sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam dan pemimpin Islam mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat.

Selain merangkul pemimpin-pemimpin Islam pemerintah Jepang juga menawarkan kerja sama kepada tokoh-tokoh nasionalis. Tujuannya agar golongan nasionalis mau memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu usaha perang Jepang. Untuk mendapatkan dukungan dan simpati rakyat Indonesia maka tokoh-tokoh nasionalis diangkat menjadi pemimpin pergerakan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang seperti gerakan tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) dan gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat). Pemerintah pendudukan Jepang memerlukan banyak tenaga untuk pertahanan menghadapi Sekutu. Untuk itu dibukalah kesempatan bagi para pemuda untuk menjadi prajurit. Gerakan-gerakan pemuda diberi prioritas tinggi dan ditempatkan di bawah pengawasan ketat pihak Jepang. Hal ini dipahami Jepang bahwa untuk mempertahankan kedudukannya harus mendapatkan dukungan dari penduduk setempat (Yasmis,2007: 24).

Pada bulan April 1942 usaha pertama dalam gerakan massa, yaitu Gerakan Tiga A, dimulai di Jawa. Nama ini diambil dari slogan Jepang sebagai pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Di dalam pergerakan tersebut, sebuah faksi Islam yang bernama Persiapan Persatuan Ummat Islam didirikan pada bulan Juli 1942 di bawah pimpinan Abikoesno Tjokrosoejoso (lahir 1897), saudara Tjokroaminoto dan penggantinya sebagai ketua PSII. Pergerakan ini adalah salah satu bentuk yang paling nyata

dari usaha mobilisasi yang disponsori Jepang (Benda 1956, 554). Abikoesno secara singkat pernah dianggap sebagai pemimpin Islam Indonesia sejati. Namun, hal tersebut terjadi tidak lama sebelum Jepang (seperti juga Belanda) mulai merasa bingung terhadap pemimpin-pemimpin modernis yang aktif secara politik. Secara umum, Gerakan Tiga A tidak mencapai tujuannya. Elit politik Indonesia hanya memberi dukungan setengah hati, di mana tidak ada golongan nasionalis Indonesia yang terlibat didalamnya, dan propaganda tersebut begitu berat untuk ditangani sehingga di awal pendudukan Jepang hanya sedikit orang Indonesia yang menganggapnya sebagai hal yang serius (Ricklefs, 2001: 251).

Secara umum, reorganisasi birokrasi di tingkat lokal dan nasional tersebut menghasilkan dua kondisi: *pertama*, politisasi penduduk desa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur kekuasaan tradisional yang digantikan oleh organisasi-organisasi baru yang kepemimpinannya dipercayakan kepada para pemuda yang kuat secara fisik dan mau bekerjasama (Aiko, 1986: 57-78). *Kedua*, masyarakat kota kini memiliki organisasi massa yang mampu memfasilitasi pembentukan identitas nasional yang melampaui garis batas daerah dan ideologis yang telah memberi karakter terhadap pergerakan anti-kolonialisme sejak tahun 1910an (Formichi, hlm. 2002, 71). Yang jelas, berbeda dengan Belanda yang terutama menaruh perhatian terhadap pemeliharaan perdamaian dan menjaga *status quo*, Jepang justru sejak awal sangat berhasrat untuk mengajak pemimpin-pemimpin umat Islam untuk menjadi sekutu mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika salah satu target utama mobilisasi mereka adalah para ulama (Benda 1955 (b): 354).

Kita perlu mengingat bagaimana kampanye militer Jepang terhenti secara cepat. Pada bulan Mei 1942, ekspansi ke Australia terhambat dalam pertempuran Laut Koral. Hal yang sama terhadap Hawaii juga terhenti di bulan Juni. Pada bulan Agustus 1942 Amerika Serikat mendarat di Guadalcanal (Kepulauan Solomon) dan pada Februari 1943 Jepang telah mengalami kekalahan yang luar biasa. Dari tahun 1943 Amerika Serikat melakukan serangan yang intensif di Pasifik. Kebijakan Jepang di Indonesia oleh karenanya berkembang dalam konteks militer yang secara bertahap berubah menjadi buruk. Pada akhirnya Jepang secara penuh menerima kenyataan bahwa kekalahan ada di depan mata. Namun, di tahap awal pendudukan mereka di Indonesia, mereka harus mempertimbangkan kemungkinan invasi Sekutu yang terlihat nyata. Akhirnya, kekuatan Sekutu memang berhasil menduduki kembali Indonesia (Ricklefs, 2001: 250).

Kemudian pada akhir Perang Dunia II, Jepang sudah merasa bahwa situasi dan kondisinya mulai memburuk, di saat yang demikian itu memerlukan tambahan angkatan perangnya. Untuk itu usaha mengorganisasi pemuda Indonesia akhirnya dilaksanakan. Secara umum dapat dibedakan tiga jenis gerakan pemuda:

1. Organisasi pemuda yang bersifat militer atau yang semi militer,
2. Organisasi pemuda di bawah tanah, dan
3. Organisasi pemuda yang dibentuk Jepang yang kemudian secara diam-diam dibelokan oleh pemimpin pemuda menjadi gerakan bawah tanah untuk kepentingan perjuangan Indonesia.

Pada awal tahun 1943 Jepang memulai usaha serius mereka untuk memobilisasi massa. Pergerakan pemuda diberikan prioritas utama dan mereka berada di bawah pengawasan yang ketat. Pada bulan Agustus 1942 sekolah-sekolah yang melatih pegawai-pegawai dan guru-guru baru telah dibuka di Jakarta dan Singapura. *Seinendan*, korps pemuda semi-militer untuk pemuda berumur antara 14 dan 25 (kemudian diubah menjadi 22) didirikan pada bulan April 1943. *Seinendan* memiliki cabang hingga ke desa-desa, walaupun cabang-cabang yang aktif tetap berada di perkotaan. Untuk orang-orang berusia 25 hingga 35 tahun, *Keibodan* (korps penjaga) didirikan untuk membantu polisi. Pada pertengahan tahun 1943 *Heiho* (kekuatan tambahan - pembantu prajurit) diciptakan sebagai bagian Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang.

Di akhir perang ada sekitar 25.000 pemuda yang tergabung dengan *Heiho* di mana mereka mendapatkan pelatihan dasar militer yang sama dengan prajurit-prajurit Jepang. Organisasi-organisasi lain juga didirikan. Di semua organisasi tersebut terdapat indoktrinasi dan disiplin yang ketat. Lebih dari 2 juta pemuda dikatakan tergabung dengan organisasi-organisasi semacam itu di akhir perang, di mana sekitar 60 % tergabung dengan *Keibodan* (Ricklefs, 2001: 253).



Ilustrasi para pemuda yang dilatih tentara Jepang
(Sumber: nationaalarchief.nl)

Mendirikan Perusahaan Pengangkutan Rakyat

Setelah pasukan Jepang mengalami kekalahan terus-menerus dalam medan perang di Pasifik, pemenuhan kebutuhan logistik tentara di garis belakang pun banyak mendapat kesulitan. Untuk mengatasi hal tersebut, Jepang berusaha merekrut penduduk dari daerah-daerah kuasanya untuk dikerahkan dalam segala kegiatan ekonomi dan perang. Melalui unit-unit desa terkecil masyarakat Banten diwajibkan mengumpulkan dan menyerahkan hasil bumi berupa padi, karet dan sebagainya; dan juga barang-barang berharga lainnya seperti emas, perak, intan, sampai dengan besi tua. Petani dipaksa untuk menyerahkan hampir seluruh hasil panennya, di samping dibebani kewajiban untuk menanam pohon jarak yang dipakai sebagai bahan baku membuat minyak pelumas

mesin. Padi untuk persediaan makan habis dan beras sudah lama menghilang dari pasaran.

Akibat tindakan tentara Jepang semacam itu, penghidupan masyarakat Banten menjadi semakin sengsara. Untuk memperoleh makanan pokok seperti beras dan jagung saja mereka harus mempunyai “kartu tanda beli” dari lurah. Penduduk harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu liter beras. Para pegawai pemerintah (dari bangsa Indonesia) saja hanya dapat jatah dua kilogram untuk kebutuhan keluarganya selama satu minggu. Sehingga untuk mengatasi kelaparan ini orang terpaksa makan umbi-umbian seperti umbi jalar, ketela pohon dan talas, bahkan tidak jarang ada yang makan pokok batang pisang (gedebog) atau umbut batang nipah. Kondisi seperti ini membuat K.H. TB Achmad Chatib prihatin dan tergerak hatinya untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi kesulitan pengangkutan hasil bumi untuk dijual ke luar daerah. Ia mendirikan badan usaha yang diberi nama Perusahaan Pengangkutan Rakyat. (Suharto, 2001: 88).

Komandan Tentara Peta

Sesuai dengan tuntutan perang yang makin mendesak, pemerintah militer Jepang tidak saja membatasi diri pada pembentukan barisan pra militer, tetapi kemudian meluas dengan membentuk organisasi militer diantaranya, yang paling penting adalah Pembela Tanah Air atau “Peta”, didirikan dalam bulan Oktober 1943. Terjadinya pembentukan tentara Peta ini adalah bentuk dari mulai melemahnya kekuatan Jepang akibat banyak mengalami kekalahan dengan sekutu dalam perang di wilayah

Pasifik. Jepang sudah mulai sangat membutuhkan bala bantuan tentara mengingat jika hanya menggunakan orang Jepang sendiri maka akan tidak akan cukup (Ben Anderson. 1988: 40). Pembentukan Peta, usulan itu datang dari R. Gatot Mangkupraja melalui suratnya yang ditujukan kepada *Gunseikan* (kepala pemerintahan militer) pada tanggal 7 September 1943 yang antara lain meminta supaya bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang tidak saja di belakang garis perang tetapi juga di medan perang. Pembentukan Peta merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam perkembangan politik Indonesia. Dikatakan sangat penting, karena didalamnya umat Islam memegang peranan sejak dari pembentukannya. Walaupun usulan pembentukan Peta tersebut oleh R. Gatot Mangkupraja kawan Soekarno. Tetapi direalisasikannya pada akhir Oktober 1943, Jepang mengangkat para kyai sebagai *daidanco* dan *cludanco* (komandan batalyon dan komandan kompi). (Nugroho Notosusanto, (ed.), 1975: 14).

Pembela Tanah Air (Peta) merupakan angkatan perang sukarela yang di akhir perang memiliki sekitar 37.000 anggota di Jawa, 1.600 di Bali dan 20.000 di Sumatera (di mana mereka biasanya dikenal dengan nama *Giyugun* atau prajurit sukarela). Tidak seperti *Heiho*, Peta bukanlah bagian militer Jepang secara formal, tetapi justru dimaksudkan sebagai kekuatan gerilya tambahan untuk melawan invasi Sekutu. Korps Peta terdiri dari pegawai-pegawai, guru, kiyai dan prajurit-prajurit Indonesia bekas anggota pasukan kolonial Belanda. Di antara mereka ada Soedirman yang pada akhirnya akan menjadi tokoh utama militer Indonesia dalam revolusi kemerdekaan. Disiplin Peta sangatlah

kuat dan ide-ide nasionalisme Indonesia digunakan dalam indoktrinasi (Ricklefs, 2001: 255).

Keanggotaan Peta yang diambil oleh Jepang yakni berasal dari berbagai golongan dalam masyarakat. Untuk perwira-perwira yang menjadi komandan batalyon dipilih dari pemimpin masyarakat atau orang terkemuka di daerahnya seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama atau kaum politikus. Pembentukan Peta dimulai dengan memilih calon-calon perwira yakni calon *daidanco* (Komandan Batalyon) *cludanco* (Komandan Kompi) dan *shudanco* (Komandan Peleton). Pengerahan calon perwira dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam penjelasan komando tentara mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota tentara Peta. Para calon perwira tidak perlu memenuhi syarat-syarat pendidikan, tetapi harus memperhatikan bakat kepemimpinan dan harus pula memiliki jiwa yang sehat, stabilitas mental, maupun fisik yang kuat. Bagi Letnan satu dan Letnan dua (agakny yang dimaksudkan disini adalah komandan kompanyi dan komandan peleton Peta) usia maksimum adalah 30 tahun. Pemilihan- pemilihan perwira akan dilaksanakan pada awal bulan Oktober, sedangkan latihan akan dimulai pada pertengahan bulan Oktober. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan juga boleh melamar asal saja memperoleh ijin dari atasannya. Pemeriksaan para pelamar akan dilaksanakan di ibu kota setiap *shu*, antara lain;

- 1) Untuk calon *Shudanco* umumnya diambil dari siswa sekolah,
- 2) Untuk calon *Cudanco* umumnya diambil dari kyai, pegawai negeri, guru sekolah,

- 3) Untuk calon *Daidanco* umumnya diambil dari tokoh rakyat seperti, pimpinan partai, pimpinan agama, kyai, pamong praja (wedana, asisten wedana, dan jaksa). (Nugroho Notosusanto, 1970, hlm. 76).

Dikalangan masyarakat kedudukan dalam Peta dianggap kedudukan yang tinggi. Dalam kenyataannya, status mereka seringkali lebih tinggi dari seorang kepala daerah. Apabila seseorang menjadi anggota Peta, maka statusnya menjadi naik (Sudjito Sosrodihardjo, 1972: 106). Pendidikan di Bogor berlangsung, untuk *Daidanco* hanya dilatih selama dua bulan, berakhir di bulan November 1943. Sedang *Cudanco* dan *Shudanco* dilatih hingga bulan Desember 1943. Pendeknya waktu latihan dan sedikitnya materi latihan ini merupakan konsekuensi logis dari dasar pembentukan Tentara Peta (Notosusanto, 1970: 77).

Di Banten, pada masa pendudukan Jepang kedudukan ulama mengalami perubahan yang signifikan. Harapan itu terjadi setelah Jepang melibatkan mereka dalam kegiatan politik dan militer. Dua ulama terkemuka Banten K.H. Achmad Chatib dan K.H. Sjam'un diangkat menjadi komandan batalyon (*daidanchō*). Menurut salah satu sumber, perekrutan para *daidanchō* dan *shudanchō* (komandan kompi) dilakukan secara personal oleh para pejabat Beppan (seksi khusus - dinas intelijen). Dalam kasus K.H. Sjam'un, pembujukan itu dilakukan melalui pendekatan oleh beberapa orang Jepang Muslim yang ikut serta dalam kedatangan Jepang di Indonesia. Pembujukan itu juga dilakukan dengan cara intimidasi, yaitu dikatakan bahwa apabila K.H. Sjam'un menolak bergabung dengan Peta, maka pesantrennya harus ditutup. Salah

satu alasan tersebut membuat K.H. Sjam'un akhirnya menuruti ajakan Jepang (Permana, 2004: 70).

Memang, sebelum Jepang menduduki Indonesia, terlebih dahulu mereka menunjukkan ketertarikan terhadap Islam. Faktor utama ketertarikan Jepang terhadap Islam adalah karena mereka berniat menaklukkan Pasifik Selatan, termasuk Indonesia di dalamnya. Pada tahun 1930an Perkumpulan Islam Jepang didirikan di Tokyo dan sejumlah pelajar Jepang diberangkatkan ke Timur Tengah untuk mempelajari Islam. Pada tahun 1938 perkumpulan ini mengadakan Konferensi Dunia Islam di Tokyo yang juga dihadiri oleh delegasi dari Indonesia. Walaupun persiapan penaklukan Islam Indonesia ini terkesan tidak terlalu serius, terlihat bahwa Jepang memiliki ketertarikan yang besar terhadap Islam yang memiliki peranan krusial di Indonesia. Ketertarikan terhadap Islam ini ditunjukkan dengan dikirimkannya pelajar-pelajar Jepang ke Indonesia di mana sebelumnya mereka belajar Islam di Timur Tengah. Di antara pelajar-pelajar yang kemudian nampaknya menjadi Muslim itu adalah H. Abdul Muniam Inada, H. Abdul Hamid Ono dan H. Muhammad Saleh Suzuki (Benda, 1955 (b): 353-354).

TB Achmad Chatib pada masa pendudukan Jepang, awalnya ia mendirikan badan usaha yang diberi nama Perusahaan Pengangkutan Rakyat. Setelah Jepang membentuk tentara Peta, ia mengikuti pendidikan Peta dan selesai pendidikan diangkat sebagai *daidanco* tentara Peta yang berkedudukan di Labuan (Suharto, 2001:87-89). Pada masa pendudukan Jepang inilah kedudukan kaum ulama mengalami perubahan. Islam diangkat dalam kedudukan resmi yang penting, yang pada masa Belanda

diabaikan. Harapan kaum ulama untuk memperoleh kedudukan politik yang lebih besar meningkat setelah pemerintah mengizinkan mereka berpolitik. Perubahan itu terjadi setelah K.H. TB. Achmad Chatib dan K.H. Sjam'un diangkat sebagai *daidanco* (Komandan Batalyon) tentara Peta yang berkedudukan di Banten. Tindakan Jepang diatas ini melihat umat Islam sebagai *powerful forces* yang akan dimanfaatkan untuk kepentingannya, tetapi tidak akan memajukan masyarakat muslim dan kehidupannya. Juga tidak memajukan kebudayaan kolonialismenya. Jepang memandang efektif bila memasuki kehidupan spiritual umat Islam dan mempengaruhinya untuk diarahkan kepada tujuan perangnya (Michrob & Chudori, 1993: 221).



Tentara PETA yang dibentuk oleh Jepang
(sumber: merdeka.com)

Secara taktis Jepang membuka empat *Daidan* di Banten,

antara lain :

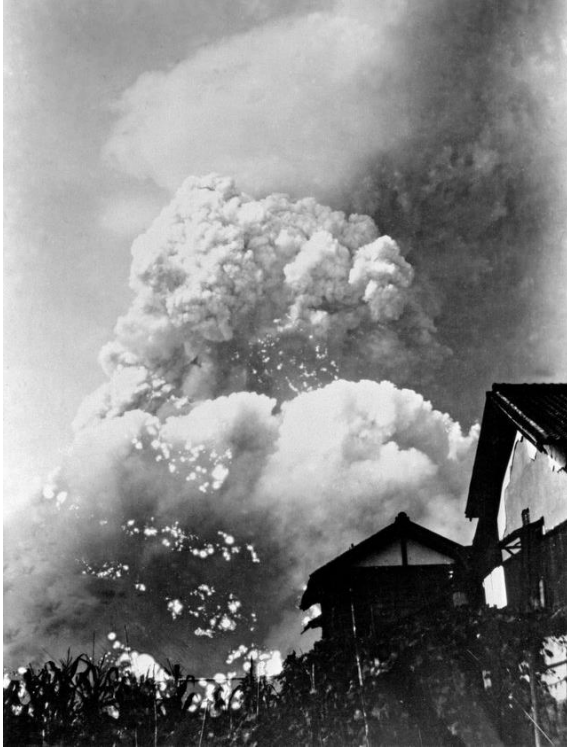
- 1) *Dai ichi Daidan* (batalyon I), dipimpin oleh K.H. TB. Achmad Chatib, yang berkedudukan di Labuan.
- 2) *Dai ni Daidan* (batalyon II), dipimpin oleh Entol Oyong Ternaya, berkedudukan di Kandangasapi.
- 3) *Dai san Daidan* (batalyon III), dipimpin oleh K.H. Sjam'un berkedudukan di Serang.
- 4) *Dai yon Daidan* (batalyon IV) dipimpin oleh Uding Soeryaatmadja, berkedudukan di Pandeglang sebagai *daidan* cadangan (Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudori, 1993: 222).

Pada bulan November 1943 setelah kurang lebih dua bulan berlangsung, kursus *daidancho* berakhir. Pada tanggal 8 Desember 1943 para *daidancho* dilantik dalam suatu upacara di Lapangan Gambir, Jakarta. K.H. Sjam'un pun kembali ke Serang untuk menjadi *daidancho* di sana (Permana, 2004: 73).

Namun, Jepang mulai menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekalahan dan kehilangan kontrol atas massa. Pada bulan Februari 1944 perlawanan petani yang serius di Jawa terhadap penjualan beras murah untuk pertama kalinya muncul di sebuah desa di Priangan dan perlawanan tersebut dihancurkan secara brutal. Kepemimpinan dipegang oleh seorang kiai NU setempat beserta murid-muridnya. Perlawanan lainnya yang dipimpin oleh para haji juga pecah di Jawa Barat pada bulan Mei dan Agustus 1944, dan mulai saat itu protes-protes petani mulai menjadi hal yang umum. Jepang berusaha memperkuat pengaruh mereka terhadap Islam di pedesaan dengan mendirikan cabang-cabang Kantor Urusan Agama di seluruh Jawa, dan pada bulan

Agustus 1944 mereka mengangkat Hasyim Asy'ari (sebenarnya diwakili oleh putranya Wahid Hasyim) sebagai kepala kantor. Namun, potensi revolusioner Islam di pedesaan, sekali distimulasi, tidak dapat dikontrol secara mudah. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, pemuda-pemuda yang terdidik mulai mendirikan jaringan bawah tanah yang dalam banyak kasus berada di bawah pengaruh Sjahrir. Mereka mengetahui bahwa perang akan berakibat buruk bagi Jepang dan mereka mulai merencanakan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang (Ricklefs, 2002: 256).

Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima, membunuh sekurang-kurangnya 78.000 jiwa. Di hari berikutnya, di Jakarta dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berisi orang-orang dari Jawa dan luar Jawa dan didominasi oleh generasi tua serta dijadwalkan bertemu pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, dan pada hari itu juga Sukarno, Hatta dan Radjiman diterbangkan ke Saigon untuk menemui Marsekal Terauchi Hisaichi yang ditemui mereka di Dalat pada tanggal 11 Agustus 1945. Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, tetapi menolak memasukkan Malaya dan wilayah-wilayah Inggris di Kalimantan. Sukarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 14 Agustus Sukarno dan rekan-rekannya kembali ke Jakarta.



Hiroshima di Jepang yang di bom atom oleh Amerika Serikat
6 Agustus 1945 (sumber: <https://www.atlasbuzz.com>)

Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat dan oleh karena itu membuat masalah besar bagi para pemimpin Indonesia. Karena tidak ada penaklukan kembali oleh Sekutu, kini ada kehampaan kekuasaan: Jepang masih berkuasa tetapi telah menyerah, dan tidak ada kekuatan Sekutu yang ada untuk menggantikan mereka. Rencana kemerdekaan pemberian Jepang nampaknya akan tertunda, dan esok harinya *Gunseikan* telah menerima perintah tegas untuk mempertahankan *status quo* hingga

Sekutu tiba. Sukarno, Hatta dan generasi tua tidak yakin akan apa yang harus dilakukan dan khawatir hal tersebut akan memicu konflik dengan Jepang. Maeda menginginkan penyerahan kekuasaan yang cepat kepada generasi tua karena khawatir terhadap kelompok pemuda dan prajurit-prajurit Jepang yang telah kehilangan semangat. Para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin di luar rencana yang telah dibuat Jepang, dan mereka didukung oleh Sjahrir. Namun, tidak ada yang berani bergerak tanpa Sukarno dan Hatta (Ricklefs, 2001: 259-260). Berita penyerahan Jepang sampai kepada orang-orang Jepang di Banten pada tanggal 15 Agustus 1945 sore. Kolonel Ban Yokiyoshi, *Shuchokan* (Residen) Banten meninggalkan Banten pada tanggal 16 Agustus 1945 di pagi hari menuju Jakarta untuk memenuhi panggilan atasannya tanpa memberitahukan Raden Tumenggung Ranga Tirtasoejatna, *Fuku Shuchokan* (Wakil Residen) Banten. Sejak hari itu, orang-orang Jepang di Banten baik sipil maupun militer tidak masuk bekerja (Suharto, 2001: 76). Pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 Sukarno dan Hatta tidak berada di Jakarta. Pada malam sebelumnya mereka diculik oleh para pemuda ke markas Peta di Rengasdengklok dengan tujuan melindungi mereka jika pemberontakan Peta dan *Heiho* meletus. Ternyata tidak ada pemberontakan dan Sukarno dan Hatta segera menyadari bahwa ini adalah usaha memaksa mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan di luar rencana Jepang yang mereka tolak. Maeda mengirim pesan bahwa jika mereka dibawa kembali dengan selamat ia dapat mengatur proklamasi kemerdekaan dengan aman. Pada malam hari tanggal 16 Agustus Sukarno dan Hatta berada di rumah Maeda di Jakarta. Pada malam

itu juga naskah proklamasi kemerdekaan disusun. Para pemuda menginginkan bahasa yang dramatis dan berapi-api, tetapi untuk menghindari penghinaan kepada Jepang atau menyulut aksi kekerasan, pernyataan yang lebih tenang dan sederhana dari Sukarnolah yang kemudian disusun.

BAGIAN KELIMA

Masa Revolusi Kemerdekaan Terpilih sebagai Residen Banten

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Sukarno dan Hatta yang dianggap sebagai wakil rakyat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia pun terbentuk. Sementara itu, Sekutu yang menang perang yang hampir sepenuhnya tidak mengetahui apa yang terjadi di Indonesia pada masa perang, bergegas merencanakan kedatangan mereka untuk menerima kekalahan Jepang dan mengembalikan kekuasaan ke tangan mereka. Namun, masa pendudukan Jepang telah menciptakan kondisi kekacauan, mempolitisi massa, dan mendorong para pemimpin generasi tua dan muda untuk mengambil inisiatif bahwa Sekutu harus menyadari bahwa mereka dihadapkan kepada perang revolusi kemerdekaan (Ricklefs, 2001: 260).

Pemerintah pusat segera didirikan di akhir bulan Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Pemerintah mengadopsi konstitusi yang telah dirancang oleh PPKI sebelum Jepang menyerah. Sukarno diangkat sebagai presiden pertama (1945-1967) dan Hatta sebagai wakil presiden pertama (1945-1956). Pemilihan umum akhirnya tertunda selama sepuluh tahun, dan oleh karena itu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk membantu presiden dan perwakilan-perwakilannya di tiap provinsi dan keresidenan-keresidenan juga dibentuk (Ricklefs, 2001: 262).

Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dapat langsung membentuk negara Indonesia ke arah kepenataan yang rapi.

Namun, boleh dikatakan, para pendiri bangsa ini telah bekerja sangat cepat. Dua hari setelah kemerdekaan itu, 19 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia di Jakarta berhasil menetapkan 12 kementerian (Soeara Merdeka, 9 Oktober 1945). Di hari yang sama PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membentuk delapan provinsi yang dikepalai seorang gubernur, yang terdiri atas keresidenan yang dikepalai seorang residen. Kedelapan provinsi itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Ketika pembentukan pemerintahan berjalan cukup lancar di Jawa, gangguan dalam kekuatan militer pemerintah terjadi pada tanggal 16 hingga 25 Agustus di Jawa, Bali dan Sumatera ketika Jepang melucuti dan membubarkan Peta dan *Heiho* yang mana sebagian besar anggotanya tidak mengetahui tentang proklamasi kemerdekaan (Ricklefs, 2001: 263). Di Banten, langkah pertama yang dilakukan untuk melucuti dan membubarkan Peta yang dilakukan oleh Panglima Tentara Jepang XVI adalah “mengundang” para *daidancho* Peta se-Jawa untuk menghadiri rapat pimpinan di Bogor pada tanggal 18 Agustus 1945. Para *daidancho* Keresidenan Banten yang datang ke pertemuan itu adalah *daidancho* K.H. TB. Achmad Chatib dari *daidan* (batalyon) Labuan, *daidancho* Entol Ternaja dari *daidan* Kandangsapi Lebak, *daidancho* K.H. Djoenaedi dari *daidan* Pandeglang, dan *shudancho* Samanhoedi dari *daidan* Cilegon yang mewakili *daidancho* K.H. Sjam'un yang sedang sakit (Suharto, 2001: 78).

Pada waktu para *daidancho* itu berada di Bogor, pada hari itu juga para *shidokan* (pelatih) melucuti senjata tentara Peta dan membubarkannya. Alasan pelucutan yang dikemukakan adalah

bahwa senjata mereka akan diganti dengan senjata baru yang akan mampu menandingi senjata tentara Sekutu. Selama menunggu datangnya senjata baru, tentara Peta diberi cuti panjang dan diminta menunggu di rumah masing-masing dengan diberi pesangon sebesar tiga bulan gaji. Selain itu, mereka juga diberi beberapa bahan makanan seperti terigu, mentega dan rokok. Seperti halnya di tempat-tempat lain, para anggota Peta di Banten pun tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka dibubarkan (Suharto, 2001: 78).

Dengan tujuan untuk menjaga keselamatan orang-orang Jepang sipil yang ada di seluruh Keresidenan Banten, kecuali mereka yang ada di tambang emas Cikotok dan tambang batu bara Bayah, orang-orang Jepang dikumpulkan di markas *Kenpeitai* di Serang (sekarang Gedung Juang 45). Tentara Jepang di Banten diinstruksikan agar tetap berada di markas atau asrama masing-masing dan melaksanakan perintah Sekutu, yaitu menjaga *status quo*. Mereka terkonsentrasi di empat tempat, yaitu satu seksi *Kenpeitai* di Serang, satu seksi *Jibakutai* (Pasukan Berani Mati)

Angkatan Udara di Lapangan Udara Gorda Serang, satu kompi *Kaigun* (Angkatan Laut) di Anyer, dan satu kompi infantri di Sajira, Lebak (Suharto 2001: 77).

Ketika kabar proklamasi kemerdekaan menyebar, banyak orang yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus 1945 Jepang akhirnya mengumumkan penyerahan dirinya kepada masyarakat. Namun, di daerah-daerah terpencil, baru pada September 1945 masyarakat di sana mengetahui tentang hal tersebut. Ketika akhirnya semua orang mengetahuinya, pertanyaan mengenai dukungan mulai

bermunculan. Empat penguasa keraton di Jawa Tengah menyatakan dukungannya kepada pemerintah Indonesia yang baru pada awal bulan September 1945. Namun, banyak raja di luar Jawa yang sebelumnya didukung dan diperkaya oleh Belanda nampak tidak terlalu antusias menyambut kemerdekaan. Mereka tidak menyukai kecenderungan radikalisme, non-aristokrasi dan sifat-sifat keislaman kepemimpinan di Jakarta. Namun, di Sulawesi Selatan, raja Bone (Arumpone) La Mappanjudi menyatakan dukungan kepada pemerintah. Kebanyakan raja-raja Makassar dan Bugis juga menerima kewenangan G.S. S.J. Ratulangie (1840-1949), seorang Manado Kristen yang diangkat oleh pemerintah sebagai gubernur. Selain itu, raja-raja Bali juga menerima kewenangan pemerintah. Namun, di banyak daerah lain, raja-raja cenderung menolak revolusi dan oleh karenanya sering menjadi korban (Ricklefs, 2001: 263).

Di Banten, kabar proklamasi kemerdekaan didengar oleh kalangan intelektual setempat melalui pesawat radio. Karena jumlah mereka sedikit dan mereka yang mengetahuinya pun meragukan hal tersebut, kabar itu tidak tersebar luas. Namun, kabar itu kemudian tersebar luas setelah datangnya beberapa pemuda Jakarta utusan Chaerul Saleh ke Serang pada tanggal 20 Agustus 1945. Mereka adalah Pandoe Kartawigoena, Abdoel Moeloek dan Ibone Parna yang menemui Ali Amangku, tokoh pemuda Banten bekas *shodancho yugekitai* (pasukan bawah tanah Jepang). Para utusan itu menyerahkan beberapa lembar naskah teks proklamasi, maklumat oleh Sukarno-Hatta dan beberapa eksemplar surat kabar terbitan Jakarta yang memuat berita tentang proklamasi kemerdekaan (Suharto, 2001: 79-80).

Bagi masyarakat, ada perasaan kemerdekaan yang mengarahkan mereka untuk menganggap diri mereka sebagai pro-Indonesia. Namun, tanpa pengetahuan yang tidak begitu jelas, komitmen seperti ini akan sia-sia. Pejabat-pejabat birokratik Indonesia menghadapi keadaan yang luar biasa dengan kemungkinan pemberian sanksi dimutasi dalam karir mereka. Kebanyakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pejabat-pejabat dari golongan priyayi biasanya tidak dapat merespon secara positif; mereka harus berkompromi dengan tugas mereka kepada penguasa asing.

Setelah pemuda Banten menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 20 Agustus 1945 kemudian menurunkan bendera Jepang⁷ dan menaikkan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintah. Pada tanggal 27 Agustus 1945 pagi, Ali Amangku bersama anggota pimpinan lainnya menurunkan bendera Jepang di Kantor Keresidenan Banten dan Kantor Kabupaten Serang dan selanjutnya menaikkan bendera Merah Putih. Pada hari itu juga Ali Amangku memerintahkan API Putri untuk menurunkan bendera Jepang di kantor Perminyakan di Jl. Kantin (sekarang Jl. Juhdi) dan di Hotel Vos (sekarang Ramayana Mall) (Suharto, 2001: 84).

Di banyak daerah terjadi upaya-upaya untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Di Banten, pada akhir bulan Agustus

⁷ Mengenai penurunan bendera Jepang di Kantor Keresidenan Banten dan Kabupaten Serang terdapat perbedaan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Agustus dan ada yang menyatakan 27 Agustus. Diantara kedua tanggal itu yang masuk akal adalah tanggal 27 Agustus, karena tanggal 17 Agustus agaknya terlalu cepat (Suharto, 2001, 84).

1945, melihat adanya perkembangan situasi yang kurang kondusif dan jabatan residen yang kosong, atas usaha pemuda yang tergabung dalam beberapa badan-badan perjuangan di Keresidenan Banten tampil sebagai kelompok yang berinisiatif untuk menjaga keamanan. Bagi para pemuda pada saat itu, langkah-langkah prioritas yang harus segera dilakukan adalah mengatasi keadaan yang menjurus kearah yang khusus. Adapun masalah pertanggungjawaban atas tindakan mereka dianggap nomor dua. Salah satu kelompok yang cukup berpengaruh adalah kelompok API di bawah pimpinan Ali Amangku, maka pada akhir bulan Agustus 1945 diselenggarakan pertemuan di antara para tokoh masyarakat Banten untuk menangani masalah Pemerintahan Daerah. Pertemuan yang dihadiri oleh para wakil golongan pemuda, masyarakat jawara, dan wanita, bertempat di rumah Raden Dzoelkarnaen Soeria Karta Legawa⁸ yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit Serang. Dalam pertemuan itu antara lain memutuskan:

1. Pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang diserahkan kepada Raden Dzoelkarnaen Soeria Karta Legawa.

⁸ Raden Dzoelkarnaen Soeria Karta Legaswa, ia lahir di Singapura, Tasikmalaya, tahun 1906. setelah tamat ELS dan MULO ia melanjutkan ke OSVIA dan selesai tahun 1928. Pekerjaannya dimulai sebagai Mantri Polisi, kemudian Asisten Wedana. Di zaman pendudukan Jepang diangkat sebagai ketua *Shu Sangikai*. Ia merupakan wakil dari kaum intelektual yang condong pada kemerdekaan. Ia di jadikan sebagai penasihat dalam pembentukan pemerintahan (Gunseikanbu, 1986, 95. Lihat juga Muhammad Iskandar dan Tri Wahjuning M. Irsyam, Naskah Sekitar Proklamasi di Daerah Banten, *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1993, hlm.4).

2. Urusan yang ada hubungannya dengan badan perjuangan atau organisasi pemuda diserahkan kepada Ali Amangku.
3. Pertemuan secara aklamasi memilih K.H. TB. Achmad Chatib sebagai Residen Banten yang menangani pemerintahan sipil.⁹
4. Untuk menangani masalah militer diserahkan kepada K.H. Sjam'un. Alasannya bahwa K.H. Sjam'un sudah berpengalaman semasa menjadi tentara Peta. (Suharto, 2001: 86-86).

Pada 10 September 1945, K.H. TB. Achmad Chatib diangkat secara resmi menjadi Residen Banten oleh Presiden Sukarno. Suriakertalegawa diangkat menjadi asisten residen. Raden Hilman Djajadiningrat menjadi bupati Serang. Raden Djumhana menjadi bupati Pandeglang, dan Raden Hardiwinangun menjadi Bupati Lebak dan mereka diminta untuk melanjutkan posisi mereka. Karena Komite Nasional Indonesia, yang didirikan oleh RI dan setiap kabupaten harus memiliki cabangnya. Tje Mamat diangkat menjadi ketua KNI kab. Serang, Mohamad Ali untuk Pandeglang dan Raden Djarukmantara untuk Lebak.

Supriatna dan Wiyanarti (ed) (2008: 317) menyatakan bahwa

⁹ Para hadirin yang hadir pada waktu itu akhirnya mendesak pemerintah pusat untuk melantik K.H. Tb. Achmad Chatib secara resmi dalam waktu yang secepatnya. Pemerintah pusat menyetujui tuntutan itu, dan pada tanggal 10 September 1945 Presiden Soekarno melantik K.H. Tb. Achmad Chatib menjadi Residen Banten (Zulfikar Ghazali (ed.), 1995, 106).

di Banten, disamping para jawara dan birokrat, kaum ulama/kyai menempati posisi penting, seperti tercermin dalam tipologi struktur sosial kekuasaan mereka. Sebagaimana diketahui, ulama memiliki otoritas tidak hanya pada bidang keagamaan tetapi di bidang sosial dan bahkan politik. Hal itu tercermin dalam fakta sejarah bahwa ulama diakui memiliki wibawa besar. Di samping karena status sosial ekonominya diatas rata-rata orang Banten, melalui pesantren yang didirikannya dan kitab kuning yang dituliskannya, ulama bertindak sebagai penerjemah doktrin-doktrin Islam yang otoritatif, dan sekaligus sebagai jembatan dari proses transmisi nilai-nilai keagamaan yang panjang atau sebagai pialang budaya.

K.H. TB. Achmad Chatib yang terpilih menjadi Residen Banten menyusun personalia pemerintahan daerah di Keresidenan Banten. Residen K.H. TB. Achmad Chatib segera menyusun pemerintahan daerah di Keresidenan Banten, dan waktu itu dikeluarkan penetapan umum bahwa semua pegawai pemerintah yang lama tetap memegang jabatannya.¹⁰

Selain itu residen membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Keresidenan Banten¹¹ menurut pedoman dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNID terdiri dari bekas anggota *Shu Sangikai* ditambah wakil-wakil dari golongan ulama, pemuda, perempuan, pegawai, petani, nelayan dan

¹⁰ Susunan Pemerintahan Keresidenan Banten lihat lampiran 1

¹¹ Pembentukan KNID dan BKR Banten sebagai kelengkapan pemerintah daerah dilaksanakan pada awal bulan September 1945. Adapun jabatan ketua KNID di Keresidenan Banten adalah : Ketua KNI Serang: Tje Mamat, Ketua KNI Pandeglang: Muhammad Ali, Ketua KNI Lebak: Raden Djajarokmantara.

intelektual yang diketuai oleh Dzoelkarnaen Soeria Karta Legawa (Suharto 2001, 89). Setelah terbentuk KNID Keresidenan Banten, sesuai dengan petunjuk KNIP, Bupati Serang, Bupati Pandeglang dan Bupati Lebak segera membentuk KNID kabupaten masing-masing. Ketua KNID Kabupaten Serang adalah Tje Mamat, sedangkan ketua KNID Kabupaten Pandeglang adalah Muhammad Alie alias Mamak, dan ketua KNID Kabupaten Lebak adalah Agoes Djajaroekmantara (Suharto, 2001: 92).

Setelah pembentukan KNID Residen K.H. TB. Achmad Chatib segera pula membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Keresidenan Banten sesuai dengan aturan pusat (Suharto, 1996: 8-9). Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing. Pembentukan BKR diumumkan bersama-sama pembentukan KNI dan PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. Presiden dalam pidatonya menyerahkan kepada semua bekas tentara Peta (Pembela Tanah Air), *Heiho*, *Kaigun Heiho* dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam BKR dan bersiap-siap dipanggil sebagai prajurit tentara kebangsaan jika datang saatnya (*Soeara Asia*, 24 Agustus 1945).

Tujuan dibentuk BKR adalah untuk memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepala-kepala BKR dari pusat sampai ke daerah menjadi anggota pengurus harian dari BPKKP. Mereka yang mau dan ingin membantu BKR dipanggil pada tanggal 29 Agustus 1945. Di tingkat Keresidenan, pimpinan dipegang oleh kepala BKR Keresidenan di kabupaten atau kotapraja, pimpinan dipegang oleh kepala BKR kewedanaan, dan di kelurahan pimpinan dipegang oleh kepala BKR kelurahan.

Kepala BKR pusat diangkat oleh pengurus harian BPKKP. Kepala BKR Keresidenan ditetapkan dan disahkan oleh ketua pengurus besar BPKKP atas usul pengurus harian di Keresidenan. BKR harus memelihara keamanan bersama-sama rakyat dan jawatan-jawatan pemerintah yang bersangkutan. BPKKP dan BKR ada di bawah pengawasan dan Pimpinan Komite Nasional (*Asia Raja*, 23 Agustus 1945). Sesuai dengan seruan Sukarno, anggota BKR Banten terdiri dari para mantan anggota Peta dari empat *daidan* di daerah tersebut, para anggota *Heiho* darat, para mantan anggota Hizbullah, para mantan anggota *yugekitai*, para mantan anggota Barisan Pelopor dan para pemuda yang telah mendapat didikan militer. Pemuda yang tergabung dalam organisasi API secara keseluruhan juga masuk dalam keanggotaan BKR (Suharto, 2001: 97).

Susunan Pengurus BKR Keresidenan Banten selengkapnya adalah sebagai berikut, Ketua: K.H. Sjam'un, Ajudan: Sukarahardja (bekas *Cudanco*), Wakil Ketua I: Satalaksana, Wakil Ketua II: Agus Djajarukmantara, Anggota Staf Pimpinan: H. Abdullah (bekas *Cudanco*) dan H. Djunaedi, dan Perhubungan: Harsono. Sedangkan susunan Pengurus BKR Kabupaten Serang selengkapnya adalah: K.H. Sjam'un (merangkap sebagai Ketua BKR Keresidenan Banten, Ajudan: Sukarahardja (merangkap sebagai Ajudan BKR Keresidenan Banten), Wakil Ketua I: Sjech Abdulsjukur Alwan (polisi), Wakil Ketua II: H. Asnawi (Pemuda Islam), Wakil Ketua III: M. Rusdi (Bekas Polisi), Sekretaris I: M. Sanusi (pemuda), dan Sekretaris II: M. Subki (pemuda), Promotor Pembentuk Pasukan: beberapa bekas perwira Peta, yaitu Harsono, Salim Setiadinata, Kusendidjaja, H. Abdullah, TB. Suhadisastra, dan Hamdani. Pengurus BKR Keresidenan dan Pengurus BKR

Kabupaten Serang bermarkas di Markas API. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya BKR-API (Michrob & Chudori, 1993: 239).

Secara umum, pemerintahan yang baru dibentuk di banyak daerah termasuk di Banten sering mengalami tantangan yang luar biasa, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Dari dalam, tidak semua orang-orang baru yang menjabat dapat diterima dengan mudah oleh orang-orang lama. Sementara itu, dari luar, masyarakat sering menuntut perbaikan segala sektor dalam waktu yang cepat. Padahal, pejabat-pejabat baru tersebut tidak terbiasa dengan tugas-tugas mereka yang di luar batas yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh mereka sebelumnya.

Berjuang Mengusir Jepang dari Banten

Ketika pasukan Sekutu muncul, ketegangan meruncing di Jawa dan Sumatera. Perkelahian menjadi pemandangan sehari-hari di bulan Oktober di mana para pemuda sering berkonfrontasi dengan mantan tawanan Belanda, pasukan kolonial Belanda (termasuk orang-orang Ambon), orang-orang Cina, Indo-Eropa dan Jepang. Jepang berada dalam posisi yang sangat sulit karena mereka tidak dapat mengabaikan kewajiban mereka kepada Sekutu, termasuk mempertahankan *status quo* (Ricklefs, 2001: 266).

Pada bulan Oktober 1945 Jepang berupaya mempertahankan kekuasaan mereka di kota-kota di Jawa di mana mereka sebelumnya mengizinkan orang-orang Indonesia mengambil alih kekuasaan. Pada tanggal 3 Oktober Kenpeitai membantai para pemuda di Pekalongan. Pada tanggal 10 Oktober memukul mundur pasukan Indonesia keluar dari Bandung dan

seminggu kemudian Bandung diserahkan kepada Inggris. Pada tanggal 14 Oktober mereka mulai mengambil alih Semarang. Di sana pasukan Indonesia membunuh setidaknya 130 orang dan sekitar 300 orang ditahan (Ricklefs, 2001: 266).

Namun, di beberapa daerah lain Jepang mengalami tekanan yang luar biasa untuk mempertahankan *status quo* atau bahkan untuk mempertahankan hidup mereka. Di Banten, mengingat persenjataan BKR sangat sedikit, maka pada awal bulan Oktober 1945 diadakan rapat antara para tokoh BKR asal API dan juga laskar di bawah pimpinan Ketua BKR, K.H. Sjam'un untuk berunding dengan pihak Jepang dan meminta agar mereka menyerahkan senjatanya kepada BKR. Residen Banten menyetujui hal tersebut. Ia memerintahkan agar dibuat perundingan dengan Jepang. Perundingan pertama diadakan pada tanggal 4 Oktober 1945. Pada pertemuan kedua keesokan harinya, Residen Banten turun langsung dalam perundingan tersebut dan Jepang menyetujui usul Residen untuk menyerahkan seluruh persenjataan Jepang dengan syarat Residen dan BKR dapat menjamin keselamatan semua orang Jepang di Keresidenan Banten. Berdasarkan persetujuan itu, Residen mengumumkan agar selambat-lambatnya tanggal 9 Oktober 1945 semua tentara Jepang yang ada di Anyer Kidul, Gorda dan Sajira berkumpul di markas *kempeitai* di Serang dan selanjutnya akan diangkut ke Jakarta (Suharto, 2001: 98).

Ketua BKR Banten yakni KH. Sjam'un yang memimpin perundingan dengan *kempeitai* agar menyerahkan senjatanya kepada BKR. Dengan tanpa gangguan dari masyarakat, pada tanggal 7 Oktober 1945 pasukan marinir dari Anyer Kidul tiba di

Serang. Pada hari yang sama pasukan Angkatan Udara dari Gorda juga dipindahkan ke Serang. Masih di hari yang sama pimpinan BKR juga memerintahkan Juhdi dan Abdulmukti untuk menarik pasukan infantri dari Sajira. Dalam perjalanan terjadi insiden yang menewaskan beberapa prajurit Jepang di Warunggunung, Lebak akibat serbuan masyarakat. Insiden tersebut mengecewakan pihak BKR dan pihak Jepang. Terlihat bahwa Jepang memandang bahwa BKR tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Jepang membatalkan perundingan tersebut, akibat insiden tewasnya beberapa prajurit Jepang yang diserang oleh masyarakat di Warung Gunung Lebak, ketika dalam perjalanan menuju Serang. Jepang kemudian membatalkan persetujuan yang telah dibuat secara sepihak dan bahkan bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu pertempuran bersenjata. Persuasi dengan jalan damai untuk mengambil alih senjata dari *kempeitai* tidak berhasil, opsi selanjutnya adalah meminta paksa dari Jepang dengan menyerang markas mereka di Kota Serang.

BKR juga merespon keadaan tersebut dengan mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah yang menghasilkan keputusan untuk menyerang markas *Kenpeitai* di bawah komando Ali Amangku. Saat itu jumlah tentara Jepang yang ada di markas *Kenpeitai* diperkirakan berjumlah 200 orang (Suharto, 2001, hlm. 101). Setelah disepakati oleh K.H. Sjam'un, KH TB. Achmad Chatib, Ali Amangku dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Banten (ulama, jawara, pemuda, para pimpinan laskar) maka diputuskan untuk menyerbu markas *kempeitai* pada Kamis tanggal 11 Oktober 1945 jam 5 pagi. Dimulai dengan pemadaman listrik dan evakuasi penduduk yang bertempat tinggal di sekitar

alun-alun, pertempuran hebat dimulai (Berita Indonesia, 16 Oktober 1945).

Menurut beberapa sumber (dari tulisan beberapa pelaku penyerangan seperti TB. Marzuki, Mochammad Marsim, Ating Soehadi, M. Djanawi, dan Djadjamihardja) yang dikutip Suharto (2001:101), pada tanggal 9 Oktober 1945 hasil pertemuan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Pada malam hari di tanggal yang sama, diadakan pertemuan di markas BKR yang memutuskan tentang waktu, strategi, dan tanda dimulai penyerangan. Walaupun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa waktu penyerangan adalah 10 Oktober 1945, tetapi menurut Suharto waktu penyerangan yang sebenarnya terjadi pada tanggal 11 Oktober 1945. Dalam penyerangan tersebut, pimpinan BKR memutuskan bahwa markas *kenpeitai* harus dikepung dari berbagai penjuru. Oleh karena itu, medan pertempuran dibagi menjadi empat sektor yang masing-masing dipimpin oleh mantan *shudancho* Peta. Sektor utara, yaitu di depan markas dipimpin oleh Iski, sektor timur oleh Zaenal Falah, sektor selatan oleh Salim Nonong, dan sektor barat oleh Nunung Bakri. Pasukan rakyat dari luar kota ditempatkan di daerah-daerah sekitar markas. Diperkirakan jumlah pasukan BKR dan para pendukungnya berjumlah 1.000 orang (Suharto, 2001: 101).

Sesuai dengan rencana pada tanggal 11 Oktober 1945 pagi serangan dimulai dengan didahului oleh pemadaman listrik di seluruh kota. Menurut keterangan pelaku penyerangan, pasukan sektor timur mulai menembaki markas. Setelah sekitar dua jam pertempuran berlangsung, Juhi yang bergerak dari sektor utara tertembak mati. Kemudian setelah itu menyusul Nunung Bakri

dan Kusdi serta Thalib. Pada siang harinya seluruh pasukan diperintahkan mundur. Di malam harinya dalam suasana gelap karena pemadaman listrik, terdengar tembakan gencar dari arah markas yang diarahkan ke sektor timur ke kampung Benggala. Tembak-menembak terhenti sekitar pukul 02.00 dini hari. Pada dini hari itu juga tentara Jepang berhasil meninggalkan markas dan melarikan diri ke Jakarta dengan menggunakan beberapa buah truk (Suharto adalah *Kedaoelatan Rakjat*, 13 Oktober 1945 ; *Berita Indonesia*, 13 dan 16 Oktober 1945 ; *Merdeka*, 18 Oktober 1945). Setelah Jepang pergi, ditemukan tiga prajurit Jepang tewas dalam pertempuran itu (Suharto, 200: 102-103).

Menumpas Gerakan Dewan Rakyat

Kedatangan pasukan Sekutu secara nyata menaikkan ketegangan di Jawa dan Sumatera. Atas nama kedaulatan rakyat, pemuda-pemuda revolusioner mengintimidasi, menculik dan kadang-kadang membunuh pegawai pemerintah, kepala desa dan polisi yang loyalitasnya kepada Indonesia dicurigai, atau juga yang dituduh korupsi atau memperkaya diri sendiri pada masa pendudukan Jepang. Dalam kebingungan, aksi-aksi atas nama revolusi kadang-kadang sulit untuk dibedakan dengan perampokan, penjarahan, atau pemerasan biasa (Ricklefs, 2001: 269).

Ketegangan sosial di pantai utara Jawa mencapai puncaknya pada Desember 1945. Di tiga kabupaten, Brebes, Pematang dan Tegal (semuanya bagian dari Keresidenan Pekalongan) terjadi kerusuhan yang dikenal dengan nama 'peristiwa tiga daerah'. Protes sosial petani memicu kekerasan massa. Di awal Oktober

aksi-aksi melawan kepala desa mulai berlangsung di mana inisiatifnya berasal dari aktivis-aktivis muda dari komunitas Islam orthodox yang merupakan orang-orang yang selamat dari pemberontakan PKI 1926 dan juga orang-orang dari gerakan komunis bawah tanah. Di akhir November Bupati Brebes, Tegal dan Pemalang digantikan oleh pendukung 'revolusi sosial' ini. Pada tanggal 12 Desember pemuda-pemuda revolusioner menggulingkan Residen Pekalongan dan menggantikannya dengan seorang mantan anggota PKI dan pemimpin gerakan bawah tanah yang ditahan pada masa pendudukan Jepang. Kini oposisi setempat mulai bergerak. Milisi-milisi setempat dan para pemuda yang mendukung mereka menyapu bersih tiga kabupaten tersebut dan menangkap lebih dari 1.000 pendukung 'revolusi sosial' tersebut yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan. Namun, banyak pemimpin santri di desa-desa yang tetap memegang jabatannya (Ricklefs, 2001: 269).

Di Banten, ketegangan sosial yang mengatasmakan revolusi nampaknya paling jelas dapat dilihat dalam aksi Dewan Rakyat yang dipimpin oleh Tje Mamat. Selain laskar-laskar perjuangan yang merupakan cabang dari laskar-laskar yang berpusat di kota-kota lain, di Serang ada sebuah laskar yang tidak dapat ditemukan di kota lain, yaitu Laskar Rakyat yang dipimpin oleh Tje Mamat, TB. Hilman dan Alirachman di mana K.H. TB. Achmad Chatib diangkat sebagai Pemimpin Besar Laskar Rakyat (Suharto, 2001: 107). Laskar tersebut memiliki markas-markas di Kecamatan Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Cinangka, Anyer, Mancak dan Baros. Laskar tersebut di tiap kecamatan memiliki sejumlah pimpinan yang berasal dari beberapa desa. Setiap anggota

pimpinan memiliki 10 hingga 25 anak buah yang sangat loyal pada pimpinannya yang kebanyakan terdiri dari para ulama yang berjiwa jawara (Suharto, 200 : 107-108).

Dewan Rakyat yang menyebar luas ke wilayah Banten memiliki jangkauan yang luas. Hutan-hutan dalam gugusan hutan Banten Selatan dari mulai Cinangka-Padarincang sampai ke hutan Cinoyong-Citaman-Gunung Sari yang terhubung langsung dengan hutan-hutan di Ujung Kulon. Cinoyong adalah salah satu pusat persembunyian Dewan Rakyat yang memiliki jaringan terhubung langsung dengan jaringan Banten Selatan dan bahkan salah satu anggotanya ada yang berasal dari Garut, Kusnadi. Dia merekrut anak-anak muda dan kokolot yang berwatak keras (Jawara) di Cinoyong. Sebenarnya agak sulit memisahkan memori kolektif masyarakat mengenai ceita-cerita ini. Di dalam memori ingatan mereka, peristiwa-peristiwa ini tersamakan dengan gerakan DI/TII, yang bisa dimungkinkan memang ikut memperkeruh situasi keamanan di masa itu.

Seperti ketegangan sosial di daerah lain, di Banten perasaan tidak puas terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial mengakibatkan Tje Mamat yang kemudian membentuk Dewan Rakyat berusaha untuk mengubah tatanan tersebut. Menurut Michael Williams, pola kekacauan yang ditimbulkan oleh aksi Dewan Rakyat mengikuti perlawanan Geger Cilegon 1888 dan terutama juga pemberontakan komunis 1926. Target kekerasan revolusioner tersebut, seperti pada dua rangkaian peristiwa sebelumnya adalah pejabat pemerintahan dan polisi. Anggota kelompok perlawanan tersebut sebagian besar adalah petani, sedangkan kepemimpinannya berada di tangan aliansi ulama,

komunis dan jawara. Sebuah hal penting yang membedakan antara peristiwa 1945 dengan peristiwa 1888 dan 1926 adalah bahwa pemerintah sangatlah lambat dalam menangani kekacauan tersebut; setidaknya kondisi tersebut dibiarkan selama berbulan-bulan. Yang jelas, pada peristiwa 1926 kebencian terhadap orang-orang Eropa yang kafir sangat terlihat dan berperan besar dalam perlawanan rakyat tersebut (Williams, 1990 : 295 & Benda, 1955 (a): 144).

Golongan radikal di Banten, termasuk di antaranya adalah gerakan bawah tanah Joyoboyo yang dipimpin oleh Tje Mamat, berpendapat bahwa para pejabat pemerintah pasca proklamasi kemerdekaan adalah warisan kolonial yang perlu diganti sesegera mungkin oleh orang-orang baru yang tidak terlibat dalam pemerintahan Belanda atau Jepang. Gerakan Joyoboyo yang dipimpin oleh Mr. Jusuf (seorang pengacara yang mengetuai Persatuan Sopir Indonesia) ini berusaha untuk membangkitkan kembali PKI pasca kemerdekaan (Williams, 1990 : 285-289). Dalam banyak kesempatan Tje Mamat pun berusaha untuk membangkitkan kembali PKI di Banten.

Tje Mamat alias Mohamad Mansur dilahirkan di Anyer. Pada tahun 1926 ia menjadi sekretaris PKI cabang Anyer. Setelah kegagalan perlawanan komunis tahun 1926 ia melarikan diri ke Malaya di mana ia diterima di Partai Republik Indonesia (Pari) yang didirikan oleh Tan Malaka. Pada tahun 1930 ia pergi ke Palembang dan di sana bersama Mohamad Arif Siregar ia mendirikan klub studi politik. Dua tahun kemudian ia kembali ke Banten dan menjadi *pokrol* (pengacara yang tidak memerlukan izin khusus) yang sering membela para jawara di pengadilan. Selama

masa pendudukan Jepang ia dan rekan-rekannya bersumpah untuk memutuskan setiap hubungan dengan orang-orang yang mendukung Jepang. Pada tahun 1944 ia dan rekan-rekannya ditangkap Jepang dan baru dibebaskan pada tahun 1945 (Williams, 1990: 286).

Secara umum, ada beberapa pihak di Banten yang meminta Residen untuk mengganti para pejabat lama dengan orang-orang baru. Namun, Residen tidak menanggapi permintaan tersebut karena ia berpendapat bahwa orang-orang lamalah yang paling mengetahui tugas-tugas pemerintahan, sedangkan orang-orang baru yang memiliki kemampuan pekerjaan pemerintahan tidaklah mudah didapat. Melihat perkembangan seperti itu, Residen membentuk Panitia Penyusun Personalia Pemerintah Sipil Keresidenan Banten yang kemudian menetapkan bahwa di jajaran pemerintah daerah terdapat dua unsur pegawai, yaitu unsur ulama yang menangani bidang keamanan dan unsur “intelektual”, yaitu para pejabat atau pegawai lama, yang menangani bidang administrasi pemerintahan (Suharto, 2001: 109-110).

Tje Mamat sebagai orang komunis yang juga menjabat ketua KNID Kabupaten Serang tidak setuju dengan pendapat Residen tersebut. Ia menuntut agar orang-orang lama diganti dengan orang-orang baru. Selain itu, ia juga menilai bahwa KNI tidak representatif dan demokratis karena lembaga tersebut terdiri dari orang-orang yang mau berunding dengan pihak asing dan juga karena anggotanya tidak dipilih rakyat. Melalui posisinya sebagai ketua KNID ia menyebarkan ideologi komunis di masyarakat dan merekrut mereka menjadi anggota. Di dalam Dewan Rakyat, ia memiliki pasukan sendiri yang disebutnya Laskar Gulikut. Gulikut

sendiri adalah akronim dari gulung *bukut* (blangkon dalam bahasa Jawa - *bukut* merujuk kepada tutup kepala yang dipakai oleh pamong praja) yang berarti laskar yang dibentuk untuk “menggulung” atau membunuh para pamong praja (Suharto, 2001: 111).

Dewan Rakyat mendapat dukungan beberapa bagian masyarakat, terutama dari petani dan jawara. Orang-orang radikal dan revolusioner ini mengintimidasi masyarakat untuk membalas dendam kepada orang-orang Jepang, pamong praja dan polisi. Pada bulan Oktober 1945 Dewan mulai beraksi. Setelah serangan terhadap *kempetai*, target selanjutnya adalah penjara, pamong praja dan polisi. Pada tanggal 12 Oktober 1945 penjara utama di Serang yang tidak dijaga ketat diserang. Beberapa jawara yang ditahan di sana, seperti Achmad Sadeli, Mad Duding dan Wadur dibebaskan mereka. Pada tanggal 13 Oktober 1945 para pendukung Dewan Rakyat membunuh enam orang Eropa yang ditahan di penjara tersebut. Pada waktu yang bersamaan, mereka juga menangkap hampir semua orang yang meninggalkan tugasnya dari kantor kabupaten. Beberapa priyayi lain seperti Wedana Ciomas, R. Sastradikarta ditangkap oleh mereka (Suharto, 2001: 113).

Sementara itu, di beberapa tempat terjadi pembunuhan terhadap beberapa pamong praja, seperti Wedana Anyer dan Asisten Wedana Pabuaran TB. Entik Soerawidjaja. Mereka juga bergerak ke Baros, Petir dan Ciruas untuk memberhentikan atau bahkan membunuh para pejabat pemerintah di sana (Suharto, 2001: 114).

Gerakan ini berhasil menguasai wilayah-wilayah pedalaman Banten, terutama sekali di wilayah selatan Banten, dari mulai

Ciomas ke Pandeglang, Carita dan berakhir di wilayah Ujung Kulon. Salah satu desa yang menjadi tempat pergerakan mereka adalah Cinoyong-Carita. Para pimpinan di daerah ini terkordinasi langsung dengan kelompok yang ada di Ujung Kulon. Di antara tokoh desa Cinoyong yang terlibat aktif dalam gerakan Dewan Rakyat adalah Musra dan Shihab. Keduanya adalah pemuda jawara yang dikenal memiliki keterampilan pencak silat yang baik. Musra dan Shihab menjadi kaki tangan Kusnadi selama bergerak di Cinoyong. Musra diberikan kepercayaan oleh Kusnadi untuk membantu konsolidasi dengan pengikut-pengikut yang ada di Cinoyong sedangkan Kusnadi sendiri adalah “Jaga Pintu”-nya jaringan Carita dengan Garut. Sementara Shihab adalah tukang pukul Kusnadi yang diberi tugas menangkap dan menculik sekaligus melenyapkan nyawa siapa saja yang diketahui menjadi mata-mata pemerintah. Sihab dan Musra mendampingi Kusnadi bergerilya ke wilayah Sumur saat panangkapan K.H. TB Achmad Chatib dilancarkan Dewan Rakyat.

Aksi dewan rakyat yang dilancarkan oleh Tje Mamat yang ingin menguasai praktis pemerintah daerah, yang pada prakteknya berupa pengambil-alihan kekuasaan dari pamong praja dan polisi yang diisi oleh tenaga-tenaga alim ulama dibantu oleh kaum jawara atas nama rakyat. Memang ketika Residen KH. TB. Achmad Chatib dalam menyusun pemerintahan daerah tetap menggunakan pejabat dan pegawai lama dengan pertimbangan bahwa untuk menangani administrasi pemerintah diperlukan orang-orang yang biasa menanganinya.¹² Menurut pandangan

¹² Untuk jabatan Bupati Serang: Raden Hilman Djajadiningrat, Bupati Pandeglang: Raden Djumhana, Bupati Lebak: Raden Hardiwinangoen.

rakyat pada umumnya bahwa pejabat pamong praja lama dari bupati sampai dengan camat dan para pegawainya, bahkan para lurah, kepolisian, kejaksaan harus diganti dengan pejabat-pejabat baru yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Banyak orang yang datang menghadap residen untuk memprotes dan meminta agar para pejabat lama itu segera diganti. Menanggapi tuntutan itu, residen KH. TB. Achmad Chatib tetap pada pendiriannya. (*Rakjat*, 29 Desember 1945, *Merdeka*, 22 Januari 1946). Menurut para pejabat dan pegawai lama yang mempunyai keahlian di bidang administrasi sangat diperlukan agar pemerintah tetap berjalan, manakala untuk mendapatkan pejabat dan pegawai baru yang memenuhi syarat untuk menggantikan peran mereka tidaklah mudah. Tetapi karena tidak ada titik temu di antara kedua belah pihak, maka rakyat secara sepihak menempuh caranya sendiri. Rakyat secara serentak dan besar-besaran mendaulat para penjajah pemerintah khususnya Pamong praja (Muhammad Iskandar, dkk, 1990: 80-81).

Berdasarkan kesaksian warga Sumur dan Cibaliung, K.H. TB Achmad Chatib pernah ditawan oleh gerombolan Dewan Rakyat, di leuweung kolot yang letaknya di belakang desa Sumur untuk kemudian dibawa ke Gunung Honje. Gerombolan yang mengatasnamakan Dewan Rakyat sampai melaksanakan shalat Ashar di Masjid al-Taqwa Sumur. Selain K.H. TB Achmad Chatib yang ditawan Dewan Rakyat, Ahmad Patoni, K.H. Wahab (Asisten Residen Banten), Mayor Tresna ikut diculik untuk kemudian dibawa ke Dahu Cikeusik.¹³

¹³ Muhamad Azhari bin H. Acang, (60 th) dan Muhamad Fatah bin Mad Hadi, Sumur, 23 Maret 2015 .

Sebelum dilarikan ke Leuweung Kolot di Sumur, gerombolan Dewan Rakyat menawan KH. Ahmad Khatib dan beberapa tokoh Banten di Cibaliung. Di antara tokoh Banten yang diculik adalah Ahmad Fatoni, Yusuf Martadilaga dan Abdul Wahab. Ketiganya disekap dengan tangan tetap terikat di atas kursi di sebuah rumah milik Ki Soleman, lurah Cihanjuang (Dulu dikenal dengan nama Desa Blimbing). Untuk mengecoh jejak pengejaran yang dilakukan TNI, ketiga tawanan tersebut dipisahkan, Yusuf Martadilaga, Ahmad Fatoni dan K.H. Abdul Wahhab ditinggal di tempat Cihanjuang sedangkan K.H. TB Achmad Chatib dibawa ke Cikeusik. Ahmad Fatoni dan Yusuf Martadilaga dibunuh dan dimakamkan di Hanjuang (Sekarang sudah dibangun monument). Jauh sebelum peristiwa penculikan keempat tokoh Banten, Khairul Saleh diketahui melakukan kunjungan secara aktif dan menyebarkan propaganda kepada masyarakat Cigeulis sampai Sumur. Di antara propaganda yang disebarkan ke tengah masyarakat adalah cita-cita akan berdirinya negara Islam sudah dekat jika rakyat mau mendukung perjuangan DI melawan pemerintah yang resmi.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 Tje Mamat dan beberapa anak buahnya seperti H. Mu'min, Soleman, H. Achmad, dan H. Ma'mun menemui Residen Banten, KH. TB. Achmad Chatib. Mereka mendesak KH. TB. Achmad Chatib untuk menyerahkan kekuasaan kepada Tje Mamat. Karena terdesak, KH. TB. Achmad mengabdikan permintaan Dewan Rakyat. Keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 1945 keluar maklumat yang ditandatangani oleh Tje Mamat yang diperkuat oleh Bupati Serang Hilman Djadiningrat dan disetujui oleh Residen Banten bahwa sejak hari

itu kekuasaan Residen Banten berada di tangan Dewan Rakyat (Suharto, 2001: 115).

Pada tanggal 28 Oktober 1945 malam beberapa orang dari Laskar Gulikut yang dipimpin oleh Salim Nonong menangkap Bupati Serang Hilman Djajadiningrat yang kemudian dipenjarakan di Serang. Beberapa hari kemudian Dewan menyerbu Detasemen Polisi Serang untuk merebut senjata.

Namun, usaha tersebut tidak berhasil karena senjata-senjata tersebut telah diserahkan kepada TKR. Aksi-aksi berikutnya adalah merebut dan menguasai jawatan-jawatan vital seperti Jawatan Pos, Jawatan Telepon, Jawatan Listrik dan lain-lainnya. Secara umum, tindakan Dewan tidak mendapat perlawanan dari pihak keamanan. Pada tanggal 30 Oktober 1945 Panglima TKR Keresidenan Banten, Kolonel K.H. Sjam'un menyatakan bahwa seluruh Keresidenan Banten siap mempertahankan kedaulatan republik. Disebutkan olehnya bahwa rakyat Banten dan semua kiai yang menduduki jabatan resmi di pemerintahan serempak berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dikatakan juga bahwa rakyat Banten adalah warga negara RI yang hanya mengakui Presiden Sukarno sebagai pemimpin negara Indonesia merdeka (Suharto, 2001: 115-117).

Menyikapi perkembangan dan adanya desas-desus bahwa Banten akan melepaskan diri dari Indonesia, Sukarno dan Hatta mengunjungi Banten pada tanggal 9 dan 10 Desember 1945. Di hadapan ribuan rakyat Sukarno dan Hatta menyampaikan pandangannya yang menginginkan pembubaran Dewan Rakyat. Tje Mamat menanggapi dengan menculik dan membunuh R.T. Hardiwinangoen, mantan Bupati Lebak. Pembunuhan

tersebut mulai membuat Dewan Rakyat kehilangan pengikut-pengikutnya karena tindakan mereka yang dianggap berlebihan. Namun, Dewan terus berusaha menyingkirkan orang-orang pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 1945 Dewan menangkap Letnan Kolonel Entol Ternaja, Komandan Resimen III Divisi 1000/I dan Oskar Koesoemaningrat, Kepala Kepolisian Keresidenan Banten yang selanjutnya dibawa ke markas Dewan di Ciomas (Suharto, 2001: 122). Penangkapan kedua tokoh penting tersebut menjadi titik balik kerugian Dewan. Residen akhirnya bertindak dengan memerintahkan Kolonel K.H. Sjam'un sebagai Panglima Divisi 1000/I untuk menumpas Dewan Rakyat. Ali Amangku sebagai Komandan Batalyon Pengintai diminta untuk menyusun siasat penyerangan (Suharto, 2001, hlm. 122; Permana, 2004: 104).

Melihat kejadian itu, K.H. Sjam'un segera mengeluarkan surat perintah untuk menumpas gerakan Dewan Rakyat yang sangat anarkis ini. Yang tentunya surat perintah tersebut sesuai dengan persetujuan Residen KH TB Achmad Chatib. Dalam surat tersebut KH. Sjam'un menegaskan bahwa seluruh keresidenan Banten siap mempertahankan kedaulatan republik. Seluruh rakyat dan para ulama yang menduduki jabatan pemerintahan di Banten serempak berjuang mempertahankan kedaulatan Negara. K.H. Sjam'un juga menegaskan bahwa rakyat Banten adalah warga Negara RI yang hanya mengakui Presiden Sukarno sebagai pemimpin Negara Indonesia merdeka. (Soekarahardja, Lamp. II, hlm. 3; Soeharto, 2001: 115-117).

K.H. Sjam'un setelah mendapatkan instruksi dari Residen Banten K.H. TB. Achmad Chatib, agar menumpas gerakan Dewan

Rakyat ini yang telah menjadikan kekacauan di Keresidenan Banten. Dengan alasan karena Dewan Rakyat ini telah bertindak dengan menyingkirkan orang-orang yang dinilai sebagai “warisan kolonial” antara lain:

1. Pada tanggal 31 Desember 1945, Dewan menangkap Letnan Kolonel Entol Ternaja, Komandan Resimen III Divisi 1000/1, dan Oskar Koesoemaningrat, Kepala Kepolisian Keresidenan Banten. Keduanya diangkut ke markas Dewan Rakyat di Ciomas untuk diadili. (Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudori, 1993, hlm. 244-255).
2. Kemudian pada waktu yang bersamaan di Pandeglang terjadi pertempuran antara pendukung Dewan Rakyat melawan TKR setempat. Pertempuran itu terjadi karena pihak Dewan berusaha merebut senjata milik TKR.
3. Tanggal 2 Januari 1946, Dewan Rakyat di Rangkasbitung menuntut penggantian Bupati Lebak, K.H. TB. Abuhasan, dan menuntut sebuah pengangkatan direktorium untuk mengawasi semua bagian pemerintahan dan semua pasukan bersenjata (Suharto, 1996: 6).

Untuk menanggapi Dewan Rakyat ini langkah yang ditempuh oleh K.H. Sjam'un selaku ketua TKR Keresidenan Banten Divisi 1000/1, yaitu segera memanggil Ali Amangku, sebagai komandan batalyon pengintai, untuk menyusun siasat penumpasan. Setelah berunding dan menyepakati siasat yang akan dilakukan untuk menumpas Dewan Rakyat yang telah meresahkan masyarakat Banten, maka siasat demi siasat dilakukan. Langkah dimulai dari pembebasan tawanan yang didaulat oleh dewan

seperti Bupati Raden Aria Adipati Hilman Djajadiningrat¹⁴ dari penjara Serang yang tidak mengalami kesulitan, karena penjagaan Laskar Gulikut di tempat itu tidak begitu kuat, kemudian langkah berikutnya menyerang markas Dewan Rakyat di Ciomas yang pada tanggal 8 Januari 1946 pasukan TKR dari Serang, Pandeglang, dan Rangkasbitung serentak menyerang markas Dewan Rakyat. Pertempuran itu memakan waktu lebih dari 24 jam, dan baru berhenti sesudah adanya campur tangan pribadi Residen K.H. TB. Achmad Chatib. Letnan Kolonel Oskar Koesoemaningrat yang disekap di markas Dewan Rakyat dapat diselamatkan¹⁵.

Kejadian di Banten pada pertengahan bulan Oktober itu mendorong pemerintah pusat untuk menanganinya. Pada tanggal 9 Desember 1945 Presiden Soekarno dan wakil Presiden Muhammad Hatta beserta rombongan berangkat dari Jakarta ke Banten. Mereka merasa prihatin dengan aksi Tje Mamat yang banyak menculik orang-orang pemerintahan RI. Karena itu Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui tindakan yang dilakukan K.H. Sjam'un selaku TKR untuk menumpas Dewan

¹⁴ Raden Adipati Aria Hilman Djajadiningrat, lahir di Serang pada tahun 1896, selesai pendidikan di *Europesche Lagere School* (ELS). Ia melanjutkan ke *Hogere Burger School* (HBS). Karirnya dimulai sebagai Klerk (sejak 1917) kemudian meningkat sebagai Mantri polisi di Kabupaten Karawang (1920). Dua tahun kemudian ia menjadi Asisten Wedana Jatinegara, selanjutnya menjabat sebagai Wedana Jatibarang (1933), dan sejak tahun 1935 hingga 1945 menjadi Bupati Serang (Gunseikanbu, 1986:34).

¹⁵ Kejadian di Banten pada pertengahan bulan Oktober itu mendorong pemerintah pusat untuk menanganinya. Pada tanggal 9 Desember 1945 Presiden Soekarno dan wakil Presiden Muhammad Hatta beserta mereka merasa prihatin dengan aksi Tje Mamat yang banyak menculik orang-orang pemerintahan RI. Karena itu Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui tindakan yang dilakukan K.H. Sjam'un selaku TKR untuk menumpas Dewan. Lihat juga *Rakjat*, 13 Desember 1945, *Merdeka*, 13 Desember 1945).

Rakyat. Lihat juga (*Rakjat*, 13 Desember 1945, *Merdeka*, 13 Desember 1945).

Konsolidasi Kekuatan Masyarakat Banten Pasca Proklamasi

Di akhir Januari 1946 pendudukan kembali Jakarta oleh Belanda telah memaksa pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta hingga akhir revolusi. Di Sumatera ‘revolusi sosial’ menjadi sangat kejam di mana terjadi penentangan terhadap elit-elit aristokrasi. Di Aceh permusuhan antara ulama dan *uleëbalang* membuat perubahan besar dalam tingkatan elit (Ricklefs, 2001, hlm. 271).

Perpecahan di kalangan elit revolusioner di Jawa menjadi semakin nyata ketika partai-partai politik bermunculan. Sebuah kelompok informal dibentuk oleh Tan Malaka, mantan pemimpin PKI yang kembali secara diam-diam dari pengasingan di tahun 1942. Pada bulan Agustus 1945 ia mengungkapkan jati dirinya di Jakarta dan segera menarik bgeranyak pengikut. Tan Malaka kini mengabaikan ide-ide Stalinis dan justru ia membentuk apa yang disebut sebagai ‘komunisme nasional’, sebuah pandangan kiri yang dibentuk atas dasar ide bahwa Indonesia harus mencari jati dirinya sendiri untuk membentuk negara sosialis. Tan Malaka tidak pernah membentuk partai politik sendiri. Namun, ia diakui sebagai pemimpin kelompok organisasi dan tokoh-tokoh yang menentang elit politik Indonesia (Ricklefs, 2001: 272).

Di Banten, pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan daerah telah dijalankan oleh ulama dengan K.H. TB. Achmad Chatib, seorang ulama terkemuka memegang jabatan sebagai Residen Banten. Namun, Residen tetap mempertahankan wajah-

wajah lama di pemerintahan; di satu sisi mereka memang dianggap sebagai orang-orang yang paling mengerti tentang pemerintahan dan di sisi lain karena Banten kekurangan orang-orang yang memahami urusan pemerintahan. Dalam kenyataan di lapangan, kebijakan Residen tersebut tidak populer di mata masyarakat. Mereka menginginkan orang-orang baru karena para pamong praja lama dianggap sebagai kolaborator di masa lalunya, baik itu kolaborator Belanda ataupun kolaborator Jepang.

Sebagian jabatan di pemerintahan daerah, kepolisian, dan kejaksaan yang sebelumnya diduduki oleh orang-orang lama mulai digantikan oleh orang-orang baru melalui pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengangkatan tersebut biasanya dilakukan melalui rapat-rapat terbuka. Di luar tiga instansi di atas, pada umumnya penggantian pejabat tidak terjadi karena mereka dianggap tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, karena mereka tidak dianggap sebagai kolaborator musuh, dan juga karena memang hampir tidak ada orang-orang baru yang mampu menggantikan tugas mereka.

Pada umumnya penggantian jabatan-jabatan tersebut berlangsung dengan damai dan serentak. Namun, setelah Dewan Rakyat terbentuk, perubahan itu dilakukan dengan kekerasan. Setelah Dewan Rakyat dapat ditumpas, perubahan-perubahan jabatan kembali terjadi di seluruh kabupaten di Banten, dimana mayoritas kaum ulama duduk dalam pemerintahan.¹⁶

Naiknya kaum ulama dalam jajaran pemerintahan, dilihat dari latar belakang sejarah, merupakan kesempatan yang telah lama

¹⁶ Lihat Lampiran 2

mereka perjuangkan. Serangkaian perlawanan yang terjadi di daerah Banten sejak Kesultanan Banten dihapus oleh pemerintah kolonial, tujuan akhirnya adalah ingin tampilnya kembali kaum ulama dalam panggung pemerintahan. Mereka ingin menjadi tuan di rumah sendiri. Setelah Indonesia merdeka, kesempatan itu datang (Suharto, 2001: 125).

Di bidang politik, Banten yang ada di bawah pemerintahan kaum ulama, tetap merupakan bagian dari negara RI. Banten berdiri di belakang Presiden Sukarno dan siap mempertahankan kedaulatan RI. Sebagai konsekuensi dari sikap itu, pertahanan daerah Banten diperkuat untuk menangkal setiap usaha yang hendak mengganggu kedaulatan RI. Segenap rakyat Banten dalam keadaan siap. Di beberapa tempat diselenggarakan latihan militer. (Suharto, 2001: 127).

Di bidang keamanan, yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah adalah ancaman dari pada pengacau yang ada di daerah Keresidenan Banten dan ancaman dari tentara NICA yang datang dari sebelah timur daerah perbatasan Banten. Sebelum Dewan pimpinan Tje Mamat terbentuk dan beraksi pada pertengahan bulan Oktober 1945, keamanan boleh dikatakan dapat dipelihara dengan baik karena pengaruh ulama. Akan tetapi, setelah Dewan terbentuk dan beraksi, terjadilah kekacauan, perampasan dan perampokan. (Suharto, 2001: 127).

Sementara itu, pada tanggal 7 Januari 1946 TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (disingkat TKR juga) dan tidak lama kemudian nama itu diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Perubahan nama itu, yang diikuti dengan perubahan susunannya, menyebabkan nama

Komandemen I/Jawa Barat menjadi Divisi I/Siliwangi dan Divisi 1000/I Banten diubah menjadi Brigade I/Tirtayasa (Suharto, 2001: 129).

Tugas pemerintah daerah di bidang keamanan, selain menjaga keamanan di wilayah Keresidenan Banten dari gangguan pengacau, juga menjaga keamanan daerah Banten dari ancaman tentara NICA di sepanjang daerah perbatasan Banten dengan Keresidenan Jakarta Raya dan Keresidenan Bogor. Untuk menghadapi ancaman itu, pemerintah daerah menugaskan TRI dan badan-badan perjuangan. (Suharto, 2001: 129).

Setelah keadaan relatif tenang, pemerintah daerah membuat program untuk membangun daerah Banten, yaitu suatu keinginan yang sudah lama dipendam. Untuk itu atas usaha Residen, pada tanggal 8 September 1946 dibentuk sebuah panitia bernama Panitia Pembangunan Banten yang diketuai oleh Residen Banten, dibantu oleh beberapa orang antara lain H. Ajip Ismail. Panitia mempunyai tugas membersihkan, memperbaiki, dan memelihara bangunan-bangunan Banten kuno serta tanah-tanah wakaf kesultanan yang sejak tahun 1832 terlantar setelah Kesultanan Banten dikuasai Belanda (Suharto, 2001: 130).

Perkembangan yang terjadi di Banten diberitakan oleh radio NICA di Bandung bahwa Kesultanan Banten akan dupulihkan kembali. Residen disebut-sebut sebagai orang yang berhak menerima gelar sultan dan berupaya memisahkan diri dari negara RI. Selain itu diberitakan juga bahwa rakyat Banten tidak suka menerima uang RI (Suharto, 2001: 131).

Menanggapi perkembangan ini, pada akhir Oktober 1946, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Banten dan pada

awal bulan November 1946 Residen dipanggil pemerintah pusat di Yogyakarta untuk dimintai keterangan. Dalam kunjungan ke Banten, Hatta berpendapat bahwa daerah itu harus sungguh-sungguh diperhatikan oleh pemerintah pusat. Banten waktu itu ada di bawah pemimpin para kiai yang pada masa awal kemerdekaan dipatuhi oleh rakyat karena pengaruh mereka (Suharto, 2001: 131).

Residen sebagai Ketua Panitia Pembangunan Banten dalam kunjungannya ke Yogyakarta, di depan pemerintah pusat membantah berita-berita yang dikeluarkan oleh Belanda dan menegaskan bahwa Banten tetap ada di belakang pemerintah RI (Suharto, 2001: 132).

Namun, pemerintah tetap mencurigai keadaan di Banten. Melihat isyarat akan munculnya cita-cita kedaerahan itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta kembali mengunjungi Banten pada bulan Oktober 1946 untuk meninjau daerah itu dan menemui Residen Banten. Setelah mengetahui situasinya, pemerintah pusat, yang tetap mengkhawatirkan perkembangan di Banten, segera melakukan tindakan-tindakan baik di bidang politik maupun militer (Suharto, 2001: 136).

Dampak tindakan di bidang politik terutama menyangkut susunan pamongpraja di daerah itu telah dirasakan oleh rakyat Banten. Untuk membatasi ruang gerak Residen dan membantunya dalam menjalankan pemerintahan, pada bulan Desember 1946 diangkatlah Mr. Mas Joesoep Adiwinata sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat yang berkedudukan di Serang dan Semaoen Bakri sebagai Wakil Residen Banten (Williams, 1990: 306-307). Selain itu, kekuasaan kaum ulama dikurangi. Mereka

yang menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan secara berangsur-angsur digeser dan tempatnya diganti oleh pejabat profesional yang didatangkan oleh pemerintah pusat. Di bidang militer, pada waktu yang bersamaan dikirim ke Banten Letnan Kolonel Soekanda Bratamanggala untuk mengambil alih komando, menggantikan Kolonel K.H. Sjam'un yang semenjak bulan Januari 1946 merangkap sebagai Bupati Serang (Suharto, 2001: 136-137).

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat itu, pada awal bulan Januari 1947 dikirim pegawai-pegawai pemerintahan pusat ke Banten. Pada bulan Februari 1947 K.H. TB. Abdul Halim, Bupati Pandeglang, diberhentikan karena permintaan sendiri. Kedudukannya digantikan oleh M. Soedibja yang sebelumnya menjabat sebagai *Patih* Pandeglang. Dalam rangka profesionalisasi, kaum ulama yang menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan lambat laun dipindahkan ke instansi yang sesuai dengan bidang keahlian mereka, yaitu di Jawatan Agama, Jawatan Penerangan, dan atau di kantor kabupaten untuk belajar administrasi keparamongprajaan (Suharto, 2001:137-138).

Pemerintah makin lama makin banyak memindahkan para pejabat dari Priangan untuk bertugas di Banten, suatu kebiasaan yang membangkitkan dendam pada masa kolonial. Kehadiran kaum ulama di bidang pemerintahan pada awal masa revolusi memang betul-betul dikehendaki dan dibutuhkan oleh rakyat sehingga mereka dipatuhi. Akan tetapi, kemudian setelah mengetahui kinerja mereka, karena tidak adanya keahlian di bidang pekerjaan, rakyat merasa dirugikan, sehingga rakyat lambat laun kecewa. Rakyat menginginkan adanya perbaikan

kesejahteraan oleh karena itu mereka mengharapkan pamong praja yang profesional (Suharto, 2001: 138).

Secara umum, pada masa-masa tersebut di daerah lain terdapat kondisi di mana Angkatan Darat muncul sebagai kekuatan politik yang nampaknya sulit untuk dipersatukan. Perbedaan yang jelas dapat dilihat dari dua kelompok yang ada. Di satu sisi, mereka yang pernah tergabung dengan Peta dan *Heiho* memiliki semangat revolusioner dan terlatih untuk perang gerilya. Kelompok seperti ini identik dengan kelompok pimpinan Soedirman yang terpilih oleh angkatan bersenjata sebagai panglima besar pada bulan November 1945. Di sisi lain, mantan prajurit kolonial Belanda (yang berpandangan bahwa kekalahan Belanda pada tahun 1942 telah menganulir kewajiban mereka untuk setia kepada ratu Belanda) terlatih lebih baik untuk pekerjaan administrasi dan juga lebih profesional, tidak terlalu populis dan memiliki pandangan militer sejati. Orang-orang di dalam kelompok seperti ini di antaranya adalah Batak Muslim

A.H. Nasution (1918-2000) dan Batak Kristen T.B. Simatupang (1920-1990). Pemerintah pusat tidak mempercayai Soedirman dan cenderung untuk memilih kelompok kedua yang segera menguasai Departemen Pertahanan. Pada bulan Mei 1946 Nasution mengambil alih Divisi Siliwangi yang menjadi elemen utama Angkatan Darat. Ketidaksukaan Amir Sjarifuddin dan Sutan Sjahrir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan fasisme Jepang, dan juga harapan Amir untuk mempolitisasi kekuatan pemerintah bersama-sama garis Marxis, justru mendorong Soedirman dan para pengikutnya untuk berposisi terhadap pemerintah (Ricklefs, 2001 : 272-273).

Mendirikan Majelis Ulama di Banten tahun 1946

Salah satu kiprah KH. TB. Achmad Chatib yang tidak bisa dianggap remeh dan patut diapresiasi karena upayanya sangat orisinal dan sebuah tindakan pionir adalah mendirikan sebuah badan yang bernama Majelis Ulama. Lembaga ini didirikan olehnya pada tanggal 18 Januari 1946. Lembaga yang pengurusnya alim ulama dari Banten dan memiliki cabang hingga kawedanan

ini dibentuk untuk memberikan advis keagamaan kepada KH. TB. Achmad Chatib.

Perhimpunan ulama yang kemudian diberi nama: Majelis Oelama (M.O) Pusat Daerah Banten ini memiliki susunan pengurus sebagai berikut:

1. K.H. Jamhari : Ketua
2. K.A. Fatoni : Ketua Muda
3. K. Sapari : Penulis I
4. KH. Md. Hudari : Penulis II
5. KH. Udi : Bendahara

Dalam SK Residen Banten tanggal 18 Januari 1946, KH. TB. Achmad Chatib tidak hanya menetapkan struktur pengurus organisasi majelis ulama ini tetapi juga menetapkan AD/ART yang meniscayakan pendirian cabang dan ranting Majelis Ulama ini di tingkat kawedanan kota dan kawedanaan (desa) di seluruh Banten.

Mendukung Berdirinya Radio Perjuangan Banten tahun 1947

Sementara itu, pada tanggal 1 Maret 1947 di daerah ini diresmikan Pemancar Radio bernama "RADIO PERJUANGAN

BANTEN”, dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh TB. Saleh Ma’mun kemudian siaran dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Joesoef Adiwiguna dan disambut oleh Residen KH. TB. Achmad Chatib, yang menyatakan bahwa Banten kini dapat memperdengarkan suaranya. Pemancar tersebut ditempatkan di Kompleks Kantor Keresidenan Banten (*Soeara Merdeka*, 4 Maret 1947). Pemancar itu sangat bermanfaat, khususnya bagi Pemerintah Daerah Banten, yaitu untuk mengadakan hubungan dengan Pemerintah Pusat atau sebaliknya (Abdurahman, 1975:6). Peralatan pemancar radio itu diterima Pemerintah Daerah Banten pada akhir tahun 1946 dari Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Peralatan itu dibawa oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI).

Adapun pengurus Radio Perjuangan Banten adalah sebagai berikut, Ketua : TB.Soehari Chatib, Wakil Ketua A.M.Sadeli, Teknisi antara lain : Sjadeli dan Letnan Djarot. Sebenarnya pada bulan Desember 1945 di Banten telah berdiri Pemancar Radio, atas usaha rakyat dari bantuan berbagai pihak. Tampaknya pemancar ini yang kemudian ditingkatkan dengan diterimanya Pemancar dari Pemerintah Pusat, lalu Pemancar itu diresmikan dan diberi nama Radio Perjuangan Banten (Abdurahman, 1975:6).

Siap Mati Demi Mempertahankan Republik

Dalam menangkal fitnah yang sengaja dihembuskan oleh NICA bahwa K.H. TB. Achmad Chatib ingin memisahkan diri dari NKRI dengan membangkitkan kembali Kesultanan Banten, KH.TB. Achmad Chatib dengan tegas menyatakan kepada pers nasionalis di Jogjakarta bahwa Banten ada dibelakang Republik. Ia

juga menegaskan bahwa “*rakyat Banten telah bersumpah akan berdiri di belakang Presiden dari pada berpisah lebih baik mati. Dari pada menjadi budak lebih baik hancur lebur dalam perjuangan.*” (Merdeka, 7 November 1946) Ia menyangkal segala fitnah yang dengan sengaja dihembuskan musuh untuk memporakporandakan sendi-sendi persatuan RI.

Adalah benar bahwa KH. TB. Achmad Chatib telah membentuk sebuah Panitia Pembangunan Banten yang diketuai langsung olehnya sendiri dengan programnya memugar kembali Kota Banten Lama berikut pelabuhannya. Radio Resmi NICA di Bandung (Merdeka, 7 November 1946), yang disangkal oleh Residen Achmad Chatib dan Wakil Ketua KNID Keresidenan Banten sengaja menyebarkan fitnah keji bahwa Banten akan melepaskan diri dari Republik. Fitnah ini dengan sengaja disebarluaskan NICA untuk memecah belah persatuan Republik.

Menolak Keras Tentang Pendirian Negara Pasundan 1947

Setelah selesai urusan dengan Pemerintah Pusat yang menata Pemerintah Daerah, Banten diusik oleh Soeria Kartalegawa sehubungan dengan Proklamasinya. Dalam suatu rapat umum di Alun-alun Bandung pada tanggal 4 Mei 1947 Kartalegawa ingin mendirikan Negara Pasundan sebagai bagian dari Federasi Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Dalam kesempatan itu Soeria Kartalegawa menyinggung daerah Banten yang akan dimasukkan kedalam lingkungan negara yang akan ia dirikan itu. RA.Moehammad Moesa Soeria Kartalegawa adalah seorang bangsawan Sunda yang dilahirkan di Garut pada tahun 1897. Sebelum menjadi Bupati Garut, ia pernah menjabat sebagai

Wedana dan Patih. Setelah Indonesia Merdeka, pada tanggal 20 November 1946 ia mendirikan Partai Rakyat Pasundan.

Pemerintah RI menanggapi kebangkitan Partai Rakyat Pasundan (PRP) dan Proklamasi Kartalegawa dengan serentetan pernyataan yang menghukum gerakan itu. Tidak hanya Presiden Soekarno, tetapi juga tokoh-tokoh terkemuka Sunda seperti Mohammad Enoch dan keluarga mantan Bupati Bandung R.A.A. Wiranata Koesoemah, bahkan ibu dan anak perempuannya di Garut, semuanya berseru kepada rakyat Sunda untuk tidak menghiraukan Proklamasi itu.

Menanggapi proklamasi Soeria Kartalegawa itu segenap Partai Politik, Badan Perjuangan, wakil Jawatan Pemerintah dan Angkatan Muda di daerah Keresidenan Banten dalam rapatnya tanggal 5 Mei 1947 di Serang memutuskan menentang sekeras-kerasnya perbuatan Soeria Kartalegawa dan kawan-kawannya. Ditandaskan bahwa Rakyat Banten tetap setia kepada Pemerintah RI dan siap untuk mempertahankan Negara Kesatuan RI (*Berita Indonesia*, 7 Mei 1947).

Mathlaul Anwar, suatu perkumpulan yang didirikan tahun 1914 dan bergerak di bidang Pendidikan, dalam kongresnya ke-6, yang diadakan di Menes tanggal 6-7 Mei 1947 yang dihadiri oleh

67 Cabang, menolak Gerakan Soeria Kartalegawa. Pada tahun 1947 MA mempunyai 71 Cabang dan mempunyai 167 Madrasah yang tersebar di Seluruh Banten (*Antara*, 9 April 1947). Dalam kesempatan itu Residen Banten KH. TB. Achmad Chatib antara lain mengatakan bahwa pemerintahan Soeria Kartalegawa itu tidak ada. K.H. TB. Achmad Chatib tidak menyukai adanya pemerintahan Sultan dan Raja di Banten, karena daerah itu tetap

bersatu dengan Pemerintah RI. Dalam kesempatan itu juga Wakil Gubernur Jawa Barat, Joesoep Adiwinata, mengupas proklamasi Soeria Kartalegawa yang membawa-bawa K.H. TB. Achmad Chatib. Ia mengabaikan apa yang dilakukan oleh Kartalegawa (*Antara, 8 Mei 1947*).

Terhadap Pemerintah Pusat, Residen K.H. TB. Achmad Chatib menyatakan sikapnya. Dalam kawatnya yang dikirimkan kepada Presiden RI, ia menyatakan sikapnya yang tegas bahwa ia memprotes keras perbuatan Soeria Kartalegawa yang telah membawa-bawa namanya dalam gerakannya. Ia menentang sekuat-kuatnya adanya *monarki* dan *provinsialisme*. Pendirian itu adalah dasar perjuangannya selama 30 tahun lebih. Sebagai seorang *Republikan* ia melawan siapapun yang berideologi penjajah dan memecah belah kesatuan RI (*Merdeka, 10 Mei 1947*).

Rapat “*raksasa*” yang diadakan di alun-alun Rangkasbitung tanggal 11 Mei 1947 yang dikunjungi oleh ribuan orang dari berbagai lapisan, menentang sekeras-kerasnya tindakan Soeria Kartalegawa. Rapat menyatakan kesetiannya kepada Pemerintah RI dan Presiden Soekarno (*Merdeka, 12 Mei 1947*). Sementara itu, di Serang juga diadakan Rapat serupa yang juga menyatakan menentang pemecahan RI oleh Belanda. Seperti pernyataan dalam rapat di Rangkasbitung, rapat di Serang juga menyatakan berdiri di belakang Presiden Soekarno (*Merdeka, 14 Mei 1947*).

Usaha pembedahan Negara Pasundan oleh Soeria Kartalegawa gagal. Namun usaha itu oleh Belanda terus dilakukan dengan cara lain yaitu mengadakan konfrensi-konfrensi di Jawa Barat (Konfrensi Jawa Barat Pertama, 12-19 Oktober 1947 dan Konfrensi Jawa Barat Kedua, 15-20 Desember 1947). Dalam

konfrensi tersebut, daerah Banten yang diharapkan bergabung, belum pernah mengirinkan wakilnya (*Sin Po*, 22 Desember 1947). Banten tidak akan mengirinkan wakilnya ke konfrensi yang tidak disetujui tujuannya itu, begitu kiranya pendirian K.H. TB. Achmad Chatib.

Mendukung Penuh Pembentukan Brigade I/Tirtayasa

Dalam bidang militer, TKR mengalami perubahan nama pada tanggal 7 Januari 1946. Namanya diganti menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang singkatannya tetap TKR. Nama Kementrian juga mengalami pergantian yaitu dari Kementrian Keamanan Rakyat diganti menjadi Kementrian Pertahanan. Pada tanggal 25 Januari 1946 nama Tentara Keselamatan Rakyat diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI disusun atas dasar militer internasional. Susunannya diperbaiki atas dasar dan bentuk ketentaraan yang sempurna (Suharto, 2001 : 145).

Sebagai tindak lanjut dari hasil kerja panitia, Komandemen I/Jawa Barat yang mempunyai tiga divisi dihapus, dan diganti dengan Divisi I/Siliwangi yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Mayor A.H. Nasution. Wilayahnya meliputi Provinsi Jawa Barat dikurangi Keresidenan Cirebon dan Kabupaten Tasikmalaya. Divisi ini mempunyai lima brigade yaitu Brigade I/Tirtayasa, Brigade II/Suryakencana, Brigade III/Kian Santang, Brigade IV/Guntur, dan Brigade V/Sunan Gunung Jati (Suharto, 2001: 147-148).

Sehubungan dengan reorganisasi itu, pada bulan Juli 1946 Divisi 1000/I dihapus, lalu dibentuk satu brigade bernama Brigade I/Tirtayasa yang wilayahnya meliputi Keresidenan Banten

ditambah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Kolonel K.H. Sjam'un, mantan Panglima 1000/I tetap menjabat sebagai pimpinan yakni sebagai komandan brigade (Suharto, 2001 : 148). Susunan pimpinan Brigade Tirtayasa selengkapnya adalah sebagai berikut:

Komandan	Kolonel K.H. Sjam'un
Kepala Staf	Letnan Kolonel Agoes Djajaroekmantara
Kepala Bagian I	Kapten Soepartawidjaja
Kepala Bagian II	Letnan Satu Hanafi Soetalaksana
Kepala Bagian III	Kapten TB. Halami
Kepala Bagian IV	Letnan Satu M. Sani

Pada waktu yang sama, Juli 1946, perkembangan politik di pusat berlangsung sangat cepat. Belanda meneruskan usaha mereka untuk membentuk negara serikat. Pada bulan Juli 1946 mereka meorganisasi konferensi di Malino, Sulawesi Selatan di mana sekitar 39 perwakilan raja-raja, orang-orang Kristen dan beberapa kelompok etnis dari Kalimantan dan Indonesia Timur mendukung ide negara serikat dan ikatan dengan Belanda. Namun, Belanda terkejut karena orang-orang Indonesia juga mengharapkan otonomi (Ricklefs, 2001 : 275).

Pada bulan November 1946 Belanda akhirnya mengakhiri persetujuan diplomatik pertama dengan Indonesia. Inggris telah memaksakan beberapa persetujuan sebelum menarik kekuatan mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember 1946. Pada bulan Oktober perundingan telah dimulai dan gencatan senjata

disetujui di Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 12 November di Linggarjati (dekat Cirebon) Belanda mengakui pemerintah republik sebagai penguasa *de facto* di Jawa, Madura dan Sumatera di mana kedua pihak setuju untuk bekerjasama dalam pembentukan (sebelum 1 Januari 1949) Negara Republik Indonesia Serikat di mana pemerintah republik akan menjadi salah satu negara bagian dan ratu Belanda menjadi kepala negara persatuan Belanda-Indonesia atas negara-negara bagian yang berdaulat. Perjanjian perdamaian ini hanya bertahan sebentar. Kedua pihak tidak percaya satu sama lain dan ratifikasi perjanjian memprovokasi kontroversi politik mengenai konsesi yang telah dibuat (Ricklefs, 2001: 275).

Belanda kini menyadari bahwa negara serikat bukanlah solusi yang mudah untuk dilaksanakan. Di akhir bulan November 1946 posisi mereka di Sulawesi Selatan terancam oleh para pemuda yang baru kembali dari Jawa. Belanda merespon pada bulan Desember dengan membawa salah seorang tokoh paling ditakuti pada masa revolusi, Kapten Raymond 'Turk' Westerling. Metodenya menggunakan teror segera diikuti oleh kelompok-kelompok anti pemerintah di Sulawesi Selatan. Dalam jangka waktu tiga bulan setidaknya 3.000 orang Indonesia diperkirakan terbunuh oleh metode teror tersebut. Di Bali tidak kurang dari 1.500 pejuang republik terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih profesional dan kelompok-kelompok yang lebih revolusioner, seiring dengan perbedaan garis kasta. Pada bulan November 1946 kelompok militer yang lebih profesional yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai disapu bersih oleh Belanda. Hal ini mengakibatkan kelompok pro-republik di Bali berada di

tangan pemimpin-pemimpin politik yang lebih muda dari kasta yang lebih rendah (Ricklefs, 2001: 275-276).

Belanda meneruskan usahanya untuk membentuk negara serikat. Negara Indonesia Timur dibentuk di Denpasar pada bulan Desember 1946. Perkembangan-perkembangan seperti ini hanya membuat ketidakpercayaan pemerintah republik dan ketidaksukaan terhadap perjanjian Linggarjati semakin besar (Ricklefs, 2001: 276).

Dalam perkembangan militer di Jawa Barat dan Banten, sampai dengan bulan Desember 1946 peleburan dan rasionalisasi batalyon-batalyon lama belum dapat ditangani sampai menjadi batalyon tempur yang bermutu. Oleh karena itu, Panglima Divisi I/Siliwangi, Jenderal Mayor A.H. Nasution, mengangkat Letnan Kolonel Soekanda Bratamenggala menjadi Komandan Brigade Tirtayasa menggantikan Kolonel K.H. Sjam'un yang merangkap sebagai Bupati Serang. Pengiriman Letnan Kolonel Soekanda Bratamenggala bersama pasukan dan senjata ke Banten dengan pertimbangan bahwa Banten pada suatu saat akan berdiri sendiri dalam menghadapi Belanda. Oleh karena itu, Panglima Divisi I/Siliwangi A.H. Nasution perlu mengisi kekurangan. Letnan Kolonel Soetalaksana, bekas Kepala Staf, ditarik ke Markas Divisi I/Siliwangi agar ada orang yang mengerti seluk beluk Banten. Ia juga ditugaskan sebagai penghubung dengan Gubernur Jawa Barat (Suharto, 2001: 148-149).

Sebelum Letnan Kolonel Soekanda Bratamenggala menggantikan Kolonel K.H. Sjam'un, keberangkatannya ke Banten pada pertengahan bulan Februari 1947 membawa satu batalyon pasukan yang bersenjata lengkap dan satu kompi

detasemen markas sebagai pasukan pendobrak yang mempunyai perlengkapan dan pakaian seragam lebih baik dari pada anggota tentara Banten. Kedatangan pasukan baru itu mengakibatkan timbulnya beberapa sentimen karena pasukan pendatang itu merasa dirinya lebih pintar dan sebagainya. Rakyat Banten sejak zaman Belanda memang tidak begitu cocok dengan rakyat Priangan yang banyak menjadi pamong praja dan pegawai lainnya di Banten. Bulan berikutnya, Maret 1947 Letnan Kolonel Soekanda Bratamenggala resmi menggantikan Kolonel K.H. Sjam'un menjadi Komandan Brigade Tirtayasa (Suharto, 2001: 149-150).

Pada akhir bulan Maret 1947 Soekanda melaksanakan reorganisasi secara drastis. Batalyon-batalyon yang semula sebanyak enam buah, ditambah tiga kompi yang dibawanya dari Tasikmalaya, dijadikan empat batalyon dan satu kompi *stoottroep* Detasemen Brigade. Kesatuan resimennya (tiga resimen) dihapus dan jumlah batalyon yang semula sebanyak tujuh, tidak termasuk satu Batalyon Pengintai, dijadikan empat batalyon. Keempat batalyon itu adalah sebagai berikut. Batalyon I bermarkas di Balaraja dan teritorialnya di Balaraja dan Tangerang Barat; Batalyon II bermarkas di Cikande dan teritorialnya Kabupaten Serang; Batalyon III bermarkas di Pandeglang dan teritorialnya di Kabupaten Pandeglang; dan Batalyon IV bermarkas di Rangkasbitung serta teritorialnya Kabupaten Lebak dan Bogor Barat. Akibat pengurangan itu, banyak perwira senior dari Banten yang tidak mendapat jabatan dan ada perwira anggota yang tidak ditempatkan dalam formasi (Suharto, 2001: 151).

Dampak reorganisasi yang berakibat adanya rasionalisasi yang dilaksanakan secara drastis itu menimbulkan rasa tidak puas

pada beberapa perwira Banten yang tersisih. Hal ini sampai tersebar di kalangan rakyat, yang kemudian dimanfaatkan oleh golongan radikal dari bekas anggota Dewan pimpinan Tje Mamat yang mulai tampak kegiatannya. Desas-desus yang menjurus pada sentimen kedaerahan dilancarkan baik oleh kalangan tertentu maupun oleh Belanda. Terdapat poster-poster yang antara lain berbunyi “Banten dijajah Priangan”, “K.H. Sjam’un kuda tunggangan Bratamengala”. Didesas-desuskan pula bahwa perwira-perwira Banten dianggap orang-orang bodoh dan bahwa senjata-senjata yang dibawa oleh rombongan Soekanda Bratamengala sebetulnya untuk keperluan keseluruhan brigade dan bukan untuk pasukan-pasukan bawanya sendiri (Suharto, 2001: 151-152).

Di luar kesatuan organik TRI, di teritorial Brigade Tirtayasa terdapat beberapa kesatuan anorganik, di antaranya Polisi Tentara (PT), TKR Laut, laskar, dan badan-badan kesatuan perjuangan.

Batalyon Pengintaian Polisi Tentara Divisi 1000/I setelah reorganisasi tidak lagi menjadi kesatuan organik dari Brigade Tirtayasa, melainkan menjadi kesatuan anorganik karena seluruh Polisi Tentara di Pulau Jawa menjadi satu divisi, yaitu Divisi Polisi Tentara. Pimpinan tertinggi ada di Markas Besar Polisi Tentara (MBPT). Batalyon Pengintai/Polisi Tentara Divisi 1000/I menjadi Batalyon XI Polisi Tentara yang langsung di bawah MBPT (Suharto, 2001: 153).

Sehubungan dengan reorganisasi tentara, kedudukan laskar-laskar dan badan-badan ketentaraan yang bukan badan pemerintah juga diatur. Setelah TKR berubah menjadi TRI, mulai bulan Mei 1946 laskar-laskar mulai membenahi diri untuk mengasramakan laskarnya. Para anggota laskar dilatih kemiliteran oleh

pemimpinnya yang berpendidikan militer dari kalangan mereka sendiri atau meminta bantuan instruktur dari Batalyon TRI atau Polisi Tentara. Kemudian, keberadaan dan kehidupan laskar-laskar dan badan-badan perjuangan diatur melalui Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.19 tahun 1946 yang ditetapkan tanggal 19 September 1946 (Suharto, 2001: 155).

Adanya dua macam pasukan bersenjata, yaitu TRI dan badan-badan perjuangan sebagai kekuatan rakyat tidak menguntungkan perjuangan. Pemerintah berusaha untuk menyatukannya. Sehubungan dengan itu pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang isinya mempersatukan TRI dan laskar-laskar ke dalam satu organisasi tentara nasional, menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelaksanaan penyatuan diserahkan kepada panitia yang diketuai oleh Presiden RI. Sebagai pelaksana ketetapan ini, di Banten pada tanggal 10 Mei 1947, atas usaha Biro Perjuangan Daerah Banten diresmikan satu resimen yang menghimpun laskar-laskar yang ada di sana. Resimen itu diberi nama Resimen Singandaru. Resimen tersebut bermarkas di kompleks kantor Biro Perjuangan Daerah XXXV dan berkekuatan empat batalyon. Batalyon I berkedudukan di Nanggung, Leuwiliang, yang berasal dari Hizbullah Leuwiliang; Batalyon II berkedudukan di Kragilan, Serang yang berasal dari Sabilillah Kabupaten Serang; Batalyon III berkedudukan di Pandeglang yang terdiri dari laskar-laskar di Kabupaten Pandeglang, yaitu Hizbullah, Sabilillah, Pesindo, BPRI, dan Barisan Banteng; dan Batalyon IV berkedudukan di Ciomas terdiri dari Laskar Rakyat yang kebanyakan terdiri dari jawara yang dipimpin oleh H. Djambara. Resimen Singandaru secara organik

dan administratif dimasukkan ke dalam Brigade Tirtayasa. Namun, Batalyon IV menolak, karena tidak mau menjadi tentara resmi. Batalyon II dipecah menjadi regu-regu dan dimasukkan ke satuan-satuan lain, sehingga hanya Batalyon I yang secara utuh masuk Brigade Tirtayasa menjadi Batalyon V (Suharto, 2001:156-157).

Mengatasi Kebutuhan Hidup Masyarakat Banten

Di luar Banten, situasi berkembang menjadi sangat rumit. Di sekitar akhir Mei 1947 Belanda telah memutuskan bahwa mereka harus menyerang Indonesia secara langsung. Biaya untuk militer Belanda sebanyak kurang lebih 100.000 tentara akan menjadi terlalu besar jika mereka tidak memiliki tugas perang. Untuk mempertahankan kekuatan bersenjata tersebut, Belanda harus memiliki akses terhadap produk-produk dari Jawa, terutama gula dan Sumatera, terutama minyak dan karet. Belanda yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pemerintah republik akan dapat dikuasai dalam waktu dua minggu, sedangkan seluruh wilayah Indonesia akan dapat dikuasai dalam waktu enam bulan (Ricklefs, 2001 : 276).

Tengah malam tanggal 20 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer I. Bagian besar pasukan dari Jakarta dan Bandung bertugas untuk menguasai Jawa Barat (tidak termasuk Banten) dan dari Surabaya untuk menguasai Madura dan daerah Tapal Kuda. Bagian pasukan yang lebih kecil bertugas menguasai Semarang. Belanda kemudian mengambil alih kontrol seluruh pelabuhan laut dalam di Jawa. Di Sumatera, perkebunan di sekitar Medan, pertambangan minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang juga dikuasai. Kekuatan pemerintah republik mundur

dalam kebingungan di mana mereka menghancurkan apa yang mereka bisa hancurkan. Di beberapa daerah tindakan balas dendam dilakukan: orang-orang Cina di Jawa Barat dan aristokrasi yang dipenjara dibunuh. Beberapa orang Belanda, termasuk Van Mook ingin meneruskan agresi untuk menaklukkan Yogyakarta, tetapi Amerika Serikat dan Inggris tidak menyukai agresi militer tersebut dan memaksa Belanda menghentikan aksinya (Ricklefs 2001: 276-277).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini terlibat secara langsung dalam konflik yang terjadi; keterlibatan yang pada akhirnya akan menjebak Belanda ke dalam posisi diplomatik yang tidak menguntungkan. India dan Australia sangat aktif dalam mendukung pemerintah republik di PBB di mana Uni Soviet juga menawarkan bantuannya. Namun, peranan paling penting dimainkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda merasa yakin bahwa sejarah dan logika umum memberikan mereka hak untuk menentukan perkembangan Indonesia. Namun, hak ini hanya bisa dijalankan dengan terlebih dahulu menghancurkan pemerintah republik. Sekutu-sekutu utama Belanda, terutama Inggris, Australia dan Amerika Serikat tidak mengakui hak seperti itu kecuali jika masyarakat Indonesia mengakuinya, yang sudah jelas tidak akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia jika Belanda menggunakan kekuatan militer. Mereka mulai menekan Belanda untuk mengadopsi pandangan yang tidak terlalu kaku. PBB menjadi pengawas dalam

hal ini, dan ini membuat Belanda semakin cenderung untuk mencari solusi yang tepat di Indonesia (Ricklefs, 2001: 277).

Di akhir bulan Juli 1947 Belanda merasa bahwa mereka

harus menerima seruan PBB untuk gencatan senjata. Pada bulan Oktober terbentuk sebuah komite yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia dan Belgia untuk membantu perundingan antara Belanda dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata yang baru. Sejak Agustus Belanda telah meneruskan operasi penyapuan di belakang titik-titik terdepan mereka di mana pejuang-pejuang republik tetap berada. Secara khusus, Divisi Siliwangi masih berada di belakang garis Belanda di Jawa Barat (Ricklefs 2001: 277).

Agresi militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda menyebut Agresi Militer I dengan "*politioele actie*", yang artinya Belanda datang ke wilayah RI bertugas untuk mengatur ketertiban dan keamanan seperti "tindakan kepolisian" karena Belanda masih merasa bahwa Indonesia masih menjadi miliknya. Hal ini diikuti dengan serangan-serangan (agresi) tentara Belanda ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia baik di Jawa maupun di Sumatera dengan mengerahkan Angkatan Darat, Laut dan Udaranya. Bangsa Indonesia menamakannya Agresi militer Belanda I dengan perang kemerdekaan I, karena pihak Belanda dianggap sebagai pihak penyerang (agresor) untuk menggagalkan atau tidak mengakui proklamasi kemerdekaan RI. Tujuan agresi tidak lain adalah untuk mematahkan perlawanan RI dan menguasai Indonesia kembali di bawah kekuasaan Belanda.

Pada masa Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947, Banten diblokade. Blokade ini membuat Banten menjadi daerah yang tertutup. Belanda menjaga ketat daerah perbatasan terhadap arus orang dan barang kebutuhan sehari-hari yang masuk dan keluar daerah Banten. Pihak RI yang menjaga di perbatasan itu

juga melakukan hal yang sama. Blokade ini mempunyai dampak yang luas bagi Banten. Akibat Blokade itu, beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang biasanya didatangkan dari luar daerah Banten, misalnya Jakarta, semakin sulit diperoleh, akhirnya harga membumbung tinggi (Mang Eri Soedewo, 1949: 118; Suharto, 1996: 6).

Blokade ini membuat Banten menjadi daerah yang tertutup. Belanda menjaga ketat daerah perbatasan terhadap arus orang dan barang kebutuhan sehari-hari yang masuk dan keluar daerah Banten. Pihak RI yang menjaga di perbatasan itu juga melakukan hal yang sama. Dengan penjagaan yang ketat tersebut, maka untuk masuk ke Banten dan sebaliknya tidak mudah, bahkan berbahaya. Bagi orang yang mengetahuinya, mereka dapat masuk atau keluar Banten dengan melalui suatu daerah tidak bertuan antara desa Betung (di daerah pendudukan Belanda) dan desa Cikupa (desa yang masih dikuasai RI). (*Madjallah Merdeka*, no. 21. Th. 1, (5 Juni 1948: 5).

KH. TB. Achmad Chatib pada agresi pertama Belanda, ia masih menjabat sebagai Residen Banten, bersama-sama pejabat dengan instansi dan masyarakat berusaha mengatasi kebutuhan hidup masyarakat Banten, dengan mendorong masyarakat agar membuat barang tertentu dan menggunakan barang-barang lain sebagai pengganti, ada pula beberapa barang yang diperoleh dengan cara mencari dan membelinya di luar daerah Banten. Dalam keadaan yang sulit berbagai cara dilakukan oleh pemerintah daerah Banten untuk mengatasinya antara lain seperti, mengeluarkan aturan terhadap penjualan barang-barang yang dihasilkan daerah Banten. Orang Banten dibolehkan membawa

keluar hasil-hasil Banten dalam jumlah tertentu, untuk menghindari habisnya persediaan. Dalam hubungan ini pemerintah daerah membentuk polisi ekonomi (Suharto, 1996:22). Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat membuat beberapa jenis barang yang antara lain bensin, vaselin, granat, garam, minyak tanah, sabun dan obat-obatan yang mutunya lebih rendah.

Untuk mendapatkan bensin, suatu komoditi vital, orang membuat bensin sendiri dari karet, dengan proses destilasi. Beberapa orang cerdas dan penuh akal dibawah Kapten Widodo berhasil merekayasa bensin terbuat dari karet (Eri Soedewo, 1949:118). Untuk membuat vaselin orang membuatnya dari kelapa sawit (Matia Mudjah, 1995:124). Untuk membuat granat dan mortir, pabrik minyak kelapa "Mee Olie" di Rangkasbitung merupakan salah satu produsen mortir, akan tetapi karena mortir itu tidak dilengkapi alat pengontrol, setelah digunakan beberapa kali pelurunya tidak terlontar, dan meletus di dalam tabung. Selain itu dipabrik itu dibuat ranjau darat, bom tarik, dan granat bambu (Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudori, 1993:283- 285). Untuk garam dapur, dibuat sendiri dari air laut di Pantai Selatan dengan menggunakan seng-seng sebagai tempat penggodog untuk mendapatkan endapan garam. Untuk pengganti minyak tanah yang digunakan sebagai lampu penerangan, orang menggunakan minyak sawit. Untuk sabun cuci orang menggunakan buah kelerak. Ada juga orang yang mendirikan perusahaan sabun yang menggunakan peralatan sederhana. Untuk obat-obatan diperoleh dengan membuat sendiri beberapa jenis obat, seperti obat batuk dibuat dari daun sirih, bubuk kina dibuat dari kulit kina, obat

buduk dibuat dari belerang yang dicampur minyak kelapa sawit. Perban dibuat dari kulit pohon pisang bagian dalam, vaksin cacar dibuat oleh dr. Satrio (pejabat bagian kesehatan Brigade Tirtayasa). (Mudjiah, 1995: 203-205)

Mencetak Uang Republik Indonesia Daerah Banten

Untuk mengatasi sulitnya masuk Uang Republik Indonesia (ORI), ke daerah Banten, uang kertas dibuat sendiri atas izin pemerintah pusat, uang itu bernama ORIDAB (Uang Republik Indonesia Daerah Banten). Pengeluaran uang itu didasarkan jaminan emas dari Cikotok. Pembuatan mata uang itu dilakukan setelah pemerintah daerah Banten tidak dapat membayar gaji pegawai. Pemprakarsa pembuatan uang tersebut adalah pembantu Gubernur Mr. Joesoep Adiwinata dan R. Lumanauw, Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Keresidenan Banten. Setelah dipersiapkan selama dua bulan sejak bulan september 1947, dengan menggunakan peralatan yang sederhana pada bulan Desember 1947 beredarlah ORIDAB yang pertama dari kertas Rp 10,- dan Rp 5,-.¹⁷

Pembuatan mata uang ORIDAB dilakukan oleh pemerintah daerah Banten dan dilaksanakan secara gotong-royong. Alat yang digunakan berupa alat cetak sederhana maka uang tersebut dapat diperbanyak dengan jumlah yang tidak diketahui. Cara pembuatannya, sebelum uang tersebut dicetak terlebih dahulu dibuat gambar yang akan ditampilkan. Gambar tersebut dibuat oleh E. Edel Yusuf di Serang. Klisanya dibuat oleh M. Ruyani dan

¹⁷ Emisi pertama ORIDAB tertanggal 1947

Dana, kedua-duanya di Kecamatan Petir, bahan klise tersebut dari kayu sawo, kecuali untuk pecahan 100 rupiah dibuat dari timah. Mesin cetak pembuatan uang tersebut sampai sekarang disimpan di Museum Banten Lama. Percetakan ORIDAB dilaksanakan di Jalan Diponegoro No. 6 Serang. Pemilik percetakan bernama Abdurrojak. Percetakan uang dipimpin oleh R. Abubakar Winangun M. Sastra Atmadja, Abdurrojak, dan M. Solihin. Pejabat penerima, penyimpan, dan pengedaran uang kertas adalah M. Ismail. Mereka diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pejabat Keuangan Dewan Pertahanan Daerah Banten No. UU/94 tanggal 26 Mei 1948. Ahli dan karyawan percetakan berjumlah 11 orang, lima orang di antaranya yaitu Muhamad Jupri, Suparman, Muhamad Tohir, Senen, dan Sanah. Pada tahun 1948 ORIDAB ditandatangani oleh K.H. TB. Achmad Chatib dan Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Pejabat Keuangan Dewan Pertahanan Daerah Banten. KH. TB. Achmad Chatib yang menjabat sebagai Residen Banten bercita-cita untuk menyejahterakan rakyatnya (Lismiyati, 2012, Online).

Blokade Belanda yang ketat terhadap Banten sejak dilancarkan aksi militer pertama, membuat daerah ini terkucil dan terasing dari pemerintahan pusat yang berkedudukan di Yogyakarta maupun propinsi Jawa Barat yang untuk sementara ada di Tasikmalaya. Satu-satunya sarana komunikasi adalah lewat radio, yang dioperasikan oleh empat orang pejuang yang datang dari Bandung bersama-sama Mr. Joesoep Adiwinata. Mereka dipimpin oleh Letnan Nawawi Alif¹⁸, tinggal bersama keluarga Adiwinata, dan stasiun radio inipun dioperasikan di rumah

¹⁸ Letnan Nawawi Alif, pernah menjadi ketua DPRD Jawa Barat.

kediaman Adiwinata (Eri Soedewo, 1990: 119).



Dari kiri ke kanan: Dr. Sukiman, Pengamat Militer PBB dari Australia, Achmad Chatib, Kolonel Sukanda dan Jusupadi Adiwinata (sumber: Banten in time revolution, Archipel vol 50)

Bergerilya Menghadapi Agresi Militer Belanda II

Pada bulan Januari 1948 sebuah perjanjian baru berhasil dicapai di kapal Amerika Serikat USS Renville di Jakarta. Perjanjian ini mengakui gencatan senjata di sepanjang 'Garis Van Mook', sebuah garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan Belanda di samping fakta bahwa banyak wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah republik tetap berada di belakang. Walaupun perjanjian ini nampak seperti sebuah kemenangan diplomatik Belanda, alasan utama pemerintah republik menerima perjanjian ini (salah satu penyebabnya adalah karena pihak republik kekurangan amunisi) rupanya berhasil mendapatkan niat

baik Amerika Serikat (Ricklefs, 2001: 277).



Penandatanganan Perjanjian Renville antara Belanda dengan Indonesia pada tanggal 17 Januari 1948
(sumber: <https://olympics30.com>)

Sementara itu, Belanda mendirikan negara-negara serikat dengan cepat. Pada bulan Desember 1947 mereka mendirikan Negara Sumatera Timur, Februari 1948 Negara Madura dan Negara Pasundan, September 1948 Negara Sumatera Selatan, November 1948 Negara Jawa Timur dan hingga akhirnya terbentuk lima belas negara bagian di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Namun, di dalam negara-negara ini terdapat sentimen pro-republik di antara para elit dan bahkan sebenarnya hanya sedikit masyarakat yang mendukung negara serikat. Oleh karena itu, Belanda terpaksa terdorong untuk melaksanakan solusi militer kembali (Ricklefs, 2001: 278).

Kondisi di dalam negara republik di Jawa menjadi sangat

kacau. Ketika inflasi dan harga beras naik, pendapatan petani meningkat dan banyak hutang mereka terbayarkan, sedangkan pendapatan orang-orang kaya justru menurun drastis. Pergerakan militer sementara itu harus dilakukan. Sesuai dengan perjanjian Renville, Kolonel Nasution memimpin 22.000 prajurit Divisi Siliwangi berhijrah dari Jawa Barat ke daerah republik di Jawa Tengah pada bulan Februari 1948. Hal tersebut memberikan dampak penting baik di daerah yang mereka tinggalkan maupun di daerah yang mereka masuki (Ricklefs, 2001 : 278-279).

Hijrahnya Divisi Siliwangi ke Jawa Tengah memiliki konsekuensi penting bagi revolusi. Nasution dan para prajurit Sundanya membentuk kekuatan yang setia kepada Hatta yang pada akhirnya berposisi dengan pasukan Jawa yang memihak kepada Soedirman atau Amir Sjarifuddin. Hatta ingin mengurangi angkatan bersenjata yang berjumlah sekitar 350.000 pasukan tetap dan sekitar 470.000 sukarelawan. Nasution juga lebih menyukai angkatan bersenjata yang lebih ramping dengan profesionalisme yang tinggi. Ketika militer terpecah menjadi beberapa faksi, penculikan, pembunuhan dan perseteruan bersenjata mulai terjadi di Yogyakarta dan Surakarta. Di akhir Agustus 1948 perang saudara nampaknya menjadi nyata. Kini ada banyak manuver-manuver politik, politik militer dan ketegangan massa di Jawa Tengah, sedangkan Belanda bersiap-siap di Jawa bagian barat, utara dan timur (Ricklefs, 2001 : 280).

Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua yang membuktikan bahwa hal tersebut merupakan sebuah malapetaka militer dan politik walaupun nampaknya agresi tersebut akan menghasilkan kemenangan yang mudah. Pada

tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemerintah republik membiarkan diri mereka jatuh ke tangan Belanda dengan harapan agar opini dunia memihak kepada Indonesia. Sukarno, Hatta, Agus Salim (Menteri Luar Negeri) dan seluruh anggota kabinet kecuali yang sedang tidak berada di tempat ditangkap, begitu juga Sjahrir. Tentara republik tidak dapat memahami alasan menyerahnya politisi-politisi ini padahal mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk republik (Ricklefs, 2001 : 282).

Kekuatan republik mundur ke pedalaman dan mulai melakukan perang gerilya. Pasukan bersenjata mundur dari Yogyakarta pada malam 19/20 Desember. Di akhir Desember seluruh kota-kota utama di Jawa dan Sumatera jatuh ke tangan Belanda. Satu-satunya wilayah yang tetap berada di tangan republik adalah Aceh di mana Daud Beureu'eh berkuasa (Ricklefs, 2001: 282).

Belanda menyadari bahwa kampanye militer mereka menciptakan masalah di belakang. Masyarakat sipil Indonesia sama sekali tidak menyukai jika diajak bekerjasama. Belanda berusaha membujuk Sultan Hamengkubuwana IX untuk menjadi pemimpin negara Jawa. Namun, ia menolaknya. Kabinet pemerintahan di Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan memprotes tindakan agresi militer dengan cara mengundurkan diri (Ricklefs, 2001: 283).

Belanda menerima seruan PBB untuk melaksanakan gencatan senjata pada tanggal 31 Desember 1948 di Jawa dan 5 Januari 1949 di Sumatera, tetapi perang gerilya tetap berlanjut. Soedirman sedang sekarat karena menderita penyakit TBC. Ia

tidak dapat memimpin pasukan walaupun tetap menjadi simbol angkatan bersenjata. Nasutionlah yang secara efektif memimpin di lapangan. Pada tanggal 22 Desember ia mengumumkan berdirinya pemerintahan militer di Jawa. Pada tanggal 1 Maret Letnan Kolonel Suharto menyerang Yogyakarta dan menguasainya selama enam jam, hal yang kemudian dilebih-lebihkan ketika ia menjadi presiden kedua Indonesia (Ricklefs, 2001: 283).

Di Banten, setelah persetujuan Renville ditandatangani, hubungan antar pemerintah RI dan Belanda tetap tegang. TNI telah memperkirakan bahwa Belanda akan melakukan serangan kembali, namun hanya waktu yang tidak diketahui. Gejala akan datangnya serangan itu dirasakan sebelumnya oleh pimpinan TNI

semenjak Belanda mencoba untuk mengulur-ngulur waktu mengenai perundingan pelaksanaan persetujuan itu (Suharto, 2001: 177).

Banten, suatu daerah yang tidak diserang dan diduduki Belanda melalui agresi militer pertamanya, akhirnya diserang juga oleh tentara Belanda. Serangan terhadap Banten dilakukan oleh pasukan Brigade Infanteri I Divisi 7 Desember yang berkekuatan sekitar 1.000 personil di bawah pimpinan Kolonel Blanken, tentara Belanda bergerak dalam dua tahap. Tahap pertama mereka secepat mungkin menyerbu dengan mengikuti jalan raya untuk menduduki kota-kota dan pusat-pusat perhubungan. Pada tahap kedua mereka melancarkan operasi pembersihan kekuatan TNI sektor demi sektor. Selanjutnya, membentuk pemerintahan sipil dan merehabilitasi jalan yang rusak (Suharto, 2001: 183).

Pada tanggal 23 Desember 1948, kolone pertama di pantai utara, berangkat dari Tangerang pukul 06.00 menuju Serang

dengan kekuatan satu batalyon infanteri yang diperkuat oleh artileri medan, satu peleton mitraliur, dua peleton zeni, dan satu kompi angkutan bermotor yang dipelopori oleh satu eskadron kavaleri lapis baja. Kolone utara itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagian lewat Mauk dan sebagian lain langsung menuju Serang. Dari Mauk sebagian pasukan terus berangkat ke barat menuju Jenggot, dan selanjutnya membelok ke selatan menuju Balaraja menuju Krasak untuk mengepung kota itu. Induk pasukan batalyon pimpinan Djaelani yang bertugas untuk mempertahankan Balaraja terpukul oleh eskadron lapis baja Belanda yang bergerak cepat. Balaraja diduduki Belanda, komandan batalyon dan stafnya tertangkap (*Warta Indonesia*, 24 Desember 1948).

Berhubung serangan tentara Belanda telah diperkirakan akan terjadi lagi, maka TNI mengadakan persiapan-persiapan. Belajar dari pengalaman Agresi Militer Belanda pertama, maka sistem pertahanan linear diganti dengan sistem perang wilayah (*Wehrkreise*), yang pada pokoknya membagi daerah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran yang dapat berdiri sendiri. Dalam daerah *Wehrkreise*, semua tenaga manusia, material, dan bahan-bahan yang ada, diintegrasikan. Dalam segi militer, konsep strategi ini dilengkapi dengan taktik perang gerilya. Selain itu, pasukan-pasukan yang sebelumnya hijrah akibat dari persetujuan Renville, harus menyusup ke daerah musuh untuk kembali ke daerah asalnya. Rencana itu tertuang dalam Instruksi Panglima Besar TNI tanggal 9 November 1948 yang dikenal dengan "Perintah Siasat No.1" yang isinya antara lain sebagai berikut. Pertama adalah tugas untuk memperlambat serangan Belanda, melaksanakan

pengungsian, dan melakukan bumi hangus secara total. Kedua adalah tugas membuat kantong-kantong di setiap kewedanaan militer (Suharto, 2001: 177-178).

Sehubungan dengan instruksi tersebut, tidak lama kemudian Brigade Tirtayasa telah menyelesaikan garis besar rencana pertahanan dan rencana itu dikirim kepada komandan batalyon masing-masing dalam amplop yang disegel. Pada dasarnya, rencana itu terdiri dari dua fase. Pada fase pertama TNI melakukan gerakan penghambat dan pengulur waktu terhadap jalannya serangan. Bentuknya antara lain berupa pengrusakan jalan-jalan yang strategis, penghancuran jembatan-jembatan termasuk jembatan kereta api antara Parungpanjang dan Rangkasbitung, pembuatan rintangan-rintangan di jalan dengan pohon-pohon, penghancuran semua bagian vital dan besar seperti pabrik, kantor telepon, dan transformasi listrik, yang nantinya menjadi fasilitas untuk jalannya suatu pemerintahan. Waktu untuk persiapan rencana ini cukup banyak, yaitu sejak awal bulan November 1948, sejak para komandan batalyon secara lisan diberikan gambaran rencana itu. Meskipun demikian, instruksi rinci baru dapat diketahui setelah pembukaan segel yaitu pada saat yang ditetapkan. Dalam fase pertama dislokasi pasukan Brigade I/Tirtayasa adalah sebagai berikut. Batalyon I pimpinan Kapten Soepaat ditempatkan di Parungpanjang menghadapi front Parung, khusus jalan kereta api antara Jakarta dan Rangkasbitung; Batalyon 2 pimpinan Djaelani ditempatkan di Balaraja menghadapi front Tangerang, khususnya jalan raya antara Tangerang dan Serang; Batalyon 3 pimpinan Kapten Sachra ditempatkan di Pandeglang sebagai cadangan; Batalyon IV pimpinan Kapten Sholeh Iskandar

ditempatkan di Peuteuy menghadapi front Leuwiliang, khususnya jalan raya antara Bogor dan Rangkasbitung, dan satu kompi menghadapi front Pelabuhanratu khususnya jalan pegunungan antara Pelabuhanratu, Cikotok, dan Bayah. Jika rencana yang harus dilakukan dalam fase ini tidak dapat dilanjutkan, secara otomatis meningkat ke fase kedua, yaitu perang gerilya total. Pos komando operasi brigade ditempatkan di Maja di bawah Kepala Staf Operasi Brigade Tirtayasa, Mayor R. Prijatna (Suharto, 2001: 178-180).

Pada fase kedua, dilaksanakan gerilya total yang lokasinya tersebar di enam daerah. Penentuan gerilya tiap batalyon dan kesatuan-kesatuan lainnya, penentuan tempat posko komando batalyon masing-masing, serta daerah dan tempat pos komando kompi masing-masing, disampaikan kepada setiap komandan yang bersangkutan. Untuk mencegah kebocoran rahasia militer, para komandan kesatuan baru diperbolehkan membuka segel instruksi siasat pada saat adanya berita bahwa Agresi Militer Belanda II menjadi kenyataan, tanpa menunggu komando dari komandan brigade (Suharto, 2001: 180).

Keenam daerah gerilya itu adalah sebagai berikut. Kabupaten Tangerang menjadi daerah gerilya Batalyon 2 dan kompi-kompinya ditempatkan di setiap kewedanaan. Pos komando berada di utara Maja. Kabupaten Bogor, dikurangi Sektor 3 Parungpanjang, menjadi daerah gerilya Batalyon 4 dengan dislokasi kompi-kompinya di setiap kewedanaan, pos komando di Nanggung, Jasinga. Kabupaten Lebak ditambah sektor Parungpanjang menjadi daerah gerilya Batalyon 1. Pos komandonya berkedudukan di daerah Leuwidamar. Kabupaten

Serang menjadi daerah gerilya Batalyon Polisi Tentara yang dibantu pasukan ALRI dan AURI. Pos komandaonya terletak di daerah antara Serang dan Ciomas. Kabupaten Pandeglang menjadi daerah gerilya Batalyon 3 dengan pos komando di daerah antara Cibiuk dan Banjar. Daerah Cikotok dan Bayah menjadi daerah gerilya Sektor Cikotok dengan pos komando di daerah Gunung Mandur. Pos Komando Brigade I/Tirtayasa ditetapkan di Leuwidamar. Kekuatan persenjataan Brigade I/Tirtayasa adalah

1.100 pucuk senjata yang terdiri dari berbagai macam merek dan kaliber. Senjata itu berasal dari zaman Hindia Belanda dan hasil rampasan dari tentara Jepang (Suharto, 2001:180-181).

Aparat pemerintah sipil telah diperingatkan oleh pimpinan militer agar siap-siap menghadapi segala kemungkinan. Persiapan pemerintah sipil tidak seperti militer. Pada waktu Yogya diserbu oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, rencana yang tegas dan sempurna belum tampak prihatinnya. Pada waktu Banten dimasuki oleh Belanda pada tanggal 23 Desember 1948, aparat pemerintah daerah sedang berunding di kantor Kabupaten Serang tentang apa yang dilakukan dalam menghadang pasukan Belanda.

Wakil Gubernur Jawa Barat, M. Joesoep Adiwinata, Residen Banten, K.H. TB. Achmad Chatib, dan beberapa pegawai sudah berada di pos komando Brigade Tirtayasa (*Warta Indonesia*, 30 Desember 1948).

Karena terdesak oleh Belanda, Karesidenan Banten menepi ke daerah pedalaman di selatan Banten, yakni Kewedanan Cibaliung. Dari sini K.H TB. Achmad Chatib sebagai Residen Banten melaksanakan aktivitas pemerintahan bersamaan TNI. Selama dua bulan, para pejuang sipil maupun militer melakukan

konsolidasi untuk mematangkan taktik perang gerilya. Setelah itu, Pemerintah Sipil, TNI, dan rakyat Banten melakukan penyerangan di wilayah Banten bagian utara dan selatan. Demi memperkuat perjuangan, Residen K.H. TB. Achmad Chatib membentuk pasukan “Gerilya Rakyat (Gera)” yang dipimpin langsung oleh dirinya. GERA ini terdiri dari unsur militer dan sipil.

Serangan di wilayah Banten bagian utara dilancarkan pada 10 Maret 1949 dan serangan ini dilakukan di beberapa bagian kota Serang. Taktik perang gerilya di Banten bagian utara nampaknya kurang menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Hal ini dikarenakan kontur geografis yang berupa dataran rendah dimana hal ini mempengaruhi taktik perang gerilya. Berbeda dengan wilayah Banten di bagian selatan, daerah ini menjadi medan pertempuran yang merepotkan pihak militer Belanda. Serangan dilakukan dengan berbagai cara, yakni penyerangan pada malam hari ke pospos penjagaan Belanda, penghadangan konvoi Belanda, pemasangan ranjau darat. Di Kabupaten Pandeglang penyerangan terjadi hampir selama 24 jam, dimana para pejuang selain menyerang pos-pos penjagaan Belanda, juga melakukan pembakaran dan penghancuran jembatan-jembatan di daerah antara Pandeglang-Menes dan Rangkasbitung-Bogor. Daerah-daerah ini yang sangat merepotkan pihak militer Belanda.

Semasa Belanda menduduki Jawa Barat dalam agresi militer ke 2, K.H. TB Achmad Chatib memimpin gerilya rakyat Banten ke pedalaman-pedalaman hutan Bantan. Rute Gerilya yang ditempuhnya melalui hutan Cinangka dan menembus menyusuri sungai Cipasauran yang berhubungan dengan hutan Cinoyong.

K.H. TB Achmad Chatib tiba di Cinoyong melalui kampung

Ganggalang dan sempat sembunyi di rumah kokolot bernama Ki Masutun. Perjalanannya berlanjut ke Padarincang dengan menggunakan jalur Ganggalang-Pasir Jeruk masuk ke hutan Cinoyong tembusan ke Kadu Gajah langsung terhubung ke Kadu Jangkung Padarincang (Wawancara dengan Ki Duljaya, 2016).

Menjalankan Roda Pemerintahan RI di Pedalaman

Pada masa agresi Militer Belanda II, sebelum ibu kota Banten, Serang, diduduki Belanda, Wakil Gubernur Jawa Barat di Banten Mr. Yusup Adiwinata, Residen Banten K.H. TB. Achmad Chatib bersama sebagian besar aparat pemerintah daerah, dan Kepala Kepolisian Keresidenan Banten Yusup Martadilaga beserta anak buahnya bersama TNI meninggalkan kota hijrah ke daerah pedalaman (Kemerdekaan harus, 1949; Banten bukan, 1949). Hal serupa dilakukan pula oleh aparat pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menjelang kedatangan tentara Belanda di daerahnya. Pemerintah Daerah Keresidenan Banten (republik) tidak menyerah kepada Belanda meskipun daerahnya banyak diduduki oleh Belanda.

Di pedalaman, pemerintah daerah menjalankan pemerintahan semampunya. Para pemimpin pemerintahan daerah berusaha menyusun kembali pemerintahan daerah untuk mengimbangi pemerintah TBA ("Verslag", 1949). Daerah yang dipilih adalah di Pandeglang Selatan. Pusat pemerintahan daerah berpindah-pindah untuk menyelamatkan diri dari serangan Belanda (N.s., 1955). Setelah tersusun kembali pemerintah daerah (republik), di Banten ada dua pemerintahan sipil, yaitu pemerintah TBA di kota-kota dan pemerintah daerah (republik) di Banten

selatan. Pemerintah daerah di pedalaman juga mendapat dukungan dari orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Mereka memberikan bantuan materi kepada para pejuang di pedalaman. Di kota-kota juga ada orang-orang yang berjuang untuk kepentingan republik. Mereka berusaha untuk memasuki Badan Perwakilan Rakyat (BPR) agar tempat itu tidak dimasuki orang-orang yang berpihak pada Belanda. (N.s., 1955: 16). Pemerintah daerah (republik) berjuang agar seluruh Keresidenan Banten kembali ke pemerintah RI (Dualisme dalam, 1949).

Ketika Kota Serang diduduki oleh Militer Belanda pada masa Agresi Militer II, roda pemerintahan residensi Banten dipindahkan ke pedalaman dan pasukan TKR/BKR bersama-sama dengan ribuan pemuda terlatih turut bergerilya di hutan-hutan di Banten. Hanya saja terdapat sebuah pertanyaan yang tidak terjawab, dimanakah lokasi markas komando gerilya tersebut, serta dimana kantor pemerintahan RI residensi Banten yang konon terletak di pedalaman tersebut. Karesidenan Banten menepi ke daerah pedalaman di selatan Banten, yakni Kewedanan Cibaliung. Dari sini K.H TB. Achmad Chatib sebagai Residen Banten melaksanakan aktivitas pemerintahan bersaman TNI. Hal serupa dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Pemilihan daerah ini karena keadaan alamnya berupa pegunungan yang cenderung aman. Terlebih penduduk sekitar menerima dan membantu perjuangan ini dengan cara memberi beberapa sumbangan berupa kerbau, padi, buah-buahan, dan sebagainya. Peran kaum ulama sangat penting pada fase Agresi Militer Belanda II ini. Mereka sangat dipercaya rakyat, mereka juga

memberikan contoh ketabahan dalam menghadapi kesulitan. K.H. TB. Achmad Chatib yang juga seorang ulama banyak memberi pengaruh dan teladannya. Pendiiriannya yang kuat dalam berjuang, ia pantang mundur ketika sebagian pegawai pemerintahannya memihak kepada Belanda, seperti ucapannya berikut ini:

“Seandainya semua rakyat Banten mengikuti kepada Belanda, baik berilah saya sebuah senjata untuk sekedar penjagaan diri saya dari gangguan binatang buas. Saya lebih senang menjadi orang hutan saja dari pada dijajah kembali oleh Belanda. Tetapi saya yakin bahwa tidak akan terjadi sedemikian”. (Majalah Merdeka, Th II, No.14, 2 April 1949: 7, dalam Suharto, 2001:

204).

Keyakinan KH. TB. Achmad Chatib didasarkan pada pengetahuannya terhadap rakyat Banten yang taat pada agama dan patuh pada para ulama yang menjadi pemimpin mereka. Pemerintah daerah (republik) juga mendapat bantuan dari rakyat. Untuk menjamin kelangsungan perjuangan, pemerintah daerah membuat aturan yang isinya bahwa setiap kepala keluarga setiap bulan menyerahkan tiga liter beras. Waktu panen, setiap kepala keluarga ditetapkan menyerahkan 10% hasil panennya kepada bagian perlengkapan sektor (Soendji, 1983). Kaum ulama kembali menunjukkan peranannya yang besar. Ketika perang gerilya berlangsung, peran ulama sangat besar. Mereka dipercaya rakyat sebagai pamong praja yang tidak mudah goyang pendiriannya. Mereka memberi contoh ketabahan dalam menghadapi segala macam kesulitan sehingga meneguhkan semangat perlawanan rakyat. Karena peran mereka, TNI walaupun tanpa persiapan pembekalan sama sekali hidupnya terjamin (Nasution, 1979).

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang putera veteran RI, tokoh pendiri Provinsi Banten, H. Embay Mulya Syarif dan seorang anggota milisi pemuda yang dilatih oleh TKR/BKR dari kampung Kadu Jangkung, Mandalawangi, H. Fadil bin H. Sudarga 8 Agustus 2014 lalu dan testimoni tertulis dari seorang veteran dari Mandalawangi, M. Djohani, terungkap bahwa Markas Gerilya dan pusat pemerintahan RI saat itu setidaknya pada enam bulan pertama adalah di Kadu Jangkung, Mandalawangi, sebuah kampung yang terletak tersembunyi dibalik bebukitan di areal pegunungan yang berdiri kokoh di wilayah perbatasan Serang-Pandeglang. Kadu Jangkung saat itu adalah tempat tinggal bagi tidak lebih dari 40 KK. Kampung yang hanya bisa diakses saat itu dengan jalan kaki tersebut dan dengan jalan yang sangat terjal dan belum diperkeras hidup dari menjual komoditas hasil pertanian seperti kapul, kopi, kemiri, dan karet.

Beberapa fakta yang diungkapkan oleh seorang veteran yang berusia 95 tahun menarik untuk dikemukakan dalam tulisan ini. Menurut ingatannya, rapat dan markas tempat pengendalian komando gerilya dan pemerintahan pedalaman bertempat di rumah H. Sudarga yang dibantu oleh istrinya Hj. Kasiah (Wawancara, 1990-an) yang menyiapkan makanan untuk lebih dari 450 orang selama enam bulan. Penandatanganan Gencatan Senjata (*Ceasefire*) antara gerilyawan Banten dengan Militer Belanda pada akhir masa Agresi Belanda II (1949) juga berlangsung di Kadu Jangkung di rumah Lurah Kadiman, kepala desa Cikumbuen tahun 1938-1942, kec. Mandalawangi. Lurah Kadiman sendiri adalah menantu KH. Abdul Razak.

Pasukan/gerilyawan yang bermarkas di rumah Hj. Kasiah

(sebagian besar) dari berbagai tempat: Kapten Suwarno (Jawa Tengah), Kodrat Samadikun (Medan), TB. Suwandi (Jiput). Kapten Suwarno sendiri meninggal saat pertempuran di Palagan (medan tempur) persis dekat kantor kecamatan Padarincang tahun 1949. Monumen peringatan gugurnya Kapten Suwarno cs dibangun di dekat kantor Kecamatan Padarincang. Mereka yang berhasil lolos kemudian melarikan diri ke hutan menuju Kadu Jangkung.

Pakaian yang dikenakan seadanya seperti rakyat pada umumnya. Mendapatkan gaji 150 rupiah (secara merata baik sersan maupun kopral) di Sukaraja Tasikmalaya tahun 1950. Kadu Jangkung saat itu adalah sebuah kampung kecil yang menjadi tempat tinggal 40 KK lebih. Pertumbuhan penduduknya relatif tidak pesat dengan jumlah hanya 73 KK. Saat ini kampung Kadu Jangkung masuk dalam wilayah desa Ciramea pasca pemekaran desa tahun 1990-an.

Kedatangan rombongan gerilyawan KH. Sjam'un cs. berlangsung malam hari sekitar pukul 2100 secara mendadak dan mendapatkan sambutan meriah dari warga Kadu Jangkung. Rombongan berdatangan secara bertahap. Markas Belanda bertempat di Cilehem, dekat pemandian Batu Kuwung kira-kira 10 KM dari Kadu Jangkung. Suara mortir dan tembakan senjata otomatis Belanda terdengar oleh penduduk Kadu Jangkung. Pada tahun 1949, Kadu Jangkung sendiri pernah diserang oleh Tentara Belanda dan memakan banyak martir di pihak gerilyawan. Beberapa orang meninggal sejak pertempuran di dekat kecamatan Padarincang sampai Tentara Belanda merangsek kampung Kadu Jangkung. Serangan Tentara Belanda sendiri berlangsung intensif

dan tembakan tentara Belanda tersebut seringkali berlangsung di pagi hari.

Ali Amangku, Kolonel Sanusi Sanjadirdja, K.H. Tohir Hanafi, TB. Suwandi adalah beberapa tokoh yang ikut gerilya dan bermarkas di Kadu Jangkung. KH. Ahmad Fatoni (Wakil Residen Banten) dan Yusuf Mangkoedilaga (Kapolwil Residensi Banten) yang tertangkap di Cibaliung oleh pasukan Bambu Runcing juga mengawali masa gerilyanya dari Kadu Jangkung.

Ketika Belanda menduduki Kadu Jangkung, salah seorang gerilyawan berhasil meloloskan diri dari sergapan tentara Belanda dengan berpura-pura sakit demam sehingga terhindar dari penangkapan. Narasumber sendiri berhasil lolos dari sergapan Belanda di waktu subuh dinihari setelah melarikan diri dari rumah tinggalnya. Namun beberapa orang pemuda Kadu Jangkung M. Nur, Ki Jali, dan Ki Arkiman meregang nyawa di tengah sawah akibat ditembak tentara Belanda. Rombongan pasukan Belanda yang menandatangani Gencatan Senjata berasal dari kesatuan yang bermarkas di Kantor Kecamatan Mandalawangi. Dari pihak pasukan TRI, Kodrat Samadikun mewakili K.H. Sjam'un sebagai komandan Divisi 1000 Tirtayasa.

Kondisi darurat TRI saat itu terefleksi dalam fakta bahwa setiap senapan hanya mendapatkan jatah 1-3 peluru saja. Senapan yang dipegang oleh H. Oton adalah Karaben Jepang (LE, 6,5, MK 3). H. Husnan juga bersama H. Oton turut bergerilya. Ia bersama 39 pemuda setempat lainnya direkrut menjadi milisi yang dilatih oleh Kapten Kodrat Samadikun selama 6 bulan. Subsektor 3 Rayon Macan. Sesudah *ceasefire* digabung menjadi Batalyon N Brigade Tirtayasa turun ke Padarincang dan kemudian dialihkan

ke Pabuaran yang kemudian dialihkan ke Warung Kupa dan Pandeglang, dan selanjutnya ke Sumedang. Kamzah, Santa, Jakri, Samsudin, Dulhak, Oton adalah enam pemuda dari Kadu Jangkung yang turut direkrut menjadi tentara milisi yang dilatih oleh Kodrat Samadikun (Suharto, 2001: 206).

BAGIAN KEENAM

Masa Orde Lama sebagai Ulama di Banten

Setelah pensiun dari semua aktifitas kenegaraannya, K.H. TB. Achmad Chatib istiqomah mengasuh para santri dan masyarakat di Banten Lama. Di samping ia mendirikan pesantren di Banten Lama yang dinamainya *Masarotul Muhtajin* dan *Masarotul Muta'limin*, ia kembali menghidupkan kompleks kraton Banten Lama. Sebelum seluruh aktifitasnya dimulai, ia pertama kali melaksanakan salat sunah di atas batu Gilang. Setelah itu usahanya mendirikan pesantren pun ia mulai. Pada saat bersamaan ia kembali hidupkan kompleks keraton dan masjid Banten Lama.

Sebagai seorang ulama yang kharismatik K.H. TB. Achmad Chatib tidak saja membina masyarakat Banten Lama, ia sering diundang mengisi pengajian dan ceramah di berbagai daerah di Banten dan luar Banten. Padarincang, Jeungjing-Pandeglang, Cibunut, Cihayam, Sadatani, Cibeber adalah daerah-daerah yang sering ia kunjungi dan ia mengisi kegiatan pengajian dan ceramah agama di sana dalam berbagai momen (Wawancara, Hj. Tinti Chatib, 21/02/2019).

Mendirikan Universitas Maulana Yusuf, Cikal Bakal UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Ide awal pendirian fakultas ini dicetuskan oleh Korem 064 Maulana Yusuf bersama-sama tokoh masyarakat Banten dan dibantu oleh beberapa orang birokrat pemerintahan. Ide dasarnya adalah perlu ada Universitas Keagamaan berdasarkan

SK Koordinator Pelaksana Kuasa Perang Rem. Banten Np. Kpts. 20/KPK/5/1961 tanggal 1 Juni 1961. SK ini sekaligus membentuk panitia pendirian universitas. Panitia tersebut terdiri dari Dewan Kurator, Dewan Universitas dan susunan usaha. Dalam usaha pendirian lembaga ini KH. TB. Achmad Chatib bertindak sebagai dewan kurator bersama Kol.Dr. Wonojudo selaku wakil pemerintah daerah Jawa Barat yang dibantu oleh satu orang perwakilan Departemen Agama dan Departemen Perguruan Tinggi. Jumlah dewan kurator yang akan dibentuk ada 9 orang. Namun pada awal pembentukan itu tiga orang anggota masih kosong, belum ada ketetapan siapa yang akan masuk ke dalam anggota dewan kurator. Ada pun yang duduk di Dewan Universitas adalah R. Moh. Nur Atmadibrata (Residen Banten), bertindak sebagai ketua, Let. Kol.Anwar Padmawidjaya sebagai wakil ketua, Kep. Ins. Pol. Banten TB. O. Martasudarma, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, R. Sutisna Hadiwidjaya, dan ketua Pengadilan Negeri Serang, Mr. Bambang Surono, sebagai anggota. Untuk urusan administrasi dan tata usaha ditangani oleh TB. Suhadisastra. A. Suandi bertanggung jawab bidang umum dan Taufik Lutfi bidang mahasiswa (TIM IAIN, 2010: 43).

Panitia harus bekerja selama 5 bulan untuk mempersiapkan kegiatan perkuliahan perdana. Tanggal 16 Oktober 1961 kegiatan perkuliahan berhasil dibuka untuk mahasiswa angkatan pertama dengan kelas darurat. Sementara itu usaha pembangunan sudah mulai digarap sejak tanggal 17 Agustus 1961. Panitia yang melaksanakan pembangunan ini terkelompokan ke dalam tiga tingkatan kepanitiaan: panitia inti, panitia umum dan para anggota. Panitia inti langsung dipimpin

oleh Residen Banten R. Moh. Nur Atmadibrata dan Let. Kol. Anwar Padmadiredja bertindak sebagai ketua dua. Sedangkan bagian teknik dikuasakan kepada Kapt/CPM Kusnadi W. dan Letda B. Irawan. Bendaharanya adalah Peltu. R. H. Utjeh. Panitia umum terdiri dari Kol. Ibrahim Adjie, Kol. Dr. Wonojudo, Letkol Rd. Sutisna,

K.H. Muslich, K.H. TB. Ahmad Chatib, R.T. Sutisna dan TB. Oteng Martasudarma (TIM IAIN, 2010: 43).

Masyarakat Banten sangat antusias menyikapi rencana pembangunan perguruan tinggi Islam ini. Banyak tokoh masyarakat Banten yang kemudian melibatkan diri dalam usaha pembangunan perguruan tinggi Islam ini. Di antara mereka adalah TB.Suhadisastra, Moch. Sanusi, R. Gogo F. Sandjadiredja, Hasan Djakaria, Adnan Harahap, K.H. Ali Misri, K.H. Soleh Ma'mun, K. Harun, K. Ichud, Bidin Surjagunawan, R. Moch. Sjahra Sastrakusuma, H.M. Suwita Atmadj, Drs. Slamet Hidarto Nasution, K.H. Chudori, TB. Kaking, dan tiga orang anggota Dewan Korem Banten: Parim, Prawira, dan Sudir. Pembangunan gedung Fakultas Syariah ini berhasil dirampungkan kurang dari setahun, Serah terima gedung diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 1962 dari Pangdam VI Sliliwangi, Brigjend Ibrahim Adjie kepada R. Moh. Nur Armadibrata yang mewakili rakyat Banten disaksikan langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Sosial (TIM IAIN, 2010: 44).



Kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin
Sumber: <https://www.penamerdeka.com/>

Selanjutnya universitas ini mengalami beberapa kali transformasi hingga akhirnya menjadi UIN. Pada tahun 1960 Departemen Agama RI melakukan pengembangan program pendidikan Islam tingkat tinggi berdasarkan Kepres No. 11 th. 1960. Di dalam Kepres itu IAIN untuk pertama kalinya dibentuk dengan nama *Djami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah* yang berkedudukan di Jogjakarta. Sebelumnya memang sudah ada PTAIN di Jogjakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. Untuk mewujudkan amanah Kepres No. 11 itu, Depag melakukan fusi terhadap kedua lembaga itu, dan didirikanlah IAIN. Sebagai konsekuensi dari Kepres tersebut, semua pendidikan tinggi yang satu rumpun dengan konsep IAIN difusikan ke dalam lingkungan IAIN. ADIA misalnya difusikan menjadi fakultas IAIN Jogjakarta. Begitu juga Fakultas Syari'ah Maulana Yusuf di Serang dinegerikan dan menjadi bagian dari IAIN Jogjakarta, dari Fakultas Syari'ah dirubah menjadi

fakultas syari'ah IAIN Jogjakarta. Dengan beberapa pertimbangan taktis dan strategis. Fakultas Syari'ah Maulana Yusuf sudah memiliki gedung yang permanen, mahasiswa, dan perkuliahan yang sudah berjalan. Berdasarkan SK. Menteri Agama No. 67 tahun 1962 ditetapkanlah Fakultas Syariah Maulana Yusuf menjadi Fakultas Syari'ah Djami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah cabang Serang. Serah-terimanya dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1962 dari Yayasan Maulana Yusuf yang diwakili oleh Ketua Yayasan R. Mohamad Nur Atmadibrata kepada Menteri Agama K.H. Muhamad Saifudin Zuhri. Dalam acara serah terima tersebut beberapa tokoh Banten hadir sebagai saksi di antaranya Prof. Suryana, S.H., H. Muhamad Syadeli Hasan, R. M. Atmadibrata, Rfd. Gogo Sandjadirdja, Rd. Moh. Syahra Sastrakusuma, A.M. Syadeli dan KH. Ali Misri (Tim IAIN, 2010: 45).

IAIN yang baru dibentuk ini ternyata mampu berkembang dengan pesat. Pemerintah pusat mulai mempertimbangkan untuk pengembangan IAIN yang lebih luas. IAIN kemudian dibagi dua, satu di Jogjakarta dengan nama Sunan Kalijaga dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengingat jarak Serang-Jakarta lebih dekat, maka kedudukan Fakultas Syari'ah Serang dialihkan menjadi cabang dari IAIN Jakarta. Saat pengalihan ini, Fakultas Tarbiyah Maulana Yusuf belum menjadi negeri, pada tahun 1964 barulah ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Tarbiyah Syarif Hidayatullah cabang Serang. Yang bertindak sebagai dekan tarbiyah adalah K.H. Anshor, yang kemudian pada tahun 1967 digantikan oleh H. A. Wasit Aulawi, M.A. setelah dinegerikannya Fakultas Tarbiyah, Fakultas Sosial Politik terancam ditutup

bersamaan dengan dibubarkannya Fakultas Maulana Yusuf. Namun para tokoh Banten tetap menginginkan fakultas ini menjadi negeri. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut didirikanlah IKIP dan Universitas Tirtayasa (Tim Penyusun, 2010: 46).

Memasuki tahun 1976 IAIN di Indonesia mengalami penyederhanaan. Seluruh fakultas cabang di daerah-daerah dihapuskan, kecuali Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang. Seiring kebijakan pemerintah pusat tentang pemetaan wilayah masing-masing IAIN, Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang dipindahkan ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pengalihan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI No. 12 tahun 1976 tanggal 5 Maret 1976 (Tim Penyusun, 2010: 47).

Ketika difusikannya Fakultas Syari'ah Serang ke IAIN Sunan Gunung Djati sudah mendapat izin membuka perkuliahan tingkat doctoral sejak tahun 1985-1966. Untuk memperkuat statusnya agar dapat menjamin kualitas doctoral di lingkungan IAIN, maka Fakultas Syari'ah Sunan Gunung Djati cabang Serang ini dikembangkan menjadi fakultas madya, dan pada tahun 1984 baru meluluskan sarjana lengkap doctoral atau Drs. Kemudian pada tahun 1987 sistem pendidikan Islam tingkat tinggi dirubah menjadi strata satu (S1), maka Fakultas Syari'ah Sunan Gunung Djati cabang Serang pun menjadi program tingkat S1. Setelah memasuki tahun 1997 Fakultas Syari'ah Sunan Gunung Djati dimandirikan secara permanen. Berdasarkan Kepres No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 fakultas ini dirubah menjadi STAIN Sultan Maulana Hasanudin

Banten. Kemudian bertransformasi menjadi IAIN di tahun 2000. Kini sudah mengalami perkembangan yang lebih pesat, dari IAIN menjadi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (Tim Penyusun, 2010: 48).

Ikut Merintis Pembentukan Provinsi Banten

Cita-cita menjadikan Banten provinsi yang mandiri dari Jawa Barat sudah tercetus sejak awal masa kemerdekaan. Untuk pertama kalinya ide tersebut diusulkan kepada pemerintah pusat pada tahun 1953. Usulan tersebut mereaksi ketetapan pemerintah yang menetapkan Yogyakarta dan Aceh sebagai Daerah Istimewa. KH. TB. Ahmad Chatib adalah tokoh utama yang memprakarsai gagasan ini. Ia mendapat dukungan kuat dari Tuan Syekh Ibrahim seorang pengurus pusat PSII, Enjang Jaenudin, KH. TB. Idrus dari Pesantren Turust Pandeglang, dan KH. Mahmud dari Ciomas. Berdasarkan informasi buku *Meretas Kemandirian* Soekarno memberikan janji kepada masyarakat Banten untuk meningkatkannya menjadi daerah istimewa. Di antara anggota dewan MPRS persoalan ini sudah berkembang menjadi perdebatan hebat, tarik menarik antara perwakilan daerah begitu kuat, dalam waktu bersamaan Yogyakarta, Aceh dan Cirebon berebut kedudukan daerah istimewa dengan berbagai argumentasi yang menguatkan daerah mereka masing-masing memiliki keistimewaan dari sudut sejarah dan budaya (Tim Penyusun, 2009: 53).

Meski usulan masyarakat Banten kepada pemerintah pusat menjadikan Banten sebagai daerah istimewa mengalami kebuntuan, tokoh-tokoh Banten terus memperjuangkan usaha

ini. Setelah masa ini berlalu, kelompok muda Banten kembali mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan Banten mendapatkan hak otonomi daerah. Usaha ini kembali dirumuskan pada tahun 1963 yang diprakarsai oleh Bupati Serang, Gogo Sandjadirdja. Pada momen halal bil halal dengan masyarakat Banten. Melalui pertemuan yang diselenggarakan di pendopo kabupaten Serang itu gagasan memandirikan Banten dari Jawa Barat kembali tercetus. Hanya saja ada sedikit pergeseran dari masa sebelumnya, pada masa ini, gagasan kemandirian diorientasikan untuk mengusulkan Banten sebagai provinsi. Dibentuklah Panitia Pembentukan Provinsi Banten. Bupati Serang, Gogo Sardjadirdja, bertindak sebagai ketua panitia. Rumusan ini memang tidak mendapat suara bulat dari peserta. Karena poros Nasakom mewarnai kepanitiaan ini. Tentu saja panitia harus menimbang strategi praktis yang menyesuaikan arus politik nasional. Tentu saja pro-kontra yang mengikuti gagasan ini yang sempat mencuat tidak menjadikan para pimpinan masyarakat Banten urung mengusulkan rencana ini. Komposisi kepanitiaan ini memasukan unsur partai politik, anggota dewan perwakilan rakyat, dan pemerintah. Gogo Sardjadirdja sebagai bupati Serang didaulat sebagai ketua, Ayip Dzuhri yang bertindak sebagai wakil ketua merupakan perakilan dari NU, Entol Mansur dari PNI, Sukra dari PKI, M. Sanusi dari PSII, Toha perwakilan DPR GR Serang, TB. Sochari Chatib dari PSII (Tim Penyusun, 2009: 79).



TB. Suchari Chatib yang juga putra dari Achmad Chatib
(Sumber: Koleksi pribadi penulis)

Usaha ini pun kembali mengalami kegagalan karena dinamika politik nasional yang tidak menguntungkan. Ketika G-30 S/PKI meletus pemerintah pusat mendesak panitia untuk sementara waktu tidak aktif. Apalagi didapati beberapa anggota panitia merupakan unsur PKI. Tentu saja kerja panitia pun mendapat perhatian khusus. Ditambah Aidit menaruh harapan besar dapat memanfaatkan aspirasi rakyat Banten agar memperoleh dukungan dari sana. Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan dalam suasana genting, ia mengeluarkan intruksi agar panitia ini tidak bergerak untuk sementara waktu sampai situasinya benar-benar memungkinkan. Tentu saja situasi politik ini bukanlah satu-satunya alasan yang mengganjal perjuangan rakyat Banten memperoleh status otonomi daerah. Usulan memandirikan Banten sebagai provinsi belum mendapat dasar

yang kuat secara konstitusional. Hal ini, jauh hari sudah disampaikan oleh Mendagri Mayjen Soemaryo (Tim Penyusun, 2009: 82-87).

Pemerintah pusat masih tetap khawatir panitia ditunggangi oleh sisa-sisa PKI yang belum diamankan. Berbagai pendekatan persuasif pun dilakukan pemerintah kepada masyarakat Banten, khususnya melalui usaha pembangunan daerah yang dipimpin langsung di bawah komando Korem Maulana Yusuf. Pembangunan gedung Universitas Mualana Yusuf, wisata Batu Kuwung, dan Tasik Kardi adalah beberapa hasil yang dikaryakan melalui program TNI berbakti. Untuk menjawab keresahan pemerintah pusat yang mengindikasikan gerakan tersebut buah dari PKI, anggota DPR-GR Serang mengeluarkan pengumuman pada tanggal 5 Juli 1967 yang isinya tidak lain menyatakan bahwa ide menjadikan Banten sebagai provinsi yang mandiri dari Jawa Barat bukanlah kepentingan kelompok tertentu melainkan murni aspirasi rakyat Banten yang tidak akan pernah padam sampai cita-citanya terwujud. Masa sepanjang tahun 1967 sampai 1998 adalah masa yang cukup panjang memperjuangkan harapan rakyat menjadi provinsi. Berbagai diplomasi politik para anggota dewan di ruang legislatif, demonstrasi mahasiswa Banten di Bandung 1975 sampai berbagai kajian-kajian ilmiah digelar diberbagai forum dan di berbagai tempat. Gerakan ini mirip gerakan senyap namun memiliki daya dobrak yang cukup kuat (Tim Penyusun, 2009: 100-125).

Peristiwa 1998 yang menandai arah baru jarum jam sejarah demokrasi di Indonesia secara strategis telah membuka peluang besar bagi masyarakat Banten. Setelah B.J. Habibi menjabat

presiden RI dan mengunjungi Banten dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Banten untuk menyampaikan aspirasinya kepada Habibi. Di era ini tampil generasi ketiga yang semula adalah kelompok pelajar yang aktif di KAPPI KAMI. Orang-orang seperti Uwes Qorni, Embay Mulya Syarif, K.H. Aminudin Ibrahim dan lain-lain. Pada tanggal 18 Juli 1999 kelompok muda ini kemudian membentuk kepanitiaan baru yang tidak lain adalah transformasi dari Panitia Pembentukan Provinsi Banten yang digagas sebelumnya oleh tokoh-tokoh tua. Komite Pembentukan Provinsi Banten diketuai langsung oleh Uwes Qorny dan Uu Mangkusasmita menjabat sekretaris. Komite ini memiliki 43 orang anggota dan didiklarasikan oleh enam orang tokoh: Uwes Qorny, Uu Mangkusasmita, Drs. H. TB, Djajuli Mangkusubrata, Raden Gunawan, Ir. M. Eng dan Sofyan Ikhsan (Tim Penyusun, 2009: 135).

Gagasan ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat; Habibi telah membuka keran dengan luas. Ketika kunjungannya ke Pesantren Daarul Iman gagasan ini dititipkan melalui K.H. Aminudin untuk disampaikan kepada Habibi. Habibi merespon dengan tangan terbuka dengan memberikan usul agar komite yang baru dibentuk itu dapat memenuhi prosedur birokrasi yang berlaku dan semestinya (Tim Penyusun, 2009, hlm. 146-147). Sekali lagi gagasan ini mendapati batu sandungan yang mengantarkan komite ini gagal mewujudkan Banten sebagai sebuah provinsi. Meski berbagai kajian dilakukan di berbagai tempat, termasuk di ruang legslatif. Harapan rakyat Banten makin terbuka lebar memasuki tahun 2000 tepatnya tanggal 17 Mei 2000 pertemuan Pansus RUU Provinsi Banten

dengan Mendagri Surjadi Soedirdjo menghasilkan penilaian bahwa ganjalan utamanya sekarang ini adalah belum terbentuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Beberapa waktu kemudian diplomasi-diplomasi dilakukan oleh tokoh-tokoh Banten dan pada tanggal 18 Juli 2000 mereka menghadap presiden Gus Dur. Gus Dur dengan pandainya berusaha membangun harapan rakyat Banten kepadanya dengan menyampaikan ia memiliki hubungan emosional langsung dengan Banten, karena delapan generasi leluhurnya berasal dari Tanara (Tim Penyusun, 2009: 245).

Usaha-usaha politik, kajian-kajian ilmiah dan berbagai usaha lainnya akhirnya berhasil membuahkan kabar gembira bagi rakyat Banten, pemerintah pusat menyetujui usulan pembentukan provinsi Banten. Dan pada tanggal 18 November 2000, akhirnya presiden Abdurahman Wahid meresmikan banten sebagai provinsi ke 30 di Indonesia (Tim Penyusun, 2009: 255).

Peninggalan K.H. TB. Achmad Chatib

Setelah K.H. TB. Achmad Chatib lengser dari jabatan residen Banten, ia aktif kembali di Partai Serikat Islam Indonesia. Seiring dengan usaha Partai Serikat Islam dalam upaya pemulihan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia, partai mengeluarkan program pembangunan sekolah-sekolah di daerah- daerah hingga pusat. K.H. TB. Achmad Chatib menyambut gembira program tersebut dan bersama dengan Harsono Cokroaminoto keduanya membangun sekolah Cokroaminoto dari tingkat dasar sampai SMA di wilayah

Kedalingan. Di sana ia mendirikan MI untuk tingkat dasar dilanjutkan SMP dan SMA (Wawancara, Hj. Tinti Chatib, 21/02/2019).

Di wilayah Banten Lama beberapa lembaga pendidikan pun ia dirikan agar dapat melayani masyarakat pinggiran. SDN Karangantu adalah salah satu sekolah yang dia dirikan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Di sekitar kompleks Masjid Agung Banten Lama ia juga mendirikan pesantren, majlis ta'lim dan madrasah keduanya diberi nama *Masarotul Muhtajin* dan *Masarotul Muta'alimin* (Wawancara, Hj. Tinti Chatib, 21/02/2019).

Tidak saja sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah ia dirikan. K.H. TB. Achmad Chatib memiliki kontribusi besar dalam upaya pendirian beberapa lembaga pendidikan tingkat tinggi. Dua perguruan tingkat tinggi yang menjadi bukti perhatiannya di bidang pendidikan cukup tinggi, Universitas Matla'ul Anwar dan Universitas Maulana Yusuf sekarang menjadi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (Wawancara, Hj. Tinti Chatib, 21/02/2019).

Wafatnya K.H. TB. Achmad Chatib

Setelah menjalani masa pensiun, beliau sebagai pejuang tidak menghentikan aktifitas serta peranannya dalam pembangunan. Tetapi, beliau lebih banyak mencurahkan perhatiannya dalam memajukan kehidupan umat, seperti: mengurus peninggalan Kesultanan Banten, memelihara anak yatim piatu, mengasuh sebuah pesantren, membangun tempat-tempat ziarah, ibadah, serta tempat menerima tamu atau pelajar

yang hendak menimba ilmu di Banten. Adapun dana/ biaya pembangunannya, beliau peroleh dari para donatur atau para dermawan dari seluruh masyarakat Banten, baik berupa moril ataupun materil yang beliau terima dengan penuh semangat dan ikhlas. Mereka berduyun-duyun datang ke Banten untuk menyumbangkan apa saja yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan.

Di samping itu, beliau juga mendapatkan dana dari hasil penjualan buku-buku cetak, baik sejarah, ‘*aurâd*, maupun silsilah, termasuk diantaranya ‘*aurâd* dan silsilah *Thariqat al-Muhtâjîn* yang beliau dirikan untuk membentengi keimanan umat dari kerasnya pengaruh globalisasi, yang mana hal ini merupakan warisan terbesar bagi keturunannya yang ingin meneruskan perjuangannya.

Sebelum wafat K.H. TB. Achmad Chatib ada beberapa catatan tentang aktivitas menjelang wafatnya diantaranya:

- a. Memberikan ceramah-ceramah di tempat kenduri
- b. Mengadakan peringatan-peringatan Hari Besar Islam, seperti Haul Maulana Hasanuddin dan Maulid Nabi
- c. Rapat Silaturahmi di bulan syawal dan maulud
- d. Memberi nasehat dan pengarahan kepada pimpinan partai dan pimpinan Negara
- e. Menerima tamu dari mana-mana hampir setiap hari (Wawancara, Nijmah 21/02/2019).

Pada tanggal 20 Juni 1966, tepatnya saat pelantikan Presiden Soeharto, KH. TB. Achmad Chatib wafat di kampung Gayam Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Awalnya

beliau mendapat kabar bahwa adiknya KH.TB. Abdul Chamid (Ki Adung) meninggal dunia. Lalu beliau datang ke Gayam, Pandeglang dengan perasaan kehilangan yang mendalam. Sebab Ki Adung adalah adik yang setia mendampingi beliau dalam perjuangan, baik saat dibuang ke Digul dan ketika berjuang menumpas pemberontakan dan penjajahan asing di Banten. Setelah menyolatkan jenazah adiknya, K.H. TB.Achmad Chatib meminta tikar kepada seseorang dan menggelarkan tikarnya di suatu kamar untuk beristirahat. Namun setelah beberapa jam, ia tidak juga bangun dari tidurnya. Orang-orang menghampiri K.H. TB.Achmad Chatib dan akhirnya diketahui bahwa K.H.

TB.Achmad Chatib telah meninggal dunia. Sebelum kepergiannya, K.H. TB.Achmad Chatib berpesan untuk dikuburkan di Gayam Pandeglang bersama dengan keluarganya. Setelah melalui pertimbangan, akhirnya K.H. TB. Achmad Chatib dikuburkan di Banten. Sebab mengingat jasa-jasa K.H. TB.Achmad Chatib yang besar untuk membebaskan Banten dari penjajah (Wawancara Nizmah, 21/02/2019).

BAGIAN KETUJUH

Wasiat KH.Tb. Achmad Chatib

Semasa hidupnya KH.Tb. Achmad Chatib dikenal sebagai orang yang religius, yang selalu mempertahankan kebenaran yang berasal dari Allah swt. Selain itu, beliau juga terkenal akan rasa perhatiannya terhadap umat Islam, rasa perhatian tersebut dituangkannya dalam dakwah, pengajian, dan berbagai ceramah tentang pengarahan hidup bagi umat islam di berbagai tempat di Indonesia.

Tidak hanya itu, beliau juga memiliki rasa sosial yang tinggi. Pada tahun 1951 saat dipulangkan ke Banten, beliau membangun dan merekonstruksi ulang Banten Lama yang dahulunya bekas Kesultanan Banteen, yang sudah berubah menjadi hutan dan rawa-rawa tempat berkembang biak nyamuk malaria menjadi sarana umum masyarakat seperti masjid, pesantren, dan gedung Perusahaan Alim Ulama (PAU). Menjelang pensiun, KH.Tb.Achmad Chatib sempat diangkat menjadi Anggota Dewan Partai Syarikat Islam Pusat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) sebagai Wakil Alim Ulama SI, dan Pimpinan Majelis Ulama se-Banten.

Pada tahun 1970, KH.Tb. Abdul Chamid yang merupakan adik KH.Tb. Achmad Chatib dikabarkan meninggal. Mendengar hal itu, KH.Tb. Achmad Chatib tertimpa rasa duka dan kehilangan yang mendalam karena dimasa perjuangan, adiknya selalu setia mendampingi beliau, baik saat dibuang ke Digoel

yang merupakan penjara neraka ataupun saat menumpas pemberontakan dan penjajahan asing di Banten.

Diceritakan setelah menyolatkan jenazah adiknya, beliau meminta tikar untuk beristirahat. Tikar tersebut digelarnya dikamar. Setelah beberapa jam, beliau tidak beranjak bangun dan kembali melanjutkan aktifitasnya, kemudian warga sekitar menghampirinya dan menemukan KH.Tb. Achmad Chatib yang sudah tidak bernyawa.

Orang-orang sempat tidak percaya atas kematian KH.Tb. Achmad Chatib yang bersamaan dengan kematian adiknya, KH.Tb. Abdul Chamid. Saat itu, diteleponlah putra KH.Tb. Achmad Chatib yang bernama Tb. Achmad Suchari yang sedang bertugas di gedung MPR Jakarta. Putranya pun tidak percaya akan kematian ayahnya karena hanya seling beberapa jam setelah kematian pamannya.

Menurut putranya, wasiat dari ayahnya hanyalah berupa nasehat-nasehat yang berbunyi:

Ku wasiatkan kepada anak-anakku semuanya;

- 1. Bertakwalah pada Allah mengerjakan segala perintahnya dan mejauhi segala larangannya.*
- 2. Bertakwalah dalam segala urusan kebaikan supaya kamu kuat.*
- 3. Jadikanlah segala urusanmu dan amal usahamu dan budi pekertimu untuk ibadah kepada Allah SWT. Supaya kalian mendapat ridho Allah.*

4. Berdoalah: *'Wahai tuhan kami, berikanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa neraka.'* Wahai Tuhanku, berikan ampunan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan berikan rahmat kepadanya sebagaimana mereka mengasihaniiku di waktu aku kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Belanda

Arsip di Nationaal Archief Den Haag (NA no.) tentang laporan politik yang dikeluarkan oleh URUSAN SIPIL NICA tentang kondisi politik ekonomi dan sosial di Banten Maret-November 1946 (12 hal.)

Arsip di Nationaal Archief Den Haag (Koleksi Arsip Konsulat Belanda di Jeddah (1873-1950) dan Wakil Konsulat Belanda di Mekkah (1889-1950)

Arsip Nasional

Gunseikanbu 2604. Koleksi Arsip Pendaftaran Orang Indonesia Jang Terkemoeka Jang ada di Djawa.

Koran Terbitan

Antara, 9 April dan 8 Mei 1947

De Banten-Bode, *Bahajanja PKI*, 9 Desember 1926.

De Banten-Bode, 14 November 1926

De Banten-Bode, No. 39 - 2 Oktober 1926

Banten Bode, 27 November 1926

Berita Indonesia, 13 dan 16 Oktober 1945

Berita Indonesia, 7 Mei dan 25 November 1947

Kedaoelatan Rakjat, 13 Oktober 1945

Merdeka, 18 Oktober dan 13 Desember 1945

Merdeka, 22 Januari dan November 1946

Merdeka, 10, 12, dan 14 Mei 1947

Madjallah Merdeka, no. 21. Th. 1, (5 Juni 1948), hlm. 5.
Pikiran Rakjat, 28 Maret 1960
Rakjat, 13 dan 29 Desember 1945
Sin Po, 22 Desember 1947
Soeara Asia, 24 Agustus 1945
Soeara Merdeka, 4 Maret 1947
Soeara Madjlis Islam A'laa Indonesia, 15 Januari 1943
Warta Indonesia, 24 dan 30 Desember 1948.

Naskah-Naskah Dan Jurnal Hasil Penelitian

- Aiko, Kurasawa, (1986), 'Japanese Occupation and Leadership Changes in Javanese Villages' dalam Jurrien van Goor (Ed.). *The Indonesian Revolution: Papers of the Conference Held in Utrecht, 17-20 Juni 1986* (Utrecht: Riksuniversiteit Instituut voor Geschiedenis)
- Ali, Mufti. (2011), *Jalan ke Arab Barat": Sejarah Sekolah di Serang (1833-1942)*, (Buletin Bantenologi, vol. 1 No. 1. Januari 2011).
- , *Buya Mukri (1862-1959): Dari Aktifis Pemberontakan 1926' Menjadi Guru Tarekat Yang Disegani*, (Naskah Tidak Terbit).
- Baroroh, Siti Nur Hadisah (2012), "Pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia" dan Pengaruhnya Dalam Bidang Politik Dan Ekonomi (1945-1950), *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Benda, Harry J. (a), (1955), "The Communist Rebellions of 1926-

- 1927 in Indonesia”, *The Pacific Historical Review*, Vol. 24, No. 2, pp. 139-152.
- (b), (1955), “Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945”, *Pacific Affairs*, Vol. 28 No. 4, pp. 350-362.
- (a), (1956), “The Beginnings of the Japanese Occupation of Java”, *The Far Eastern Quarterly*, Vol. 15, No. 4, pp. 541-560.
- (b), (1956), *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*, The Hague: Van Hoeve, (New York: Institute of Pacific Relations).
- , (1965), “Decolonization in Indonesia: The Problem of Continuity and Change” *The American Historical Review*, Vol. 70, No. 4, pp. 1058-1073.
- , (1962), “The Structure of Southeast Asian History: Some Preliminary Observations” *Journal of Southeast Asian History*, No. 3.
- , (2000), *Syekh Abdul Qadir al-Jailani and the Qadiriyyah in Indonesia*, (Journal of the History of Sufism, vol. 1-2/2000).
- , (1995), *Sharia Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Banten Sultanate*, (Paris: Archipel vol. 50).
- Burhanudin, J. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erie Fitriana, dkk, (2016), Perjuangan Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Melawan Kolonialisme Di Banten (1831-1897) , *FACTUM Volume 5, Nomor 1, April* (online),

- Tersedia di alamat situs :
http://jurnal.upi.edu/file/JURNAL_ERI_FITRINA.pdf
. (Diakses, 22 Pebruari 2019).
- M. Gilang (2017) Sejarah Lokal Dalam Mengembangkan Patriotisme (Kajian Pada Materi Sejarah Revolusi Fisik Di Banten Tahun 1945-1949), *Jurnal Pendidikan dan Sejarah: Candrasangkala*, ISSN: 2477-2771, e-ISSN: 2477-8214, (online), Tersedia di alamat situs :[http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/arti cle/view/1602](http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/arti%20cle/view/1602)
- Hudaeri, Muhamad et.al., (2002), Naskah Tasbih dan Golok; Studi Tentang Kedudukan, Peran, dan Jaringan Kyai dan Jawara di Banten, *Hasil Penelitian Kompetitif PTAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, Serang.
- Lasmiyati, (2012), Sejarah Uang Republik Indonesia Banten (Uridab) (1945-1949), *Patanjala Vol. 4, No. 3*, September 2012: 467-480, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung (online), Tersedia di alamat situs : [http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.p hp/patanjala/article/viewFile/159/111](http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/viewFile/159/111). (Diakes, 22 Pebruari 2019)
- Maftuh, (2011), *Pembaruan Pendidikan Islam di Banten Awal Abad XX (Studi atas Matlaul Anwar dan al-Khairiyah)*, Analisis, Vol. 2 Desember).
- Mardiyah, (2017), Ulama Dan Pergerakan Partai Komunis Indonesia (PPKI) Di Banten Abad Ke - 20, *Skripsi, Program Studi Sejarah Dan Peradaban Islam Fakultas*

- Adab Dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad Iskandar dan Tri Wahjuning M. Irsyam, (1993), Naskah Sekitar Proklamasi di Daerah Banten, *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok)
- Muslim, Asep, dkk, (2015), Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten, *Jurnal Mimbar*, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015): 461-474, (online), Tersedia di alamat situs : <https://media.neliti.com/media/publications/7556-ID-dinamika-peran-sosial-politik-ulama-dan-jawara-di-pandeglang-banten.pdf>
- Permana, Rahayu. (2004), 'Kyai Haji Sjam'un (1883-1949) Gagasan dan Perjuangannya'. Tesis. (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia).
- Suharto, (1995), "Revolusi Sosial di Banten, 1945-1946, Suatu Kajian Awal", *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995, Depok.
- (1995), "Banten Pada Akhir Masa Revolusi, 1948-1949, Suatu Studi Awal", *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995, Depok.
- (1996), "Dinamika Suatu Daerah Terisolasi (Banten, Antara Dua Agresi Militer Belanda)", *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.
- (2001). "Banten Masa Revolusi, 1945-1949, Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Sastra, UI

Depok.

- M. Soekarahardja, (1982), *Catatan Pengalaman Perjuangan Pribadi sebagai ajudan Brigjen K.H. Sjam'un*, tanggal 6 April.
- Yasmis, (2007), Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, *Jurnal Sejarah Lontar*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember, (online), Tersedia di alamat situs : journal.unj.ac.id/unj/index.php/lontar/article/download/2384/1826/), (Diakses, 22 Pebruari 2019)

Buku

- Ali, Mufti dkk, (2014), *Biografi Ulama Banten* (Serang : Lab. Bantenologi dan Disbudpar Prov. Banten).
- , (2012), "Pengaruh Geger Cilegon 1888 terhadap Perkembangan Pesantren di Banten Masa Kolonial", *Laporan Akhir Penelitian Kompetitif* (Banten: Lemlit IAIN SMHB).
- , (2012), *Banten dan Pembaratan: Sejarah Sekolah 1833-1942* (Banten: STKIP Setia Budhi dan Bantenologi).
- , dkk., (2014), *Sejarah Banten: Membangun Traidisi dan Peradaban*, (Serang: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Banten, 2014).
- , dkk, (2015), *Biografi K.H. Sjam'un (1893-1949)*, (Banten: Dinas (Kebudayaan dan Lab. Bantenologi).
- ,, *Tahanan Banten di Boven Digul (1927- 1942)*, (Serang: Puslitpen LP2M UIN SMHB, 2017
- Ali, A Mukti. (1972). *Agama dan Pembangunan*. (Bandung: Mizan)
- Anderson, Ben. (1988). *Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan*

- Perlawanan di Jawa 1944-1946. Diterjemahkan oleh Jiman Rumbo. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Benda, Harry J.(1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*.(Terj. Daniel Dhakidae). (Jakarta. Pustaka Jaya).
- Bruinessen,Martin Van.(1995). *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarikat, Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*,(Bandung: Mizan).
- , (1994), *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS).
- Budiardjo, Miriam. (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia)
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. (2012). *Laporan Akhir Kajian Rencana Penyusunan Autobiografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. (Provinsi Banten: Disbudpar).
- Disjarahdam VI/Siliwangi, (1979). *Siliwangi Dari Masa Ke Masa*, (Bandung, Angkasa).
- Djajadiningrat, P.A. Achmad, (1996), *Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat* (Jakarta: Paguyuban Keturunan P.A.Achmad Djajadiningrat, 1996)
- Ensering, Else. (1995), Banten, *in Time of Revolution*, In: Archipel, volume 50, (Banten. Histoire d'une région).
- Feillard,Andrée, (1999), *NU visa` vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS).
- Eri Soedewo. (1949), *My Life With Eri San: a Freedom Fighter*, Surabaya.
- Hatta, Mohammad, (1979), *Memoir* (Jakarta: Tintamas Indonesia)

- Irfani, Fahmi, (2011), *Jawara Banten Sebuah Kajian Sosial, Politik Dan Budaya*, Jakarta: YPM Press
- Iskandar, Mohammad, (2001), *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950* (Yogyakarta: Matabangsa).
- Jamhari, Saleh As'ad [ed.], (2009), *Komunisme di Indonesia, jilid 1: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (1913-1948)*, (Jakarta: Pusjarah TNI)
- Kartodirdjo, (1984), *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan, Peristiwa dan Kelanjutannya*, terj. Hasan Basari (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya).
- Kuntowijoyo, (1995), *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya).
- M. Joesoef Efendi, (2014), *Riwayat Hidup K.H. Mas Muhamad Arsyad Thawil*, (Yayasan Pendidikan al-Chasanah).
- Madjiah, Matia, (1986), *Kisah Seorang Dokter Gerilya dalam Revolusi Kemerdekaan di Banten*, (Jakarta, Sinar Harapan).
- McVey, Ruth T. 2010. *Kemunculan Komunisme Indonesia*. (Jakarta: Komunitas Bambu).
- Michrob, Halwaniy, dan A. Mujahid Chudari, (2011), *Catatan Masa Lalu Banten*, (Serang: Penerbit Saudara).
- MUI Kab. Pandeglang, (1993), *Sejarah Perjuangan Para Alim-Ulama di Kabupaten Pandeglang Banten Jawa Barat*, (Catatan Akademik, Prasasti Ulama Pandeglang: MUI)
- Muljana, Slamet (2008), *Kesadaran Nasional, dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, (Jilid I dan I LKiS, Jogjakarta)
- Notosusanto, Nugroho (ed.). (1975). *Sejarah Nasional Jilid VI*.

- (Jakarta: Depdikbud).
- , (1979). *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia).
- Nasution, A.H., (1970), *TNI (Tentara Nasional Indonesia) Jilid I* (Jakarta: Seruling Mas).
- , (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*. (Bandung: Disejarah dan Angkasa).
- Pakpahan, G. (1979). *1261 Hari Di bawah Sinar Matahari Terbit*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Marintan Djaya).
- Ricklefs, M.C., (2001), *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, Third Edition. (Hampshire: Palgrave).
- , (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, dkk., cet. ke-2, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta).
- Sosrodihardjo, Sudjito, (1972). *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa,, Suatu Analisa*, (Karya : Yogyakarta)
- Stroomberg, J, (2018), *Hindia Belanda 1930*, (Jakarta: Diva Press). Supriatna, Nana dan Wiyanarti, Erlina. (ed). (2008). *Sejarah Dalam Keberagaman*. (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI).
- Suardi dan Djajasoempena, (1965), *Sedjarah Perkembangan Pembangunan Daerah Djawa - Barat Tahun 1945 - 1965*, (Djawa Barat Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I Djawa Barat).
- Tihami & Ali Mufti. (2014). *Prosopografi Syekh Nawawi (1813-1897) Biografi, Geneologi Intelektual, Dan Karya*. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten)

- Tim Penyusun Buku Memori Rektor, (2010), *Memori Rektor Prof. Dr. H. M. A. Tihami, M.A., M.M.: Enam Tahun Menjadi IAIN 2005-2010, Transformasi Kelembagaan dan Budaya*, (Serang: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten).
- Vlekke, Bernard H. 2008. *Nusantara, Sejarah Indonesia*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia).
- Williams, Michael Charles, (1990). *Communism, Religion and Revolt in Banten*, (Ohio: Ohio University Center for International Studies)
- , (1982), *Sickle and Crescent: The Communist Revolt of 1926 in Banten* (New York: Cornel University)
- Wrong, Denis (ed). (1970). *Max Weber, Makers of Modern Social Science*, (New Jersey: Englewood Cliffs).
- Yayasan Gedung Arsip Nasional RI, (2009), *RI: Napak Tilas Persahabatan*, (Jakarta : Yayasan Gedung Arsip Nasional RI).

Wawancara

- Muhamad Fatah bin Mad Hadi, Sumur, Serang. 23 Maret 2015
- Muhamad Azhari bin H. Acang, (60 th) di Serang, 22 Pebruari 2019
- Nizmah, S.IP, di Serang, 20 Pebruari 2019 Hj. Tinti Chatib, di Serang, 21 Pebruari 2019
- Ki Duljaya, di Cibugel-Cinoyong Kec. Carita, 29 Desember 2016.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Residen	K.H. TB. Achmad Chatib
Wakil Residen	Dzoelkarnaen Soeria Karta Legawa
Sekretaris	Soebari
Kepala Bagian Umum	M. Sastraatmadja
Kepala Bagian Keuangan	R. Abubakar Sutawinangun
Kepala Bagian Penerangan	H. Muhammad Nur
Kepala Bagian Kemakmuran	Hirlan
Kepala Bagian Sosial	Sirlan
Kepala Bagian Pertanian	Tanuwidjaja
Kepala Bagian Penempatan Tenaga Kerja	H. Mas Gogo Rafiudin Sandjadirdja
Bupati Serang	R.T.A.Hilman Djajadiningrat
Bupati Pandeglang	Mr. R.T. Djumhana Wiriaatmadja
Bupati Lebak	Raden Tumenggung Hardiwinangoen
(Suharto, 2001: 89)	

Lampiran 2:

Bupati Serang	K.H. Sjam'un
Wedana Serang	Muhammad Padmadidjaja

Camat Serang	Muhammad Ubang
Camat Kasemen	K.H. Madzadzi
Camat Taktakan	M. Niti
Camat Waringinkurung	K.H. As'ari
Camat Kramatwatu	TB. Atja Atmakoeemah
Wedana Ciruas	K.H. Soehari
Camat Walantaka	K. Azurum
Camat Kragilan	K.H. A. Koesen
Camat Cikande	K.H. Abdul Hamid
Wedana Pamarayan	K.H. Gozali
Camat Pamarayan	TB. Mukri
Camat Cikeusal	K.H. Sarik
Camat Petir	K.H. Mukri
Camat Kopo	K.H. Soleh
Wedana Ciomas	K.H. Uding
Camat Ciomas	K.H. Soesa'i
Camat Pabuaran	K.H. Mahmood
Camat Baros	Soemantri
Camat Padarincang	K.H. Halimi
Wedana Pontang	K.H. Samawi
Camat Pontang	K.H. Zoehri
Camat Tirtayasa	H. Madsanan
Camat Careng	K.H. Moestaja
Wedana Cilegon	K.H. Soehemi
Camat Cilegon	K.H. Soehari
Camat Bojonegara	K.H. Soleman
Wedana Anyer	K.H. Hasim
Camat Anyer	M. Basari

Camat Cinangka	K.H. Alidjaja
Camat Mancak	K.H. Abdoel Halim
(Suharto, 2001: 124-125).	(Suharto, 2001: 124-125).

Lampiran 3 :

AD/ART Majelis Ulama Banten. SK Residen Banten tanggal 18
Januari 1946

Pasal 1

Majelis Ulama Banten adalah badan yang berusaha:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Residen, dan
- b. Memperluas tablig-tablig Islam di kalangan penduduk.

Pasal 2

Majelis Ulama mengadakan permusyawaratan sedikitnya sebulan sekali, yaitu pada hari minggu kedua dari tiap-tiap bulan.

Pasal 3

Anggota-anggota Majelis Ulama Banten ditetapkan 40 orang banyaknya, dan diangkat oleh Residen atas kemufakatan segenap ulama di daerahnya, dari tiap-tiap kawedanaan 2 orang dan dari kawedanaan kota sedikitnya 3 orang ulama, untuk lamanya 5 tahun.

Pasal 4

Anggota Majelis Ulama menyampaikan keputusan-keputusan permusyawaratan kepada rakyat dan menginsyafkan mereka tentang ketentuan-ketentuan sebagai muslim (*amar ma'ruf* dan *nahyi munkar*) dan menginsyafkan tentang duduknya segala hukum dan aturan Islam.

Pasal 5

Anggota Majelis Ulama berikhtiar untuk mempersatukan dan mengerahkan tenaga alim ulama daerahnya dalam ikatan majelis ulama kawedanaan.

Pasal 6

Anggota Majelis Ulama Pusat mendapat sokongan dari Pemerintah dan diatur oleh Badan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Segala keperluan badan ini dibiayai oleh Pemerintah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Majelis Ulama Pusat diurus oleh:

- a. Satu orang Ketua
- b. Satu orang Ketua Muda
- c. Dua orang Penulis/Notulen

d. Satu orang bendahara

Untuk masa pertama telah dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus pusat, yaitu:

Ketua	: Kiai H. Jamhari Ketua Muda	:
Ahmad Fatoni Penulis I		: Sapari
Penulis II	: H. Md. Hudari	
Bendahara	: H. Udi	

Satu bulan kemudian, KH. Achmad Chatib mengeluarkan SK tanggal 15 Februari 1946 yang menetapkan empat pasal tambahan pada AD/ART yang di-SK-kannya tanggal 18 Januari 1946. Empat pasal tambahan tersebut, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 9

Ditetapkan kawedanaan dalam karesidenan Banten, diadakan Majelis Ulama Kawedanan, yang dipimpin oleh anggota Majelis Ulama Pusat yang berada disitu.

Pasal 10

Anggota Majelis Ulama kawedanan ditetapkan 40 orang banyaknya, diangkat oleh pengurus pusat atas kemufakatan alim ulama yang ada didaerahnya, untuk 5 tahun lamanya.

Pasal 11

Semua anggota Majelis Ulama Kawedanan berkewajiban menjalankan amar maruf dan nahyi anil munkar dalam masing-masing daerahnya dan sekali sebulan harus mengirimkan laporannya kepada Pengurus Majelis

Ulama Pusat.

Pasal 12

Majelis Ulama Kawedanan mengadakan sidangnya, sedikitnya sekali sebulan, yaitu pada tiap-tiap minggu pertama.

DAFTAR INDEKS

A

A. Suandi, 160
A.H. Nasution, 128, 131
Abdurrojak, 141
Aceh, 8, 116, 145, 165
Agresi Militer I, 135, 137
Agresi Militer II, 153
Agus Salim (Menteri Luar Negeri), 7, 145
Ahmad Djajadiningrat, 27, 29, 37, 38
Alexander W.F. Idenburg, 23
ambtenaar Eropa, 27, 29
Amerika Serikat, 136, 137
Australia, 136, 137

B

Banten, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 65, 77, 78, 81, 83, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192
Barisan Banteng, 134
Batavia, 26

Belanda, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 24, 25, 27, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 52, 54, 55, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 79, 82, 85, 92, 99, 106, 116, 117, 119, 120, 122, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 178, 182, 186
Beppan, 81
BKR, 3
Boven Digoel, 51, 53, 55
BPRI, 134
Brigade Tirtayasa, 133, 135

C

Caringin, 15, 18, 31
Ce- Mamat, 7
Cibaliung, 11
Cibeber, 17, 18, 19, 159
Cikeusik, 11
-Cilegon, 17
Cioma, 134
Cirebon, 9
Cudanco, 80

D

daidanco, 80, 83
Daidanco, 81
Dana, 141
Daud Beureueh, 8
De Geraf, 29
Dewan Penasehat Residen Banten, 5
Dewan Rakyat, 7

Djami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah,
162

E

E. Edel Yusuf, 140
Een Eereschuld, 23
Eropa, 27, 36, 37, 69, 99, 106, 108

G

Garis Van Mook, 142
Gubernur Jenderal, 25, 47, 53
Guntur, 128

H

H. Abdul Hamid, 82
H. Abdul Muniam, 82
H. Muhammad Saleh Suzuki, 82
Handbook Hindia Belanda, 24
Hatta, 7, 85
Heiho, 79
Hindia Belanda, 23, 24, 25, 29, 67
Hiroshima, 85
Hitoshi Imamura, 67
Hizbullah Leuwiliang, 134
Hoofdenschool, 29

I

I Gusti Ngurah Rai, 130
Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19,
23, 24, 29, 35, 36, 48, 65, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79,
81, 82, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 95,
96, 99, 102, 103, 106, 112, 113,
116, 118, 124, 125, 126, 128, 129,
130, 131, 134, 135, 136, 137, 140,
145, 146, 147, 150, 164, 168, 170,

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187
Inggris, 67, 69, 85, 100, 129, 136,
199

J

J. Stroomberg, 24
Jakarta, ix, 9, 55, 69, 76, 84, 85, 87,
90, 91, 92, 100, 103, 115, 116,
119, 135, 138, 142, 148, 162, 163,
176, 180, 182, 184, 185, 186, 187
Jawa Barat, 3, 10, 26, 36, 67, 84, 90,
119, 120, 127, 128, 131, 135, 136,
137, 141, 144, 150, 151, 152, 160,
165, 166, 168, 185
Jawa Tengah, 26
Jenderal Terpoorten, 67
Jepang, 2, 4, 5, 7, 51, 56, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 103,
104, 106, 107, 108, 117, 122, 150,
157, 183, 184, 186
Joesoep Adiwinata, 10, 127, 140
Joesoep Martadilaga, 10

K

K.H. Abdul Latif, 18
K.H. Muhaimi, 18
K.H. Muslikh Meragen, 19
K.H. Sjam'un, 83, 84, 129, 131, 133
K.H. TB. Achmad Chatib, 127
K.H. TB. Muhammad Waseh, 13
K.H. Wasi, 20
Kapten Raymond, 130
Kapten Widodo, 139
Kecamatan Petir, 141
Kementrian Keamanan Rakyat, 128

Kementrian Pertahanan, 128
Kesultanan Banten, 1
KH. TB Achmad Chatib, 4, 5, 6
KH. TB. Achmad Chatib, iv, 10, 13,
61, 109, 111, 123, 124, 125, 126,
138, 141, 154, 160
Ki Agung Caringin, 14
Kian Santang, 128
Kol.Dr. Wonojudo, 160
Komite Nasional Indonesia, 5

L

Lampung, 9
Latifah, 15
Let. Kol.Anwar Padmawidjaya, 160
Linggarjati, 130, 131

M

M. Ruyani, 140
Madura, 135
Makkah, 14
Malaya, 85
Malino, 129
Mas Asikin, 9
Masarotul Muhtajin, 159
Mathlaul Anwar, 126
Mee Olie, 139
Menes, 126
Mohammad Enoch, 126
monarki, 127
Mr. Bambang Surono, 160
Muhammadiyah, 1

N

N. Makkers, 9
Nagasaki, 85
Nahdlotul Ulama, 1

Nasution, 9
Nawawi Alif, 141
Negara Indonesia Timur, 8
Negara Pasundan, 8, 125, 127, 143,
145
Nitiatmadja, R. Moeniran (Walikota
Cirebon), 9
Nyai Halimah, 14
Nyai Kamsah, 15

O

Oeang Repoeblik Daerah Banten
(ORIDAB), 7
ORIDAB, 140

P

Pandeglang, 10, 13, 40, 43, 49, 50,
51, 53, 55, 84, 90, 95, 96, 97, 109,
114, 121, 132, 134, 148, 150, 151,
152, 153, 155, 158, 159, 165, 172,
173, 182, 185, 188
Pearl Harbor, 67
Pembela Tanah Air, 78
Persatuan Islam, 1
Perserikatan Bangsa-Bangsa, 136
Perusahaan Pengangkutan Rakyat,
82
pesantren, 159
Pesindo, 134
PETA, 3
politik etis, 23
PPKI, 85
Priangan, 84
provinsialisme, 127

R

R. Abubakar Winangun, 141

R. Gatot Mangkupraja, 79
R. Husni, 14
R. Lumanauw, 140
R. Moh. Nur Atmadibrata, 160
R. Noesrat Djajadiningrat (Patih
Tangerang), 9
Rangkasbitung, 127, 139
Ratu Chasanah, 14
Ratu Ifat, 15
Ratu Wilhelmina, 23
Resimen Singandaru, 134
Romusha, 68

S

Sabilillah, 134
Serang, 9, 10, 11, 26, 29, 30, 32, 35,
37, 38, 39, 40, 41, 53, 54, 55, 65,
84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 104, 107, 108, 109,
111, 112, 115, 120, 126, 127, 131,
132, 134, 140, 141, 146, 148, 150,
151, 152, 153, 155, 160, 162, 163,
164, 166, 168, 179, 181, 183, 185,
187, 188, 189
shudanco, 80
Shudanco, 80
Siliwangi, 128
Sjahrir, 7, 85
Sochari Chatib, 15, 166
Soedirman, 79
Soekanda Bratamenggala, 131
Soekarno, 79, 127
Soeria Kartalegawa, 126, 127
Soetalaksana, 131
Speelwijk, 1
Sukarno, 7, 85
Sulawesi Selatan, 129
Sultan Haji, 1
Sultan Hamengkubuwana IX, 8

Sumatera, 8, 65, 69, 79, 90, 99, 103,
116, 129, 135, 137, 143, 145
Sunan Gunung Jati, 128
Suryakencana, 128
Sutisna Hadiwidjaya, 160
Syarekat Dagang Islam, 1
Syarif Husain, 15
Syech Asnawi Caringin, 5
Syekh Asnawi Caringin, 18
Syekh Abdul Karim Tanara, 18
Syekh Ahmad Khatib Sambas, 18

T

Tapal Kuda, 135
Tarekat Qadariah wa
Naqsubandiyah, 14
Tasikmalaya, 141
Taufik Lutfi, 160
TB. Achmad Chatib, 15
TB. Asnawi, 14
TB. O. Martasudarma, 160
Tentara Keselamatan Rakyat, 128
Tentara Republik Indonesia, 128
Terauchi, 85
territoriaal bestuurs Adviseu, 9
Tirtayasa, 128
Tje Mamat, 133
TKR, 3
TNI, 9
Tokyo, 82
Tubagus Achmad Chatib ibn Waseh
al Bantani, 13

U

Uni Soviet, 136
USS Renville, 142

V

van Deventer, 23
Van Mook, 136
volkstraad, 24, 25

W

Wahhabi, 19

Y

Yogyakarta, 7, 9, 116, 120, 124, 136,
141, 144, 145, 146, 165, 179, 184,
185, 186

Z

Zulkarnaen Suria Karta Legawa, 5

BIODATA PENULIS



Mufti Ali, Ph.D, lahir di Cikeusal Serang Banten tanggal 7 Agustus 1972 dari pasangan Aslihuddin (w. 1993) dan Hj. St. Aminah (w. 2013). Anak ke-5 dari 8 bersaudara ini menempuh pendidikan strata-2 dan strata-3 nya di Fakultas

Humaniora Universitas Leiden dan lulus nopember 2008. Peneliti dan Dosen yang pernah memimpin Laboratorium Bantenologi 2007-2015 dan LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2015-2017). Penulis belasan buku, dan puluhan artikel di jurnal nasional dan internasional ini saat ini sedang menjalankan tugas dari Gubernur Banten untuk mengumpulkan data-data dan sumber sejarah Banten di Belanda, Inggris, Perancis, Denmark, Portugis dan Mesir.